RENCANA PENGELOLAAN KOLABORATIF TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER - WILAYAH BIDANG III 2018 - 2023

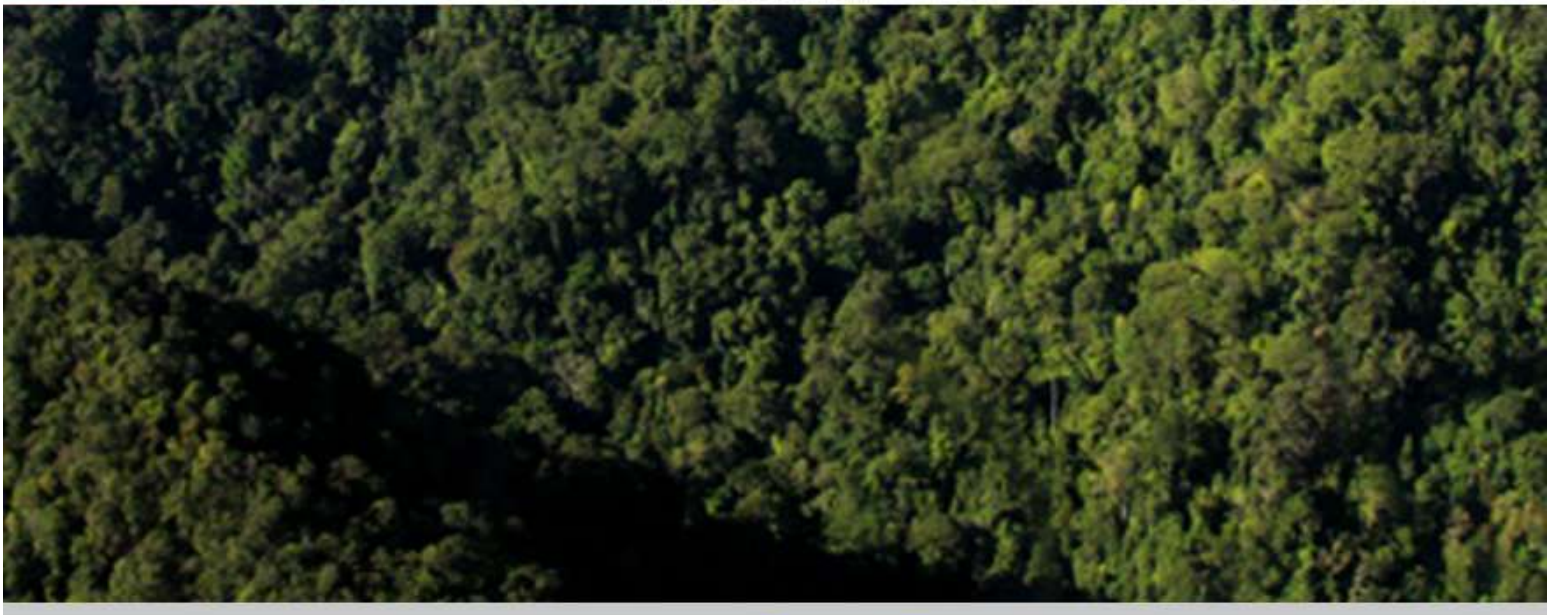

RENCANA PENGELOLAAN KOLABORATIF TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER BPTN WILAYAH III 2018 – 2023

Jakarta, Juli 2018

© 2018, YOSL/OIC-PILI

Dipersiapkan oleh:

YOSL-OIC
Jl. Bunga Sedap Malam XVIIIc No.10
Medan Selayang, North Sumatra,
Indonesia
Phone/Fax: +62-61-8201922

Penyusun :

Konsorsium YOSL-OIC – PILI

Didukung oleh :

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kolaboratif *(Collaborative Management Plan)* Taman Nasional Gunung Leuser Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Tahun 2018-2023 merupakan acuan bagi para pihak dalam pengelolaan kolaboratif termasuk pelaksanaan *Small Grants Programme (SGP) ASEAN Center for Biodiversity* (ACB).

September 2018
Menyetujui,

Plt. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser,

Dr.Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For
NIP. 196211051989032003

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati,

Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
NIP. 19660618199203200

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,

Ir. Wiratno, M.Sc.
NIP. 196203281989031003

Kata Pengantar dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Besar TNGL

Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ditunjuk sebagai kawasan konservasi karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Ekosistem hutan yang beragam mulai dari ekosistem pantai sampai dengan eksosistem hutan pegunungan, menjadikan kawasan TNGL sebagai habitat berbagai macam jenis flora dan fauna. Jenis flora dan fauna langka dan endemik yang ada di kawasan TNGL diantaranya adalah Payung raksasa, Raflesia, Kantung semar dan untuk jenis fauna diantaranya Gajah sumatera, Harimau sumatera, Orangutan sumatera, Badak sumatera dan Penyu. Selain ekosistem yang beragam, kawasan TNGL juga memiliki gejala-gejala alam yang berpotensi sebagai obyek wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan. Tingginya potensi sumber daya alam tersebut menjadi nilai penting kawasan TNGL yang secara ekologi berdampak terhadap ekosistem luar kawasan pada tingkat lokal, nasional dan global. Hal ini ditunjukan dengan status kawasan TNGL sebagai Cagar Biosfer, *ASEAN Hertiage Park* (AHP) dan *World Natural Heritage Site* (Warisan alam dunia).

Status kawasan TNGL yang memiliki nilai penting sampai dengan tingkat global atau internasional menjadi modal startegis untuk memperkuat komitmen semua pihak dan berintegrasi dalam melestarikan nilai penting kawasan TNGL. Pengelolaan kawasan TNGL tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh Balai Besar TNGL tetapi membutuhkan dukungan dan konektivitas dengan stakeholder lain, karena substansi pengelolaan kawasan TNGL yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan itu secara langsung saling terkait dengan pihak lain. Semua kegiatan pengelolaan kawasan TNGL dalam rangka implementasi prinsip-prinsip konservasi, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan akan optimal dan efektif apabila dilaksanakan secara bersama-sama dan terintegrasi dengan kegiatan pihak lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerangka perencanaan yang dibangun dan diimplementasikan dengan prinsip kebersamaan dan terintegrasi.

Balai Besar TNGL memberikan apresiasi dan berbangga karena kawasan TNGL, Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah III - Stabat telah dipilih oleh ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) sebagai salah satu *pilot site* untuk penyusunan dan implementasi *Collaborative Management Planning Small Grant Programme (CMP-SGP) in Indonesia.* Dengan tiga tujuan spesifik yaitu mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati dan penguatan manajemen kolaboratif, CMP-SGP sangat startegis dan tepat untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan TNGL. Selain itu CMP-SGP sejalan dengan arah dan paradigma pengelolaan kawasan konservasi saat ini yaitu sepuluh cara baru pengelolaan kawasan konservasi yang terdiri dari: Menjadikan Masyarakat Sebagai Subyek, Penghormatan Hak Asasi Manusia, Kerjasama Lintas Eselon I, Kerjasama Lintas Kementerian, Penghormatan Nilai Budaya Dan Adat, *Multilevel Leadership*, *Scientific Based Decision Support System*, *Resort Based Management*, *Reward and Mentorship* serta *Learning Organization*. CMP-SGP dengan sepuluh cara baru pengelolaan kawasan konservasi dapat saling melengkapi untuk percepatan pelaksanaan pengelolaan kawasan TNGL khususnya dalam pelaksanaan *role model* Balai Besar TNGL, yaitu pemulihan ekosistem melalui kemitraan konservasi, yang menjadi bagian dari pencapaian sasaran perhutanan sosial.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati yang telah mendukung penunjukan kawasan TNGL sebagai *pilot site* untuk CMP-SGP. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada *Orangutan Information Centre* (OIC) dan *National Working Team Small Grant Programme* (NWT-SGP) yang secara bersama-sama telah menyusun CMP-SGP. Mudah-mudahan CMP-SGP dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan TNGL sebagai *ASEAN Hertiage Park.*

Medan, Agustus 2018
Plt. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser

Dr. Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For
NIP. 19621105 198903 2 003

Ucapan Terima kasih dari Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC)

Tim YOSL - OIC mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem (KSDAE), serta kepada jajaran staf di dalam Direktorat Jenderal KSDAE dan anggota Tim Kerja Nasional (NWT), Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL)); untuk dukungan, kerja sama, dan bantuan yang diberikan kepada kami dalam mengembangkan dokumen CMP di TNGL. Ucapan terima kasih yang sama juga ditujukan kepada pemerintah Provinsi di Sumatera Utara dan unit mereka di Kabupaten Langkat.

Terima kasih juga kami haturkan kepada Kfw (Kreditanstalt für Wiederaufbau) yang melalui ACB (Asean Centre for Biodiversity) telah mendukung upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung Leuser, dan pada saat yang sama membawa manfaat nyata kepada masyarakat yang tinggal berdekatan dengan wilayah TNGL. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang tinggal di sekitar TNGL, karena telah berbagi harapan terbesar mereka dari TNGL di mana kami dapat mengembangkan dokumen ini.

Rencana Pengelolaan Kolaborasi (RPK) ini mememperlihatkan hubungan penting antara manusia dan alam. Kami juga menekankan bahwa dalam dokumen RPK ini masyarakat setempat dan kantor resor TNGL telah menjadi fokus perhatian. Dari peningkatan kesadartahuan, penelitian tentang proyek konservasi keanekaragaman hayati hingga rencana bisnis yang ditujukan untuk mempromosikan ekowisata berkelanjutan di Taman Nasional Gunung Leuser. Kami sangat bersyukur mendengar antusiasme dan komitmen dari otoritas TNGL, pemerintah daerah Kabupaten Langkat dan masyarakat setempat terhadap konservasi GLNP.

Dengan komitmen berkelanjutan dari masyarakat setempat, pemerintah daerah Langkat, sektor swasta dan mitra LSM yang pekerjaannya menguntungkan GLNP, saya yakin bahwa dengan rekam jejak yang ada di lapangan, meskipun sumber daya terbatas, kami dapat terus melestarikan dan meningkatkan lanskap khusus ini yang sangat dinikmati dan dinikmati oleh banyak orang.

Atas nama YOSL-OIC ,

Panut Hadisiswoyo, M.A, M.Sc

Ringkasan Eksekutif

Taman Nasional Gunung Leuser mendapatkan status sebagai Taman Warisan ASEAN/ ASEAN Heritage Park (AHP) pada 1984. AHP merupakan pengakuan dan deklarasi negara-negara anggota ASEAN terhadap taman nasional dan suaka alam tertentu, berdasarkan keunikan, keberagaman dan nilai-nilai luar biasa yang dimiliki, sebagai penghargaan regional dan internasional akan pentingnya taman nasional dan suaka alam tersebut. AHP dalam konteks ASEAN didefinisikan sebagai "Wilayah dilindungi yang memiliki nilai konservasi yang tinggi, dilestarikan sepenuhnya dalam skala yang mewakili ekosistem di wilayah ASEAN". Saat ini terdapat 40 AHP di wilayah ASEAN, diantaranya Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Lorenzt, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan Taman Nasional Wakatobi, yang ditunjuk sebagai Taman Warisan ASEAN di Indonesia. ASEAN Centre for Biodiversity (ACB), merupakan organisasi antar-pemerintah yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, dan mengkoordinir pelaksanaan program AHP. ACB menerima dukungan dari Kerjasama Keuangan Jerman/*German Financial Cooperation* dari KfW (Bank Pembangunan Jerman/*German Development Bank*) dan melalui Small Grants Programme (SGP), mendukung upaya AHP untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memperbaiki penghidupan di dalam dan sekitar daerah inti.

SGP ditujukan untuk membangun kapasitas mitra lokal dan untuk mendukung kolaborasi organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi dan organisasi swasta yang terkait dengan program. Tujuan SGP adalah untuk mendukung pengelolaan kolaboratif, sebuah pendekatan untuk wilayah yang dilindungi dan dikelola oleh pemerintah beserta wilayah di perbatasannya melalui pengelolaan kolaboratif berbagai tingkat, sebagai penghubung antara pihak berwenang pada wilayah yang dilindungi dengan pemangku kepentingan setempat. Rencana pengelolaan kolaboratif tersebut juga harus memperkuat visi jangka panjang wilayah yang dilindunginya. Indonesia dan Myanmar terpilih sebagai negara percontohan program SGP. Bersama dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) BPTN III telah terpilih sebagai pelaksana pengembangan dokumen CMP. Konsorsium Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) telah terpilih untuk mengembangkan dokumen CMP untuk TNGL BPTN III, dan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI – Green Network) untuk mengembangkan dokumen CMP untuk TNWK.

Dengan demikian, tujuan dari dokumen CMP adalah untuk memperkuat pengelolaan dan rencana zonasi yang sudah ada untuk Taman Warisan ASEAN – Taman Nasional Gunung Leuser, dengan partisipasi dan rasa memiliki sepenuhnya dari pemangku kepentingan utama sesuai dengan kebijakan nasional. Sedangkan tujuan spesifik dari dokumen CMP adalah (1) untuk mengembangkan rencana pengelolaan kolaboratif lima tahun yang mengintegrasikan Rencana Pengelolaan Taman yang sudah ada, ditambah dengan komitmen dan kegiatan dari pemangku kepentingan dan (2) untuk mengidentifikasi intervensi utama yang patut dilakukan untuk mendapatkan dukungan SGP dalam mewujudkan peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan kesinambungan pembangunan penghidupan masyarakat

Dokumen CMP dikembangkan melalui rangkaian pertemuan partisipatif dengan pemangku kepentingan yang relevan, terutama dengan TNGL, untuk mendengarkan pendapat, masukan, dan sudut pandang. Proses kolaboratif mensyaratkan dokumen CMP akan bersinergi dengan visi TNGL : *TNGL Lestari dan mendukung Pembangunan Berkelanjutan 2019 ;* dan tujuan pengelolaan TNGL ; *Mengukuhkan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai benteng ekosistem yang berfungsi optimal sebagai sistem penyangga kehidupan dan bermanfaat bagi masyarakat.*

Dokumen CMP akan mendukung TNGL dalam memenuhi tujuan dan visi pengelolaan tersebut dan membantu pelaksanaan misi TNGL yang terdiri dari: (1) meningkatkan kapasitas dan kompetensi staf demi memperkuat efektifitas pengelolaan ; (2) memperkuat legalitas batas demarkasi taman nasional yang telah disepakati dan diketahui oleh pemangku kepentingan yang relevan; (3) mempercepat proses pengaturan pengelolaan, pengelolaan berbasis resort, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem ; (4) meningkatkan pemanfaatan wilayah sesuai dengan keberlangsungan potensinya dan (5) untuk meningkatkan kesadartahuan dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan berimbang dan bertanggungjawab di Taman Nasional Gunung Leuser.

Hasil yang diharapkan dari dokumen CMP adalah : (1) meningkatnya komitmen pemangku kepentingan mewujudkan pengelolaan efektif TNGL, (2) dikembangkan dan dilaksanakannya rencana pengelolaan dan keuangan lima tahun yang sejalan dengan *role model* konservasi TNGL (3) menguatnya kesadartahuan masyarakat akan konservasi dan manfaat berkesinambungan dari keanekaragaman hayati, juga menguatnya pengembangan penghidupan berbasis masyarakat beserta tata kelolanya.

Balai Besar TNGL telah menelaah dan menganalisa tantangan dalam penerapan tujuan pengelolaan, yakni (1) terbatasnya sumber daya manusia di kantor Balai Besar TNGL dalam mewujudkan tujuan pengelolaan kolaboratif ; (2) terbatasnya pemanfaatan potensi hutan TNGL oleh masyarakat yang tinggal berbatasan dengan wilayah TNGL ; (3) penyelesaian konflik tenurial di wilayah TNGL sangatlah penting dan membutuhkan komitmen berbagai pemangku kepentingan dan juga (4) keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan dalam konteks pengelolaan TNGL sangat terbatas.
Permasalahan TNGL terkait sumber daya manusia dan kapasitas institusional mencakup isu kurangnya latar belakang pendidikan dan pengalaman staf TNGL, frekuensi relokasi staf yang tinggi, jumlah staf untuk operasional dan pengelolaan terbatas, serta kurangnya kemampuan staf di tingkat resort. Selain itu, sumber daya keanekaragaman hayati di TNGL yang sangat tinggi sesungguhnya dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmiah, dan juga nilai ekonomis termasuk agrikultur, industri pariwisata dan energi. Sayangnya, pemanfaatan dan pemahaman potensi tersebut oleh masyarakat sekitar masih kurang dan berakibat pada masalah perambahan dan konflik tenurial. Oleh karena itu, rencana TNGL dalam mempersiapkan 6.500 ha untuk restorasi ekosistem di BPTN III menjadi indikasi dari upaya kuat TNGL untuk memecahkan permasalahan perambahan yang telah terjadi. Pelaksanaannya akan fokus pada wilayah Sekoci, di mana ancaman perambahan sangat tinggi. Solusi yang tanggap dan sesuai merupakan langkah penyelesaian yang penting di area tersebut.

Sebagian masyarakat yang hidup di wilayah berbatasan dengan TNGL juga menyumbangkan saran dan masukan, yang memungkinkan berkontribusi terhadap konservasi TNGL. Beberapa diantaranya, kebutuhan untuk inovasi dan pengembangan produk, dan akses ke pasar. Pada pengelolaan ekowisata mencakup isu penguatan institusional, pengelolaan pengunjung, peningkatan kapasitas dan diversifikasi produk untuk pasar yang lebih luas. Isu mengenai aksesibilitas meliputi tantangan untuk mendapatkan akses yang nyaman ke tempat wisata utama di TNGL, yang kebanyakan berlokasi tidak jauh dari kota-kota yang memiliki pasar (*market*). Fasilitas dan infrastruktur terkait dengan pariwisata memiliki isu pada distribusi pengunjung yang tidak seimbang antara satu tujuan wisata dengan yang tujuan wisata lain dalam TNGL BPTN III.

Berdasarkan misi dan visi, tujuan pengelolaan TNGL, konsep pengelolaan kolaboratif, kebijakan pengelolaan kolaboratif di wilayah konservasi, dan mandat dari SGP-ACB ; pengembangan dokumen CMP di TNGL menentukan penghidupan dan konservasi keanekaragaman hayati sebagai pendekatan tematis dalam melaksanakan SGP-ACB. Program dan sub-program yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

(1) dukungan kepada program keanekaragaman hayati mencakup:
- (a) Sub-program Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Wilayah
- (b)Sub-program Penjangkauan dan Penyadartahuan tentang Konservasi kepada Masyarakat
- (c) Sub-program Inventarisasi, Identifikasi, dan Monitoring Keanekaragaman hayati
- (d) Sub-program Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem
- (e) Sub-program Penegakan Hukum

(2) Dukungan pada program penghidupan terdiri dari:
- (a) Sub-program Pengembangan Masyarakat dan
- (b) Sub-program Ekowisata.

Program Penghidupan dalam dokumen CMP ini dirancang terutama untuk anggota Kemitraan Konservasi di Sekoci, sebagai *role model* TNGL.

Strategi program akan fokus pada pelibatan Balai Besar TNGL berkolaborasi dengan NGO yang ditunjuk ; dengan melibatkan kelompok kerja, dan dinas pemerintah kabupaten terkait, resort TNGL yang terkait, pemimpin desa di wilayah pelaksanaan program, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu sangatlah penting untuk memperkenalkan program dan kegiatan kunci yang akan dilaksanakan kepada para pemangku kepentingan yang dituju, melalui proses lokakarya dan sosialisasi. Selanjutnya, pada akhir setiap pelaksanaan sub-program, sangatlah penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk menganalisa dan menelaah jika kegiatan kunci telah memenuhi visi, misi, dan tujuan pengelolaan TNGL, and apakah variabel indikator telah tercapai.

Daftar Singkatan

ACB : ASEAN Centre for Biodiversity
AD/ART : Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
AHP : ASEAN Heritage Parks
BPTN : Bidang Pengelolaan Taman Nasional
CMP : Collaborative Management Planning
FGD : Focus Group Discussion
GLNP : Taman Nasional Gunung Leuser
GOI : Government of Indonesia/ Pemerintah Indonesia
HL : Hutan Lindung
HP : Hutan Produksi
HPK : Hutan Produksi Konversi
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HPI : Himpunan Pramuwisata Indonesia
IUPJWA : Izin Usaha Pengusahaan Jasa Wisata Alam
IUPSWA : Izin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam
KPA : Kawasan Pelestarian Alam
KSA : Kawasan Suaka Alam
Ditjen KSDAE : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
LPMD : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
NGO : Non-Governmental Organization/Organisasi Nirlaba
Permenhut : Peraturan Menteri Kehutanan
PILI : Pusat Informasi Lingkungan Indonesia
PP : Peraturan Pemerintah
RBM : Resort-Based Management/Pengelolaan Berbasis Resort
RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWK :Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
RTRWN :RencanaTata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP : RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi
SGP : Small Grants Programme/ Program Hibah Kecil
SK : Surat Keputusan
SPTN : Seksi Pengelolaan Taman Nasional
Tahura : Taman Hutan Raya
TWA : Taman Wisata Alam
UNESCO : The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UU : Undang-Undang
VESSWIC : The Veterianary Society for Sumateran Wildlife Conservation
WKNP : Way Kambas National Park/Taman Nasional Way Kambas
WCS-IP : Wildlife Conservation Society – Indonesia Programme
YOSL-OIC : Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre
YEL-SOCP : Yayasan Ekosistem Lestari – Sumateran Orangutan Conservation Project
YPOI : Yayasan Peduli Orangutan Indonesia
YHUA : Yayasan Hutan Untuk Anak

YLI : Yayasan Leuser Indonesia

Daftar Gambar

Gambar 1. *Inception meeting* di Grandhika Hotel, Medan, 19-20 April 2018.

Gambar 2. Foto bersama dengan Ir. Wiratno saat *inception meeting* di Grandhika Hotel, Medan, 19-20 April 2018.

Gambar 3. Sekretaris I Kabupaten Langkat menyampaikan opininya saat Pertemuan Konsultasi Publik, Medan 30 Juli 2018.

Gambar 4. Foto bersama saat Pertemuan Konsultasi Publik, Medan 30 Juli 2018.

Gambar 5. Sesi FGD dengan unit-unit resort, Medan 19 April 2018.

Gambar 6. Tim YOSL-OIC menginterview pemandu wisata lokal di Batu Katak.

Gambar 7. Produk kerajinan tangan pandan lokal di Batu Katak.

Gambar 8. Jalur trekking alami di Batu Katak.

Gambar 9. Pohon besar, salah satu daya tarik di Batu Rongring

Gambar 10. Gajah Sumatra di Tangkahan, salah satu spesies kunci di TNGL.

Gambar 11. Rumah pohon di Bekancan Resort.

Gambar 12. Pertemuan pemangku kepentingan di Sekoci, 14 Mei 2018.

Daftar Tabel

Tabel 1. Peraturan tentang Pelibatan Pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tabel 2. Nilai METT terkait dengan Pelibatan pihak lain dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Tabel 3. Pemangku kepentingan potensial dan profil singkat

Tabel 4. Program, Perkiraaan Anggaran, dan Lini waktu

Tabel 5. Sub-program dan Rencana Kegiatan Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan wilayah

Tabel 6. Sub-program dan Rencana Kegiatan Penjangkauan Masyarakat dan Penyadartahuan tentang Konservasi

Tabel 7. Sub-program dan Rencana Kegiatan Inventarisasi, Identifikasi, dan Monitoring Keanekaragaman Hayati

Tabel 8. Sub-program dan Rencana Kegiatan Restorasi & Rehabilitasi Ekosistem

Tabel 9. Sub-program dan Rencana Kegiatan Penegakan Hukum

Tabel 10. Sub-program dan Rencana Kegiatan Pengembangan Masyarakat

Tabel 11. Sub-program dan Rencana Kegiatan Ekowisata

Tabel 12. Ringkasan Program, Perkiraan Anggaran, dan Lini waktu

Tabel 13. Matriks Program Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah Bidang III

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

Foreword by Director General Nature Resource and Ecosystem Conservation (KSDAE).....iv

Executive summary vi

List of abbreviations viii

Daftar Peta ix

Daftar Gambar ix

Daftar Tabel ix

1. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Sasaran Proyek 1

1.3. Metodologi 3

1.4. Ruang Lingkup 7

2. DESKRIPSI TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER KAWASAN III 8

2.1. Ruang Lingkup 8

2.2. Sejarah Taman nasional Gunung Leuser 9

2.3. Tata Kelola 10

2.4. Masyarakat 11

2.5. Pengelolaan Hayati 11

2.6. Pariwisata 13

2.7. Profil Resort 14

3. KONSEP RENCANA PENGELOLAAN KOLABORATIF – TEORI DAN LANDASAN KEBIJAKAN BAGI PENGELOLAAN KOLABORATIF DI KAWASAN KONSERVASI 21

3.1. Konsep Pengelolaan Kolaboratif 21

3.2. Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif 22

3.3. Kerjasama Pengembangan Wisata Alam 23

3.4. Kerjasama untuk Pemberdayaan Masyarakat 24

4. TANTANGAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER KAWASAN III 28

4.1. Tantangan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Kawasan III 28

4.1.1. Kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan 28

4.1.2. Sumber daya keanekaragaman hayati 29

4.1.3. Masyarakat di sekitar kawasan 29

4.1.4. Pengelolaan ekowisata 30

4.1.5. Aksesibilitas 30

4.1.6. Fasilitas dan infrastruktur terkait pariwisata 31

4.1.7 Dukungan Pemangku Kepentingan 31

4.2. Kendala-kendala Utama dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser 36

4.2.1. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur 36

4.2.2. Pemungutan ilegal produk hasil hutan non kayu 36

4.2.3. Ketiadaan Penelitian Terapan 36
4.2.4. Pelanggaran batas 36

5. STRATEGI DAN RENCANA AKSI 37
5.1. Visi & Misi 37
5.2. Program dan Kegiatan-kegiatan Kunci 38
5.2.1. Dukungan bagi Program Konservasi Keanekaragaman Hayati 41
5.2.1.1. Sub-program Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan 41
5.2.1.2. Sub Program Penjangkauan Masyarakat dan Kesadartahuan Konservasi 42
5.2.1.3. Subprogram Inventarisasi, Identifikasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati 45
5.2.1.4. Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem 47
5.2.1.5. Sub program Penegakan Hukum 49
5.2.2. Dukungan bagi Program Mata Pencaharian 51
5.2.2.1. Sub Program Pendampingan Masyarakat 51
5.2.2.2. Sub Program Ekowisata 53
5.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi 72
5.4 Manajemen Pengetahuan 74

6. PENUTUP 75
References 76

1

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) telah menerima dukungan dari *German Financial Cooperation* untuk menyokong upaya-upaya *ASEAN Heritage Parks* (AHP) dalam melindungi keanekaragaman biologis dan meningkatkan mata pencaharian di dalam dan sekitar zona inti, melalui *Small Grants Programme* (SGP). SGP setiap saat bekerja untuk membangun kapasitas mitra lokal dan mendukung kolaborasi seluruh organisasi pemerintah, non-pemerintah, akademik dan sektor swasta yang terkait dengan program ini. SGP bertujuan mendukung pendekatan pengelolaan kolaboratif, atau pengelolaan dampingan, pada lansekap kawasan lindung yang dikelola oleh pemerintah dan kawasan-kawasan sekitarnya melalui pengelolaan dampingan multi-level sebagai upaya untuk menghubungkan petugas-petugas kawasan lindung dengan pemangku kepentingan setempat. Indonesia dan Myanmar terpilih sebagai negara-negara pertama percontohan SGP.

Sebelum operasionalisasi SGP, penyusunan kerangka kerja rencana pengelolaan kolaboratif (*Collaborative Management Plan* - CMP) sangat diperlukan. Karenanya, data awal untuk SGP seharusnya adalah rencana pengelolaan kolaboratif guna mewujudkan visi jangka panjang rencana pengelolaan. Bersama dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bidang Pengelolaan (BPTN) III dan kawasan penyangganya telah dipilih sebagai tempat pelaksanaan penyusunan CMP.

YOSL-OIC dipilih untuk menyusun dokumen CMP untuk BPTN III TNGL, Bersama dengan PILI untuk menyusun RPK di TNWK. Serangkaian pertemuan dan kunjungan lapangan guna menilai lokasi-lokasi proyek dan intervensi-intervensi yang memungkinkan telah dilaksanakan sebagai kegiatan awal penyusunan dokumen CMP. Penilaian awal di enam lokasi Bidang Pengelolaan (BTPN) III TNGL menunjukkan hasil dimana ekowisata dan konservasi keanekaragaman hayati teridentifikasi sebagai pendekatan tematik bagi pelaksanaan SGP-ACB.

BPTN III TNGL terletak di Kabupaten Langkat dan Karo dengan luas 214.884 ha. BIdang pengelolaan III terdiri atas dua Seksi Pengelolaan (SPTN) dan unit-unit pengelolaan yang lebih kecil, yang disebut resort. Resort-resortnya adalah Trenggulun, Sei Betung, Sekoci, Sei Lepan, Cinta Raja, Tangkahan, Bukit Lawang, Bahorok, Marike and Bekancan.

Kawasan cakupan CMP utamanya terletak di Kabupaten Langkat. Batu Katak, Bukit Lawang, Batu Rongring, Tangkahan, Bukit Mas, Sekoci dan Bekancan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan proyek. Seiring ditetapkannya pengelolaan berbasis resort (RBM) sebagai fokus utama strategi pengelolaan TNGL, pemilihan lokasi mengacu dan diklasifikasi berdasarkan lokasi resort terkait. Resort terkait termasuk Bahorok, Bukit Lawang, Tangkahan, Sekoci and Bekancan.

1.2. Sasaran Proyek

Sasaran umum penyusunan dokumen ini adalah untuk memperkuat rencana pengelolaan dan zonasi Taman Nasional Gunung Leuser yang telah ada dengan pelibatan dan partisipasi penuh dari pemangku kepentingan kunci, sesuai dengan kebijakan nasional.

Sasaran khusus penyusunan rencana kolaboratif adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kelola kolaboratif lima tahun yang mengintegrasikan Rencana Pengelolaan Taman Nasional yang ada dengan beragam komitmen dan kegiatan yang sudah berjalan oleh pemangku kepentingan terkait.
2. Identifikasi intervensi prioritas untuk perhatian segera dan pemenuhan syarat dukungan SGP yang diarahkan bagi peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan mata pencaharian masyarakat berkelanjutan.

Keluaran yang diharapkan dari sasaran-sasaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TNGL yang efektif.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pembiayaan kolaboratif untuk lima tahun yang sejalan dengan prioritas konservasi role model TNGL.
3. Meningkatnya kesadartahuan masyarakat akan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan pengembangan mata pencaharian berbasis masyarakat, serta tata kelola.

1.3. Metodologi

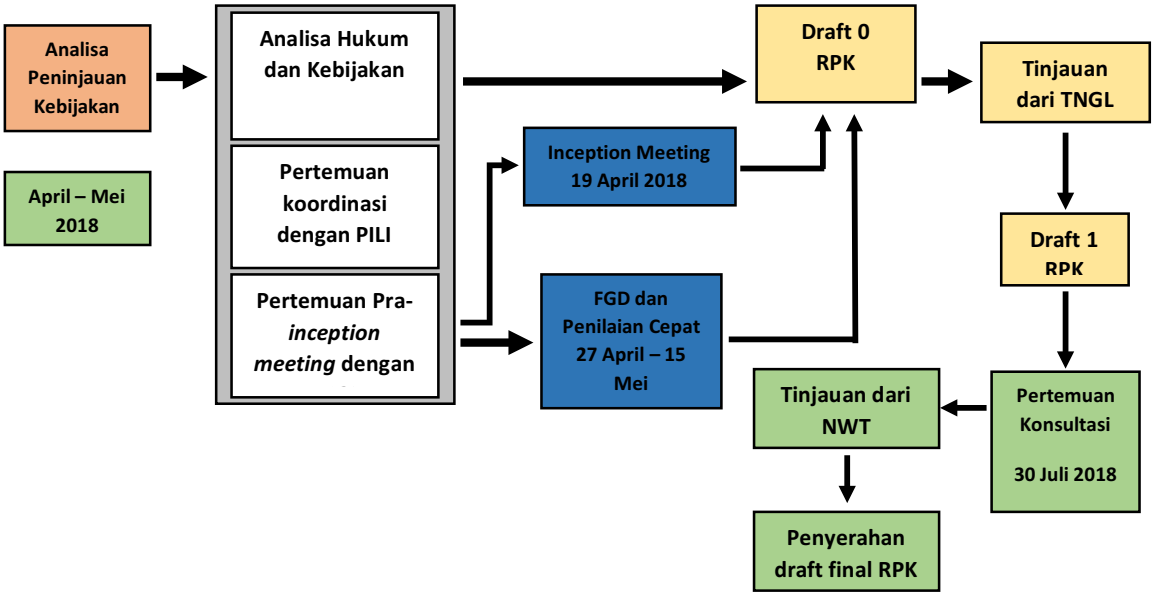

Bagan 1. Proses dan metode pengembangan dokumen CMP

Rencana Pengelolaan Kolaboratif menggunakan empat metodologi termasuk (1) *inception workshop*, (2) analisa dokumen, (3) *Focus Group Discussion* (FGD) dan penilaian cepat, dan (4) pertemuan konsultasi.

Inception workshop dilaksanakan untuk memperkenalkan keluaran dan sasaran CMP, tim kerja, latar belakang proyek dan indicator pencapaian. Fase ini juga dilaksanakan guna mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan penting terkait mekanisme kerja RPK.

Inception workshop dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 di Grandhika Hotel, Medan, Sumatra Utara. Dihadiri oleh 70 peserta mewakili Tim Kerja Nasional (termasuk Kementerian

Kehutanan dan ahli-ahli yang ditunjuk oleh Dirjen), pegawai TNGL dari unit-unit resort dan teknis, *liaison officer* untuk SGP-ACB, NGO-NGO yang ada di Sumatera Utara (Vesswick, YEL, Scorpion), YOSL-OIC dan PILI.

Workshop terdiri atas empat sesi: sambutan pembukaan, presentasi panel dan sambutan penutup dari Direktur Jenderal Kementerian Kehutanan. Sambutan utama disampaikan oleh Kepala Unit Teknis TNGL dan Kepala Sub Direktorat Penerapan Konvensi Internasional, Kementerian Kehutanan. Saat sesi panelis, Direktorat KKH mempresentasikan mekanisme SGP-ACB dan rencana pelaksanaannya di Bidang Pengelolaan III TNGL; dilanjutkan oleh Kepala Unit Teknis TNGL yang menyampaikan kondisi terkini TNGL dan rencana pengelolaan jangka panjang TNGL. YOSL-OIC mempresentasikan rencana pelaksanaan CMP, metodologi, mekanisme dan tim kerja. Sesi kemudian ditutup dengan diskusi diantara peserta workshop untuk merespon presentasi-presentasi yang telah disampaikan. Perentasi dan diskusi dipusatkan pada rencana kerja, strategi pelaksanaan penilaian dan langkah-langkah tindak lanjut untuk melengkapi dokumen CMP.

Gambar 1. *Inception Meeting* di Grandhika Hotel, Medan, 19 April 2018. (Foto oleh Gita Defoe)

Gambar 2. Foto Bersama dengan Ir. Wiratno, saat *Inception meeting* di Grandhika Hotel, Medan, 19 April 2018. (Foto oleh Syufra Malina)

Analisa dokumen dilaksanakan untuk menganalisa rencana pengelolaan TNGL atau proyek-proyek relevan yang ada dan/atau dokumen penelitian guna meninjau konsep dan pendekatan pengelola dalam mengidentifikasi proses dan metodologi, perencanaan operasional berdasarkan konsep yang dapat diterapkan. Rencana Pengelolaan TNGL 2010-2019, dokumen-dokumen arahan Dirjen terkait role model dalam taman nasional, *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT), dokumen-dokumen pengelolaan berbasis resort di TNGL, Data Pemerintah Kabupaten Langkat (BPS) 2017 dan profil desa-desa merupakan sumber informasi primer yang dipelajari.

Pertemuan konsultasi dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik, opini dan perspektif pengalaman dari pemangku kepentingan terkait (kantor pengelolan TNGL, kantor wisata, kelompok-kelompok masyarakat lokal di bidang pertanian dan pariwisata). Proyek ini dimulai dengan serangkaian diskusi menyeluruh antara YOSL-OIC dan Kantor TNGL di Medan. Selama *workshop* pra dan paska *inception*, pertemuan-pertemuan konsultasi antara Kantor TNGL dan Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat juga telah dilaksanakan dari pertengahan April hingga minggu pertama Mei, disela-sela proses persiapan. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan sebelum FGD dan penilaian lapangan. Pertemuan-pertemuan ini menyimpulkan cara efektif untuk melakukan penilaian adalah dengan melaksanakan penilaian bersama dan FGD dengan fasilitasi dari pegawai kantor bidang pengelolaan III dan dukungan tambahan dari karyawan kantor resort.

Gambar 3. Sekretatis Satu Kabupaten Langkat menyampaikan opininya dalam Pertemuan Konsultasi, Medan 30 Juli 2018. (Foto oleh Syufra Malina)

Gambar 4. Foro bersama saat Pertemuan Konsultasi, Medan 30 Juli 2018. (Foto oleh Syufra Malina)

FGD dan penilaian cepat dilaksanakan untuk melakukan analisis SWOT pada resort-resort TNGL terkait guna mengevaluasi kekuatan dan tantangan, serta untuk menilai kebutuhan kapasitas. Fase ini juga dilakukan guna memperoleh umpan balik, opini dari pemangku kepentingan terkait di lapangan. Pada saat bersamaan, penilaian cepat dilaksanakan dengan tujuan pemeriksaan keadaan sesungguhnya guna menganalisa profil resort di lapangan,

pemeriksaan silang dengan potensi; penilaian kekuatan dan peluang; serta penilaian kebutuhan kapasitas.

Focus Group Discussion dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Grandhika Hotel, Medan, Sumatera Utara. Dihadiri oleh 70 peserta mewakili Tim Kerja Nasional (termasuk Kementerian Kehutanan dan ahli-ahli yang ditunjuk oleh Dirjen), petugas TNGL dari unit teknis dan resort, *liaison officer* untuk SGP-ACB, NGO-NGO yang ada di Sumatera Utara (Vesswick, YEL, Scorpion), YOSL-OIC dan PILI.

Sesi dibuka oleh staff YOSL-OIC menyampaikan pendahuluan, sasaran dan mekanisme FGD. Peserta workshop, khususnya perwakilan dari unit resort, kemudian dikelompokkan menjadi dua diskusi paralel, focus pada identifikasi profil resort mereka dan kondisi terkini. Peserta diminta mengisi kertas kerja guna menilai ancaman dan peluang di resort mereka menggunakan Tabel SWOT. FGD juga dilakukan guna mendorong kegiatan pemetaan partisipatif di tingkat resort. Dengan demikian, peserta kelompok diskusi juga mendiskusikan kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkolaborasi dengan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar. Pada akhir sesi, perwakilan dari tiap kelompok diskusi menyampaikan hasil diskusi mereka. Sesi ditutup dengan rekomendasi kegiatan yang mungkin dilaksanakan pada tingkat level melalui kemitraan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan.

Gambar 5. Sesi FGD untuk unit resort, Medan, 20 April 2018. (Foto oleh Syufra Malina)

FGD di lapangan juga dilaksanakan bersamaan dengan penilaian cepat. FGD dan penilaian dilaksanakan pada akhir April hingga pertengahan Mei. Penilaian di Bukit Lawang dan Batu Katak dilaksanakan pada 27 dan 28 April; penilaian di Batu Rongring, Tangkahan, Pancasila, Bekancan dan Sekoci kemudian dilaksanakan pada 11 hingga 15 Mei. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kunjungan ke lokasi-lokasi wisata yang telah ada guna menilai kondisi terkini dan melaksanakan diskusi kelompok intensif bersama pegawai resort TNGL, perwakilan persatuan pemandu wisata, persatuan akomodasi dan perwakilan kelompok masyarakat lokal. Selama penilaian, ditemukan bahwa kebanyakan data pada tingkat desa tidak memiliki tingkat konsistensi yang sama. Karenanya, informasi yang terkumpul kemudian diperiksa ulang saat berdiskusi dengan pemangku kepentingan lokal sebagai pengecekan ulang data, jika dimungkinkan.

Gambar 6. Tim YOSL-OIC mewawancara pemandu wisata lokal di Batu Katak

1.4. Ruang Lingkup

Rencana pengelolaan kolaboratif ini mengintegrasikan rencana pengelolaan TNGL yang ada dengan beragam komitmen dan kegiatan yang sudah berjalan oleh pemangku kepentingan serta mengidentifikasi prioritas intervensi yang membutuhkan perhatian cepat dan sesuai persyaratan dukungan *Small Grant Programmes*. Proses dan hasilnya tidak terbatas pada intervensi SGP saja dan akan secara eksplisit menyertakan pendanaan dari sumber nasional.

Kawasan cakupan CMP adalah Bidang Pengelola (BPTN) III Taman Nasional Gunung Leuser dan zona penyangganya, utamanya terletak di Kabupaten Langkat. Batu Katak, Bukit Lawang, Batu Rongring, Tangkahan, Bukit Mas, Sekoci dan Bekancan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan proyek. Seiring ditetapkannya pengelolaan berbasis resort (RBM) sebagai fokus utama strategi pengelolaan TNGL, pemilihan lokasi mengacu dan diklasifikasi berdasarkan lokasi resort terkait. Resort terkait termasuk Bahorok, Bukit Lawang, Tangkahan, Cinta Raja, Sekoci and Bekancan.

2

DESKRIPSI TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER WILAYAH BIDANG III

2. DESKRIPSI TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER BIDANG PENGELOLAAN III

2.1. Ruang Lingkup

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dinamakan menurut Gunung Leuser (3404 m dpl)[1], yang merupakan gunung kedua tertinggi di Sumatera. Ia adalah satu-satunya tempat di dunia yang menjadi rumah bagi orangutan, harimau, gajah dan badak dalam satu hutan.

TNGL diresmikan pada tahun 1980, sebagai salah satu dari lima taman nasional pertama di Indonesia; terletak di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh mencakup area seluas 830.268,95 ha[2]. BPTN III TNGL mencakup area seluas 205.355,14 ha; terletak di Kabupaten Karo dan terutama di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Bidang pengelolaan III terdiri atas dua seksi pengelolaan (SPTN) dan unit pengelolaan lebih kecil, yang dikenal sebagai resorts. Resort-resort termasuk Trenggulun, Sei Betung, Sekoci, Sei Lepan, Cinta Raja, Tangkahan, Bukit Lawang, Bahorok, Marike dan Bekancan. Daerah cakupan CMP terletak di Kabupaten Langkat.

Kabupaten Langkat mencakup kawasan seluas kurang lebih 626.329 ha[3], mewakili 8.74% dari total luas Provinsi Sumatera Utara[4]. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Aceh di Utara dan Barat, Kabupaten Karo di Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai di Timur. Bahorok (1,101.83 km² atau 17.59%) adalah kecamatan terbesar berdasarkan luas lahan, diikuti oleh Batang Serangan seluas sekitar 899.38 km² (atau 14.36%) dari total luas kabupaten[5].

Pengaturan dan pengelolaan taman nasional sebagai kawasan dilindungi dan sebagai bagian dari kawasan strategis nasional disebut dalam PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)[6]. Dokumen tersebut merupakan panduan bagi (1) penyiapan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional guna mengintegrasikan dan mensinergikan keterkaitan pembangunan antar provinsi; (2) sinkronisasi lintas sector guna menentukan lokasi dan wilayah yang diarahkan untuk investasi, dan (3) perencanaan ruang kawasan strategis nasional dan perencanaan ruang kabupaten/kota.

Pemberlakuan RTRWN telah mendorong seluruh provinsi di Indonesia untuk merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Kabupaten Langkat telah merespon arahan tersebut dengan mengeluarkan Perda tentang RTRWK No. 9/2013 tertanggal 16 Desember 2013. Menyusul proses tersebut, dikeluarkanlah SK Menteri Kehutanan No.579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014 (yang merupakan

[1] www.ekowisata.org/map.php.accessed on July 2nd, 2018
[2] SK Menteri Kehutanan No. 6589/Menhut-VII/KUH/2014 tentang pembangunan TNGL di Provinsi Aceh dan SK Kemenhut No. 4039/Menhut-VII/KUH/2014 tentang pembangunan TNGL di Provinsi Sumera Utara.
[3] Data statistik Kabupaten Langkat (BPS), 2017. Hal. 3
[4] RPJDP Kabupaten Langkat 2005-2025.
[5] Data statistik Kabupaten Langkat, op.cit. Hal 3.
[6] Peraturan Pemerintah (PP) No. 13/2017 tentang perubahan pada PP No.26/2008 telah dikeluarkan.

pembetulan dari SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005) untuk meratifikasi kawasan tutupan hutan di Provinsi Sumatera Utara.

SK tersebut menyatakan bahwa kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.05 juta ha termasuk Kabupaten Langkat. Berdasarkan fungsinya, SK tersebut menetapkan a 427.008 ha sebagai kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA), kawasan hutan lindung (HL) seluas 1.2 juta ha, 641.769 ha Hutan Produksi Terbatas (HPT), 704.452 ha Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 75.684 ha. Menurut data[7] Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), penggunaan lahan hutan di Kabupaten Langkat termasuk 69.907.89 ha hutan; yang terdiri atas 6.27% Hutan Lindung (HL), hutan produksi terdiri atas 35.91% hutan produksi permanen (HP) dan 57.82% hutan produksi terbatas (HPT).

Ada sedikitnya 26 sungai dan anak sungai mengalir di desa-desa termasuk diantaranya Sei Wampu, Sei Batang Serangan, Sei Lepan, Sei Besitang; menyediakan beragam ekosistem dan lansekap untuk habitat margasatwa, irigasi, transportation dan wisata[8].

2.2. Sejarah Taman nasional Gunung Leuser

Sejarah TNGL dimulai ketika pemerintah kolonial menyampaikan perintah kepada geolog F.C. van Heurn untuk mengeksplorasi sumber mineral dan minyak di Selatan Aceh pada akhir 1920[9]. Selama ekspedisi, van Heurn diwajibkan untuk membahas temuan-temuan eksplorasinya dengan pemimpin lokal yang selanjutnya menyampaikan kekhawatiran mereka kepada van Heurn terkait eksploitasi lebih lanjut kawasan tersebut. Van Heurn mencatat bahwa kawasan pegunungan di sekitar Gunung Leuser dianggap tempat suci oleh masyarakat Gayo yang hidup di sekitarnya. Van Heurn selanjutnya mengusulkan proposal untuk penetapan cagar alam kepada Komite Netherland untuk Perlindungan Konservasi Alam Internasional (*Netherlands Committee for the International Protection of Nature Conservation*) pada bulan Agustus 1928, yang kemudian ditindaklanjuti oleh komite tersebut kepada pemerintah kolonial[10].

Meskipun pemerintah kolonial tidak merasa perlu untuk melindungi kawasan hutan tersebut, cagar alam *Wildceservaat Goenoeng Leoser* mencakup kawasan seluas 142.800 ha (Zelbestuurs Belsuit (ZB) No.317/35) ditetapkan pada tahun 1934 di bawah Gubernur Aceh A. Ph. Van Ahen, sebagai tindak lanjut dari inisiatif lokal dan kepentingan konservasionis[11].

Penetapan TNGL berawal dari titik-titik kawasan konservasi di zona-zona yang tersebar. Embrio taman nasional termasuk penetapan kelompok masyarakat hutan Langkat Sekundur pada tahun 1935 (ZB No.138), keputusan Sultan Langkat untuk menetapkan suaka margasatwa Wilhelmina Katen seluas 213.985 ha pada tahun 1938, dan penetapan suaka

[7] Data statistic Langkat (BPS), op.cit. Hal. 188
[8] Ibid., xlvii.
[9] *The Fourth Circle: A political Ecology of Sumatera's Rainforest Frontier*, John Fitzgerald McCarthy Hal., Stanford University Press. Stanford, California, 2006. Hal. 218
[10] Ibid
[11] Ibid

margasatwa Kappi seluas 142.800 ha pada tahun 1976 (SK Menteri Pertanian No.697/Kpts/Um/12/1976)[12].

Melanjutkan proses tersebut, TNGL ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980 (SK Menteri Pertanian No.811/Kpts/Um/II/1980) mencakup kawasan seluas 792.675 ha. Pada tahun 1997, TNGL ditambah luasannya menjadi 1.094.692 ha (SK Menteri Kehutanan No. 276/Kpts-VI/1997)[13]

Seiring dinamika di dalam TNGL, luas kawasan TNGL yang tadinya 1.094.692 ha dirubah menjadi 830.268,95 ha[14].

2.3. Tata Kelola

Kabupaten Langkat terdiri atas 23 kecamatan dan 240 desa. Hingga 2016, ada lebih dari 11 ribu orang bekerja sebagai pegawai negeri di Kabupaten Langkat, dengan 42% adalah sarjana S1. Selama pemilihan legislatif 2014, tercatat ada 498.361 pemilih sah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah[15].

Versi subnasional rencana pembangunan—RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Langkat District tahun 2014–2019 adalah rencana 5 tahun daerah yang berisi berbagai macam subyek pembangunan di daerah tersebut. RPJMD adalah gambaran formulasi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Langkat District tahun 2005-2025. Rencana tersebut menetapkan visi, misi dan arahan bagi pembangunan di Kabupaten Langkat untuk berbagai macam subyek termasuk[16]: (1) penegakan profesionalisme birokrat, (2) penguatan kualitas sumber daya manusia, (3) peningkatan pembangunan berbasis desa, (4) dukungan jaminan keamanan, (5) ketersediaan infrastruktur dan peningkatan integrasi tata ruang, (6) memajukan daya saing ekonomi masyarakat, (7) perbaikan lingkungan dan penerapan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks misi perbaikan lingkungan dan penerapan pembangunan berkelanjutan, rencana tersebut telah menyediakan dukungan dan prioritasi perlindungan Taman Nasional Gunung Leuser; dalam bentuk konservasi lingkungan taman nasional dan pembangunan masyarakat. Rencana tersebut juga menyediakan arahan untuk mengelola mekanisme kontrol atas pergeseran pemanfaatan hutan, memperkenalkan program-program lingkungan kepada siswa sekolah yang menghasilkan "Penghargaan Adiwiyata" (penghargaan nasional untuk sekolah-sekolah yang menerapkan inisiatif-inisiatif lingkungan, dimulai oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 2006) untuk beberapa sekolah-sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Langkat[17].

---

[12] *Berwisata Alam di Taman Nasional,* Jatna Supriana, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014. HaL.67
[13] www.gunungleuser.or.id diakses pada 2 Juli, 2018.
[14] S.K Kemenhut No. 6589/Menhut-VII/KUH/2014 tentang pembangunan TNGL di Provinsi Aceh dan SK Kemenhut No. 4039/Menhut-VII/KUH/2014 tentang pembangunan TNGL di Provinsi Sumatra Utara.
[15] Data statistik Langkat (BPS),op.cit. hal 23
[16] RPJPD Kabupaten Langkat 2005 -2025.
[17] https://sumut.antaranews.com/berita/143611/13-sekolah-langkat-raih-penghargaan-adiwiyata-nasional accessed on June 29th, 2018

Menurut rencana RPJPD Kabupaten Langkat tahun 2005–2025 dan RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2014-2019, terdapat potensi pembangunan dan peluang-peluang baru yang akan dikembangkan di masa depan. Termasuk diantaranya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata, perbaikan kebijakan, dan kegiatan-kegiatan terkait penguatan ekonomi seperti pariwisata dan pendidikan. Implementasi kegiatan-kegiatan dan pembangunan akan dialokasikan di desa-desa di luar TNGL. Hal ini juga akan ditampung dalam CMP ini untuk mensinergikan dengan rencana tersebut.

2.4. Masyarakat

Berdasarkan proyeksi populasi, pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Langkat tercatat sejumlah 1.021.208 orang. Kawasan terbesar populasinya adalah Kecamatan Stabat dengan populasi 86.868 penduduk; sementara kawasan terkecil populasinya di Kabupaten Langkat adalah Pamatang Jaya (13.702 penghuni)[18]. Pertumbuhan populasi dilaporkan sejumlah 1,66% per tahun; tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan populasi di kabupaten lain di Sumatera Utara (1,35%)[19].

Kabupaten Langkat adalah rumah bagi kelompok suku Melayu dan menggambarkan keragaman kelompok etnis ketika mereka berbagi ruang dengan kelompok suku lain termasuk Jawa, Karo, Batak, Mandailing, Minang, Aceh, keturunan Tionghoa, dan keturunan Tamil. Berdasarkan jumlah populasi, Jawa adalah kelompok etnis mayoritas di Kabupaten Langkat. Sekitar 2.033 mesjid didirikan sebagai tempat ibadah bagi pengikut Islam dan 300 gereja memberikan layanan keagamaan bagi pengikutnya. Bahasa Indonesia digunakan secara luas; sebagai tambahan, setiap kelompok suku memiliki bahasanya sendiri[20].

Pada tahun 2016, jumlah sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Langkat tercatat sejumlah 987, menyediakan layanan bagi sekitar 16% populasi yang saat ini terdaftar di sekolah dasar dan menengah. Namun demikian, sekitar 3.951 orang terdaftar sebagai pencari kerja dengan lebih dari 30% adalah lulusan sekolah dasar[21].

2.5. Pengelolaan Hayati

TNGL merupakan ekosistem utama yang ada di Pulau Sumatera, rumah bagi keanekaragaman hayati yang amat tinggi dan unik. Karenanya, taman nasional ini merupakan habitat penting bagi banyak spesies endemik dan terancam punah.

Sembilan kabupaten yang berbatasan dengan TNGL tergantung pada taman nasional untuk menyediakan jasa lingkungan yang penting, khususnya Kabupaten Langkat yang bergantungpada TNGL untuk suplai air bagi daerahnya dari DAS Besitang, DAS Lepan, DAS Batang Serangan, DAS Wampu Sei Ular dari TNGL di bagian Sumatera Utara[22].

Habitat-habitat utama di TNGL diklasifikasi sebagai hutan pegunungan, hutan alpin, hutan primer dataran rendah dipterokarpus, daerah rawa, hutan pantai dan hutan mangrove. TNGL

[18] Data statistik Langkat (BPS), op.cit. Hal. 53
[19] RPJPD Kabupaten Langkat 2005-2025
[20] Data statistik Langkat (BPS), op.cit. Hal. 81
[21] Ibid., 54
[22] Ibid., xlvii

adalah rumah bagi 130 spesies mamalia dan lebih dari 380 spesies burung (65% dari 580 spesies burung di Pulau Sumatera). Hampir 65% dari 205 spesies mamalia pernah tercatat di taman nasional[23]. Disamping empat mamalia besar Asia: Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*); mamalia kecil dan sedang juga hidup di dalam kawasan, termasuk kukang, monyet ekor panjang dan beruk, Siamang dan Sarudung/Owa Putih, Kedih, Lutung hitam, Macan dahan, Beruang madu, Rusa sambar, kelelawar (13 spesies), dan tupai (17 spesies). Piton dan King Kobra sering ditemukan di dalam kawasan. Lebih dari 30 spesies ikan dapat ditemukan di TNGL, termasuk ikan terkenal yang disebut Jurung dalam bahasa setempat[24].

TNGL juga menjadi rumah bagi lebih dari 4.000 spesies tanaman[25]. Taman nasional adalah habitat bagi bunga terbesar di dunia (*Rafflesia arnoldii*) dan bunga tertinggi (*Amorphophallus titanium*). Tujuh puluh spesies *ficus* juga ditemukan di dalam TNGL. Tanaman obat untuk pengobatan herbal juga biasa ditemukan di dalam kawasan[26]. Lebih lanjut, banyak spesies pohon-pohon bernilai ekonomi tinggi juga ditemukan di dalam kawasan seperti Dipterokarpus atau spesies-spesies lain yang dihargai untuk produk-produk hasil hutan non kayu.

Dengan demikian, karena ekosistem dan keragaman biologisnya yang kaya, taman nasional ini telah menerima pengakuan internasional termasuk Cagar Biosfer pada tahun 1981. TNGL juga dideklarasikan sebagai *ASEAN Heritage Park* (AHP) pada tahun 1984, sebagai pengakuan atas keunikan, keragaman dan nilai berharganya, agar peran pentingnya sebagai kawasan konservasi dapat dihargai secara regional dan internasional. Bersama dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TNGL tercantum dalam Daftar *UNESCO-Natural World Heritage* tahun 2004 sebagai lokasi gugus *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* (TRHS).

TRHS, termasuk TNGL sebagai lokasi gugus, termasuk ke dalam Daftar *World Heritage in Danger* tahun 2011 oleh *World Heritage Committee* (WHC) karena ancaman jangka panjang terhadap integritas kawasan ini. Status tersebut diberikan kepada lokasi gugus menyusul pengawasan beberapa kali oleh WHC dan IUCN. Guna mengatasi ancaman tersebut, Pemerintah Indonesia diminta oleh WHC untuk mengambil beberapa tindakan, termasuk: (1) Menyelesaikan *Desired State of Conservation* (DSOCR) untuk penghapusan TRHS dari daftar *In Danger*, (2) Mengonsep *Corrective Measures* (CM), dan (3) Menyelesaikan *Emergency Action Plan* (EAP). Strategi yang diminta termasuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atas efek kumulatif dari semua rencana pembangunan jalan di Pegunungan Bukit Barisan, dimana TRHS terletak[27].

Taman nasional dan kawasan sekitarnya telah dikelola sesuai prinsip rencana pengelolaan jangka Panjang TNGL (RPTNGL[28] 2010-2019) yang relevan dengan sasaran pengelolaan

[23] RPTNGL 2010 – 2019. Hal. 21
[24] Gunung Leuser National Park Tourism Map, UNESCO Office Jakarta, 2010.
[25] Guidebook to the Gunung Leuser National Park, YOSL-OIC, 2009.
[26] Tomin, GLNP Area III office staff. Personal communication, May 27th, 2018.
[27] UNESCO Office Jakarta Annual Report 2015, UNESCO Office Jakarta, 2016. Page 23.
[28] Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Leuser 200-2019 (long term management plan of GLNP)

dibawah panduan status-status tersebut. RPTNGL 2010-2019 juga dipersiapkan sebagai respon terhadap EAP sebagai kerangka penyelesaian masalah pencantuman dalam daftar *World Heritage in Danger*.

Lebih jauh, TNGL juga telah menyusun rencana untuk mendedikasikan 6.500 ha lokasi restorasi ekosistem di BPTN III bekerjasama dengan pemangku kepentingan sebagai plot percontohan permanen yang berguna bagi penelitian jangka panjang, edukasi masyarakat dan plot percontohan suksesi alami dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan. Restorasi ekosistem dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan telah dilaksanakan di TNGL sejak 2009.[2929]

TNGL juga menggarisbawahi prioritas untuk mengelola taman nasional sesuai program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait mitigasi perubahan iklim. Termasuk diantaranya program resolusi konflik atas pelanggaran batas, pemberantasan pembalakan liar, kegiatan-kegiatan pencegahan kebakaran hutan, restorasi dan rehabilitasi. Kegiatan-kegiatan pengelolaan sedapat mungkin diadaptasi guna mengurangi dampak perubahan iklim terhadap nilai-nilai kawasan.

2.6. Pariwisata

Pariwisata adalah sektor potensial bagi Kabupaten Langkat untuk menghasilkan pendapatan dan lapangan pekerjaan, mendorong investasi dan menawarkan peluang bagi pertumbuhan masyarakat. Taman Nasional Gunung Leuser adalah tujuan utama wisata berbasis alam di Kabupaten Langkat. Pertumbuhan cepat daya tarik wisata di TNGL telah menciptakan ketergantungan di pihak masyarakat setempat dan sektor swasta yang terlibat dalam pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat melaporkan 18.600 pengunjung internasional dan domestik mengunjungi kabupaten ini pada tahun 2016. Angka ini termasuk rekor kunjungan 4.885 pengunjung internasional. Angka pengunjung internasional mewakili lebih dari 68% pengunjung Eropa yang kebanyakan berasal dari Belanda, Inggris, Jerman dan Prancis. Namun demikian, jumlah total kedatangan pengunjung sedikit menurun sebanyak 36% dibanding dengan tahun sebelumnya karena catatan pengunjung yang tidak tersedia dari untuk durasi 5 bulan (beberapa catatan pengunjung yang tidak tersedia adalah dari musim puncak Juni hingga Agustus).[30]

Bukit Lawang dan Tangkahan masih terus menjadi tujuan wisata paling populer bagi pengunjung domestik ke Kabupaten Langkat. Dengan keberadaan media sosial, tujuan wisata yang baru berkembang semisal Batu Katak, Batu Rongring dan Bekancan telah mulai menyematkan posisinya di peta wisata sebagai tempat untuk dikunjungi, khususnya oleh pengunjung dalam negeri[31]. *Rafting* di Sei Binge dan Sei Wampu; serta berenang di sungai atau kolam renang alami juga merupakan daya tarik wisata paling umum bagi pengunjung domestik. Tujuan religi dan kebudayaan semisal Mesjid Azizi di Kota Tanjung Pura, Makam

[29] BBTNGL Medan. Komunikasi pribadi. 3 Mei 2018.

[30] Balai Pusat Statistik Langkat, op.cit. Hal. 281-286.

[31] Rapid assessment dan observasi sosial media , 28 April – 15 Mei 2018.

Tengku Amir Hamzah— penyair nasional terkenal— dan tur kuliner merupakan beberapa daya tarik paling populer di Kabupaten Langkat.[32]

Saat penulisan rencana pengelolaan kolaboratif ini, teridentifikasi kurangnya data yang tersedia dan jarangnya hasil survey terkait pariwisata dan industry perhotelan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat memiliki keterbatasan anggaran atau mekanisme pelaksanaan dalam melakukan pengumpulan data dan survey.

2.7. Profil Resort

Berdasarkan penilaian awal, telah ditetapkan lokasi-lokasi berdasarkan serangkaian kunjungan lapangan dan pertemuan konsultasi publik. Penilaian menghasilkan pilihan resort-resort yang akan dicakup dalam dokumen RPK, yakni Resort Bahorok, Resort Bukit Lawang, Resort Tangkahan, Resort Sekoci dan Resort Bekancan. Tujuan wisata di Resort Bahorok, Resort Bukit Lawang, Resort Tangkahan dan Resort Bekancan juga telah diakui secara resmi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat.

- **Resort Bahorok**

Resort Bahorok mengelola kawasan seluas 11.058 ha dimana 2/3 dari luasnya adalah merupakan zona inti. Resort ini dikelola oleh 3 karyawan, dan merupakan lokasi dimana wisata alam Batu Katak berada. Pelanggaran batas, perburuan burung dan margasatwa, serta penghilangan patok batas taman nasional merupakan hal-hal yang dihadapi taman nasional akhir-akhir ini.[33]

Batu Katak terletak di Desa Batu Jonjong. Populasi total desa adalah 1.624 pada tahun 2017; dimana 49% adalah perempuan. Sebagian besar warga bekerja di sektor pertanian (42%) dan sekitar 10% bekerja sebagai buruh tani.[34]

[32] P. Meirina, Ka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat. Komunikasi pribadi, 22 Mei 2018

[33] FGD kepala/perwakilan resorts, 20 April 2018 di Medan.

[34] Profil Desa Batu Jonjong/Village Profile Data, 2017.

Gambar 7. Produk kerajinan tangan pandan lokal di Batu Katak (Foto: Wiwik Mahdayani)

Batu Katak adalah tujuan wisata yang baru berkembang bagi pengunjung domestik lokal yang menikmati sungai dan kawasan sekitarnya untuk berenang atau piknik akhir pekan. Batu Katak hari ini adalah seperti Bukit Lawang 30 tahun lalu. Sejumlah kecil pengunjung internasional dari Bukit Lawang dan Tangkahan telah datang berkunjung untuk *trekking*, berharap untuk melihat Amorphopallus atau Rafflesia. Hingga kini, ada 4 akomodasi skala kecil berbasis masyarakat yang tersedia dan beberapa warung makan yang melayani pengunjung domestik setempat di sepanjang sisi sungai.[35]

Lembaga Pariwisata Batu Katak telah didirikan dengan 7-10 anggota aktif berasal dari masyarakat yang hidup di sekitar kawasan. Anggota-anggota ini telah mengidentifikasi dan menyusun paket-paket wisata *trekking* hutan, dan dalam proses mendorong partisipasi kelompok perempuan lokal dalam memperkenalkan herba dan tanaman obat untuk penggunaan lebih luas di kalangan pengunjung Batu Katak. Lembaga ini juga sedang merencanakan pembangunan Rumah Adat Karo untuk memamerkan dan sebagai pusat budaya suku Karo.[36]

[35] observasi selama asesmen, 27 – 28 April 2018

[36] Lembaga Pariwisata Batu Katak. Komunikasi pribadi, 28 Mei 2018.

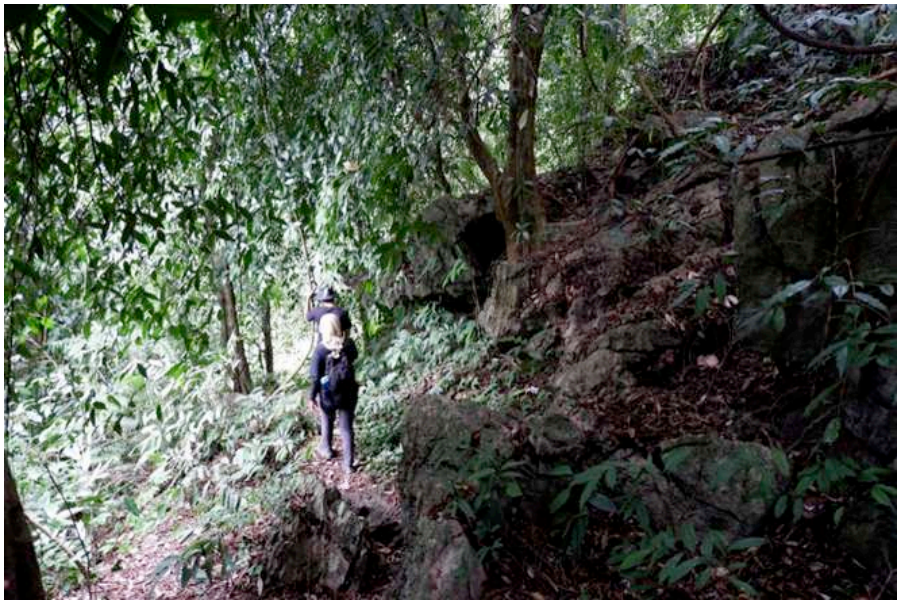

Gambar 8. Jalur *trekking* alam di Batu Katak (Foto: Wiwik Mahdayani)

Batu Katak adalah Model Desa Konservasi, sebuah program berbasis masyarakat bagi desa-desa yang berbatasan dengan taman nasional, yang difasilitasi TNGL sejak 2013[37]. Kegiatan bersama yang sudah dilaksanakan termasuk inventaris spesies kunci, yakni spesies anggrek, *Rafflesia arnoldii* dan *Amorphophallus titanium*. Meskipun inventarisasi tersebut dilaksanakan dengan metode dan peralatan sederhana (hanya GPS), hasilnya telah menunjukkan 800 lokasi dimana *Rafflesia arnoldii* dan *Amorphophallus titanium* tumbuh di sekitar kawasan hutan. Namun demikian, data yang terkumpul tidak diproses akibat kurangnya pengetahuan anggota masyarakat dan petugas resort.[39]

Intervensi kecil yang sudah ada di Batu Katak dilakukan oleh Raw Wildlife Encounters (sebuah operator wisata dari Australia) melalui Program Stay Wild Community. Kegiatan-kegiatan termasuk pemasangan *camera trap* di lokasi-lokasi strategis untuk monitoring spesies kunci, patroli hutan, penanaman pohon, dan kelas Bahasa Inggris untuk anak-anak di daerah sekitar. Operator wisata ini juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar bersama dan mencoba paket-paket wisata yang ditawarkan di Batu Katak.[39]

[37] Tomin, staf TNGL Wilayah Bidang III. Komunikasi pribadi, 28 Mei 2018.

[39] Ibid

[39] Angga, Lembaga Pariwisata Batu Katak. Komunikasi pribadi, 28 Mei 2018.

- **Resort Bukit Lawang**

Resort Bukit Lawang mengelola kawasan seluas 12.401 ha; dimana 200 ha diantaranya didedikasikan sebagai zona pemanfaatan. Resort ini dikelola oleh 4 karyawan[40], dan merupakan lokasi dimana wisata Bukit Lawang dan Batu Rongring berada. Resort menghadapai tantangan signifikan terkait penangkapan ikan ilegal, perburuan dan penghilangan tanda batas taman nasional[41]. Bukit Lawang terkenal bagi pengunjung domestik dan internasional sebagai tempat melihat orangutan. *Trekking* di hutan, *tubing*, berenang, jelajah gua dan kuliner merupakan sebagian aktivitas wisata[42]. Perkampungan Bukit Lawang, Timbang Jaya dan Sampe Raya adalah desa-desa yang terletak dalam zona penyangga Resort Bukit Lawang. Berdasarkan data profil desa yang resmi (2017), total populasi desa Perkampungan Bukit Lawang adalah 2371 pada 2017; dimana 51% dari populasi adalah perempuan. Sekitar 26% populasi bekerja sebagai pengusaha lokal. 47% populasi lulus dari sekolah dasar dan menengah; dan sekitar 9% menerima pendidikan tinggi (diploma dan sarjana).

Gambar 9. Pohon besar, salah satu daya tarik di Batu Rongring (Foto: Wiwik Mahdayani)

Batu Rongring adalah tujuan wisata yang baru berkembang lainnya di daerah tersebut. Tujuan ini menawarkan *trekking* pendek ke sebuah pohon besar, melewati hutan dan ngarai; dan menawarkan kegiatan-kegiatan lain semisal berenang di sungai[43]. Kawasan ini dulunya merupakan tempat menginap paket tur trek patroli gajah dari Tangkahan ke Bukit Lawang. Batu Rongring terletak di Desa Sungai Musam.[44]

Populasi total desa tersebut adalah 7.209 pada 2017; dimana 52% dari populasi adalah perempuan. Pekerjaan masyarakat beragam mulai dari pegawai hingga pekerja domestik. Sekitar 14% populasi bekerja sebagai petani, sisanya 9% bekerja sebagai buruh tani dan 4%

[40] FGD untuk kepala/perwakilan resort, 20 April 2018, di Medan.
[41] Ibid
[42] Observasi selama asesmen, 27 Mei 2018.
[43] observasi selama asesmen, 11 Mei 2018.
[44] Jason, Lembaga Pariwisata Batu Rongring. Komunikasi pribadi, 11 Mei 2018.

populasi bekerja sebagai pengusaha lokal. 20% dari populasi lulus dari sekolah dasar dan menengah; dan sekitar 1% menerima pendidikan tinggi (diploma, sarjana dan pascasarjana). Desa ini memiliki organisasi berbasis masyarakat yakni BumDes, Karang Taruna, LPMD dan Pencinta Alam.[45]

- **Resort Tangkahan**

Resort Tangkahan mengelola kawasan seluas 15.000 ha; yang terdiri atas zona inti dan zona pemanfaatan. Resort ini dikelola oleh 10 karyawan[46]; dan merupakan lokasi dimana obyek ekowisata Tangkahan berada. Resort menghadapi tantangan terkait perburuan ilegal, perusakan fisik tanda-tanda batas taman nasional, dan kurangnya *Standard Operation Procedure* dalam menangani gajah. Tangkahan adalah lokasi dimana 9 gajah dan *mahout*nya membantu petugas taman nasional dalam mitigasi konflik manusia dengan gajah serta melakukan patroli; dan pada saat bersamaan gajah merupakan daya tarik wisata utama dan ikon bagi Tangkahan[47]. Dikelilingi hutan sekunder dan perkebunan kelapa sawit, ia juga terletak di lokasi dimana Sungai Buluh dan Sungai Batang bertemu; sehingga Tangkahan menyediakan sejumlah besar peluang bagi pengunjung untuk melakukan aktivitas wisata dan penelitian. Tangkahan terletak di Desa Namo Sialang. Total populasi desa tersebut adalah 4.701 pada 2017; dimana 49% diantaranya adalah perempuan. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian (20%)[48].

Gambar 10. Gajah Sumatera di Tangkahan, salah satu spesies kunci di TNGL (Foto: Wiwik Mahdayani)

[45] Profil Desa Sungai Musam, 12 Mei 2018.
[46] FGD kepala/perwakilan resort, 20 April 2018 di Medan.
[47] Observasi selama asesmen, 12 Mei 2018.
[48] Kecamatan Batang Serangan dalam Angka. BPS Kabupaten Langkat, 2017. Hal 18-19.

- **Resort Bekancan**

Resort Bekancan mencakup area seluas 14.34 ha dan dikelola oleh 5 karyawan. Resort terdiri atas zona inti dan menghadapi tantangan signifikan dari pembalakan ilegal, perburuan dan peghilangan tanda batas taman nasional[49]. Kegiatan wisata di daerah ini baru saja dimulai pada tahap awal. Masyarakat lokal telah memulai tujuan wisata lokal bagi pengunjung domestik dari daerah sekitar dan menghasilkan tenaga kerja lokal[50]. Lokasi wisata di Bekancan terletak di Desa Telagah. Populasi total desa adalah 2.904 pada tahun 2017; dengan 49% dari populasi adalah perempuan. Sebagian besar masayarakat bekerja di sektor pertanian (53%)[51].

Gambar 11. Sebuah Rumah Pohon di Resort Bekancan (Foto: Joko-YOSL OIC)

- **Resort Sekoci**

Resort Sekoci mencakup kawasan seluas 25.000 ha yang termasuk zona rehabilitasi; dan dikelola oleh 3 karyawan. Resort ini menghadapi masalah sensitif terkait perambahan berat di 6.000 ha kawasannya[52]. Total populasi Desa Sekoci adalah 4.249 pada 2016; dimana 49% dari populasinya adalah perempuan[53]. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian (25%). Sekitar 255 keluarga hidup di bawah garis kemiskinan.[54]

---

[49] FGD kepala/perwakilan resort, 20 April 2018, di Medan.

[50] Observasi selama asesmen, 13 Mei 2018.

[51] Kecamatan Sei Bingai dalam Angka. BPS Kabupaten Langkat, 2017. Hal 21-22.

[52] FGD kepala/perwakilan resort, 20 April 2018, di Medan.

[53] Kecamatan Besitang dalam Angka. BPS Kabupaten Langkat, 2017. Hal. 27

[54] Ibid, Hal. 40

Gambar 12. Pertemuan pemangku kepentingan di Sekoci (Foto: Wiwik Mahdayani)

3

KONSEP RENCANA PENGELOLAAN KOLABORATIF - TEORI DAN LANDASAN KEBIJAKAN BAGI PENGELOLAAN KOLABORATIF DI KAWASAN KONSERVASI

3. KONSEP RENCANA PENGELOLAAN KOLABORATIF – TEORI DAN LANDASAN KEBIJAKAN BAGI PENGELOLAAN KOLABORATIF DI KAWASAN KONSERVASI

3.1. Konsep Pengelolaan Kolaboratif

Pendekatan pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi secara luas dipromosikan sebagai cara menjanjikan untuk berhadapan dengan masalah-masalah sumber daya alam yang kompleks dan kerap menimbulkan pertikaian. Pendekatan kolaboratif adalah sebuah kerangka kerja yang menggambarkan situasi dimana satu atau lebih aktor sosial bernegosiasi, mendefinisikan dan menyetujui diantara mereka pembagian peran dan tanggung jawab dalam mengelola sebuah kawasan sumber daya tertentu dan memastikan pembagian manfaat yang adil dari sumber daya tersebut[55]. Kolaborasi sendiri dilihat sebagai cara untuk mengurangi konflik di antara pemangku kepentingan; membangun modal sosial; memungkinkan isu-isu lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ditangani bersama-sama; dan menghasilkan keputusan yang lebih baik (Conley and Moote, 2003).

Beberapa alasan substantif terkait pentingnya pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi[56]:

1) Upaya-upaya konservasi membutuhkan kapasitas dan keterlibatan dari masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya konservasionis, pemerintah, dan kalangan profesional;
2) Upaya-upaya konservasi membutuhkan perhatian terkait kepentingan keanekaragaman hayati dan kebudayaan yang memberi ruang bagi masyarakat adat dan lokal untuk turut aktif dan terberdayakan selama kolaborasi;
3) Upaya-upaya konservasi membutuhkan perhatian terkait prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, baik perihal pembagian biaya maupun manfaat yang diperoleh dalam perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
4) Konservasi menuntut rasa hormat atas hak-hak sosio-ekonomi masyarakat. Prinsip "*do no harm*" dalam implementasi konservasi, penting dikedepankan agar tidak berdampak buruk bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan. Jika memungkinkan, temukanlah inisiatif konservasi yang memiliki dampak positif atas kesejahteraan masyarakat.

Lembaga dalam pengelolaan kolaboratif perlu dilakukan sebagai aturan main dan organisasi memainkan peran penting dalam mengelola alokasi sumberdaya secara efisien, berkelanjutan dan adil. Tiga komponen utama yang menjadi karakter kelembagaan termasuk (1) Pembatasan kewenangan, (2) hak milik (3) aturan keterwakilan. Kewenangan menentukan siapa dan apa yang mesti diikutsertakan dalam lembaga. Hak milik mengimplikasi bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban ditentukan dan diatur oleh hukum, kebiasaan dan tradisi atau

[55] Borrini-Feyerabend, G, et al. 2007. Co-Management of Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning by Doing

[56] Borrini-Feyerabend, G. 2015. Governance Diversity, Quality and Vitality: towards Shared Language and more Secure and Lasting Prospects for the Conservation of Nature. Presentation of Workshop COMACON Bangkok: October, 201

konsensus yang mengatur hubungan antar anggota dalam hal tingkat kepentingan mereka terhadap sumber daya yang dimaksud. Sementara aturan keterwakilan untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya dimaksud (Rustiadi et al., 2011)

Langkah awal untuk mencapai efisiensi dalam alokasi sumber daya optimal adalah pembagian tenaga kerja, sehingga masing-masing pekerja dapat bekerja secara profesional dengan produktivitas tinggi. Selanjutnya pembagian tenaga kerja mengarah kepada spesialisasi ekonomi, sementara keberlanjutan spesialisasi akan mengarah kepada peningkatan efisiensi dengan produktivitas yang lebih tinggi (Rustiadi et al. 2011).

Pendekatan dan prinsip-prinsip kelembagaan dalam menetapkan pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan (kawasan konservasi) terdiri atas: (1) kombinasi pendekatan teknis dan sosial adalah kunci bagi keberhasilan pengelolaan regional, (2) kepercayaan dan rasa hormat di antara para pihak,

(3) saling pengertian dan berbagi kesepakatan terkait sasaran yang akan dicapai, (4) pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, (5) pemenuhan kepentingan setiap pihak, dan (6) frekuensi komunikasi (Suharjito, 2011).

Rencana Pengelolaan TNGL 2010-2019 menetapkan fokus pada pengelolaan terintegrasi dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Guna mencapai fokus ini, sebuah pengelolaan kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, penting untuk dilaksanakan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif

Dalam kerangka kerja legal, transformasi dari pengelolaan berbasis pemerintahan kepada pengelolaan kolaboratif di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) termasuk taman nasional di Indonesia telah dimulai sejak penetapan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.19/Menhut-II/2004 tentang kolaborasi pengelolaan kawasan sumber daya alam dan kawasan pelestarian alam. Prosedur guna mengelola kolaborasi tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/Menhut-II/2014, dan direvisi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang tata cara kerja sama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Panduan teknis bagi program kemitraan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018. Sementara itu, hutan desa sebagai salah satu model pengelolaan kolaboratif dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018. Peraturan ini memandang pengelolaan kolaboratif sebagai aktivitas bersama pemangku kepentingan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama guna efektivitas pengelolaan regional dan pertimbangan spesifik untuk memperkuat ketahanan nasional.

Peraturan Menteri Kehutanan di atas mengandung kerangka kerjasama guna memperkuat fungsi kawasan dan pelestarian keanekaragaman hayati, yang terdiri atas:

a. penguatan kerjasama institusional, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan teknis, penelitian dan pengembangan. Ini termasuk penyediaan pelatihan dan pendidikan di bidang konservasi, penguatan institusi bagi masyarakat, penempatan pekerja asing professional atau teknologi baru terkait konservasi;
b. Kerjasama perlindungan regional, termasuk kerjasama perlindungan dan pengamanan; diantararanya dapat berupa inventarisasi bersama dan penyusunan peta kerentanan kawasan hutan, tindakan-tindakan pencegahan bagi kawasan dimaksud, identifikasi penanda batas, penguatan petugas keamanan termasuk pembentukan pam swakarsa (pasukan sukarela yang tidak berada dalam struktur pertahanan dan keamanan negara), patroli dan pencegahan kebakaran;
c. Kerjasama dalam pelestarian flora dan fauna, semisal kegiatan kerjasama dalam identifikasi, inventarisasi, pengembangan habitat dan populasi, penyelamatan spesies, penilaian, penelitian dan pengembangan;
d. Kerjasama pemulihan ekosistem, misalnya restorasi dan rehabilitasi regional;
e. Kerjasama pengembangan wisata alam; termasuk kerjasama promosi, pembangunan fasilitas dan infrastruktur wisata alam, pengadaan pusat informasi dan pengembangan masyarakat. Kegiatan ini harus dilaksanakan diluar kawasan pemanfaatan wisata alam yang diizinkan;
f. Kerjasama pemberdayaan masyarakat, yang termasuk pembentukan Desa Konservasi, pemberian akses, fasilitasi kemitraan, pemberian izin pemanfaatan jasa wisata alam; dan pembangunan akomodasi;
g. Kerjasama pipa instalasi air; instalasi pipa air yang sumber airnya berada diluar KSA dan KPA. Ini harus dilaksanakan di bawah kegiatan komersial meskipun jalur air mengalir melalui KSA dan KPA; dan
h. Kemitraan konservasi; dapat berupa kerjasama rehabilitasi ekosistem antara unit pengelola dan masyarakat, guna mengembalikan fungsi KSA dan KPA. Saat ini Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem/KSDAE sedang mempersiapkan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Prosedur Kemitraan Konservasi di dalam KSA dan KPA.

Mitra kerjasama dalam pengelolaan KSA dan KPA adalah pihak-pihak yang memiliki dana dan/atau keahlian teknis, bekerjasama di bawah *Memorandum of Understanding* dan kesepakatan kerjasama dengan pengelola teknis KSA dan KPA dalam mencapai tujuan-tujuan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Mitra-mitra dapat berupa badan usaha, organisasi-organisasi internasional, badan pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota; kelompok masyarakat; organisasi non-pemerintahan; individual; lembaga atau yayasan pendidikan.

3.3. Kerjasama Pengembangan Wisata Alam

Pengembangan wisata alam di taman nasional diselenggarakan sejalan dengan peraturan dan prosedur penyelenggaraannya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2010 menjelaskan penyelenggaraan wisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Peraturan Pemerintah PP No.36/2010 menyediakan aturan tambahan

terkait penyelenggaraan wisata alam di suaka margasatwa yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya (PP No.18/1994).

Dalam hal ini pemerintah telah memfasilitasi pemanfaatan KSA dan KPA dengan izin khusus (berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan kementerian kehutanan) seperti IUPJWA (Izin Usaha Pengusahaan Jasa Wisata Alam) dan/atau IUPSWA (Izin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam). Lebih lanjut, terkait pemyelenggaraan di lapangan, Peraturan Pemerintah telah diturunkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan P.4/Menhut-II/2012. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan P.48/2010 tentang pemanfaatan Wisata Alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Ayat 9: paragraph (1) menyebutkan pemanfaatan wisata alam hendaknya diberikan dalam bentuk IUPJWA dan/atau IUPSWA. Lebih lanjut, IUPJWA dan IUPSWA di taman nasional dapat diusulkan oleh masyarakat; individu, koperasi atau entitas swasta yang sah.

3.4. Kerjasama untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masayarakat di sekitar KSA dan KPA, menurut peraturan[57] bertujuan untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang hidup bersebelahan dengan kawasan dalam menyokong keberlanjutan KSA dan KPA. Kepala KSA dan KPA harus menentukan lokasi dan kelompok-kelompok masyarakat/desa sebagai sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan KSA/KPA serta rencana pembangunan daerah. Kemudian pimpinan hendaknya mempersiapkan dokumen Rencana Tahunan Pemberdayaan Masyarakat 5 Tahun dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Pemberdayaan masyarakat didahului dengan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguatan kelembagaan dan perubahan perilaku. Kegiatan peningkatan kapasitas dapat diselenggarakan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan; dan/atau penyuluhan di bidang konservasi dan ekonomi produktif yang mendukung konservasi, dan tata kelola pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan, seperti:

a) Penetapan dan pembentukan kelompok;
b) Persiapan peraturan pengembangan (dikenal sebagai AD/ART)[58]
c) Kelompok/desa;
d) Persiapan rencana kerja kelompok/desa;
e) Persiapan teks kemitraan (*Memorandum of Understanding*);
f) Proses perizinan;
g) Pembangunan akses kepada informasi pasar; dan/atau

[57] Peraturan Pemerintah PP No.28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Pemerintah No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
[58] Bentuk peraturan organisasi di Indonesia. AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

h) Pengembangan modal usaha, jenis usaha dan pasar.

Pelatihan pemberdayaan masyarakat termasuk pembentukan kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat, penguatan institusi masyarakat, pengelolaan dan kegiatan teknis pemberdayaan masyarakat, pelaporan kegiatan, pengelolaan keuangan dan/atau pemasaran.

Bentuk pemberdayaan masyarakat disekitar KSA dan KPA termasuk:

a) Pengembangan Desa Konservasi. Desa Konservasi yang telah dipilih untuk dikembangkan akan menjadi lokasi prioritas kegiatan/program pengembangan kehutanan; dan menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan kegiatan konservasi;
b) Pemberian akses, diberikan kepada kelompok masyarakat/desa dalam zona/blok tradisional KPA. Pemberian akses melalui bentuk kerjasama, yang termasuk a) Pengumpulan Hasil Hutan Non Kayu; b) perladangan tradisional; c) Perburuan tradisional terbatas spesies yang tidak dilindungi; d) pemanfaatan terbatas sumber daya air untuk spesies yang tidak dilindungi; atau e) kegiatan wisata alam terbatas;
c) Fasilitasi kemitraan, dilaksanakan oleh Kepala UPT bagi kelompok masyarakat dengan pihak ketiga. Ini dapat dalam bentuk menyediakan akses untuk modal, pemasaran, infrastruktur, kelembagaan atau teknologi;
d) Memberikan izin jasa wisata alam; dan
e) Pembangunan akomodasi, dilaksanakan oleh masyarakat di zona khusus dan/atau zona pemanfaatan taman nasional.

Tabel 1. Peraturan terkait Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan dampingan	Peraturan	Catatan
Kerjasama KSA dan KPA untuk: 1. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta pelestarian keanekaragaman hayati 2. Pembangunan strategis.	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kemitraan di KSA dan KPA (Revisi oleh Peraturan Menteri Kehutanan No.P.44/2017)	Kerjasama dalam rangka memperkuat fungsi dari KSA/KPA dan konservasi keanekaragaman hayati: 1. Kerjasama penguatan kelembagaan; 2. Kerjasama perlindungan region; 3. Kerjasama pelestarian flora dan fauna 4. Kerjasama rehabilitasi ekosistem; 5. Kerjasama pengembangan wisata alam; 6. Kerjasama pemberdayaan masyarakat. P.85/2014 telah membatalkan Peraturan Menteri Kehutanan No.19/2004 tentang Pengelolaan Kolaboratif KSA dan KPA. Peran pengelola KSA/KPA diperkuat sebagai pihak utama dalam kerjasama pengelolaan. Disebutkan dalam P.19/2004 bahwa pihak lain dapat mengambil peran sebagai inisiator kerjasama KSA/KPA

Pengelolaan dampingan	Peraturan	Catatan
IUPJWA (Izin Usaha Pengusahaan Jasa Wisata Alam) dan/atau IUPSWA (Izin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam)	UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	"Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat"
	PP No. 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	PP No.36/2010 mencabut PP No.18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Pearturan tersebut tidak menyebut pengusahaan wisata alam di suaka margasatwa
	Peraturan Menteri Kehutanan P.48/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Revisi oleh P.4/2012)	Pasal 9: (1) Pengusahaan pariwisata alam diberikan dalam bentuk IUPJWA dan/atau IUPSWA. Pada wilayah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, izin sebagaimana dimaksud pada alinea (1) diprioritaskan diberikan kepada masyarakat setempat
Pemberdayaan masyarakat termasuk: 1. Peningkatan kapasitas masyarakat; 2. Penyediaan akses kepada pemanfaatan KSA atau KPA	Pasal 49 PP. 28/2011 jo PP No.108/2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA	PP no. 108/2015 pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: a. pengembangan desa konservasi; b. pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional; c. fasilitasi kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat; dan/atau d. pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam
Peningkatan kapasitas dalam inventarisasi Potensi Suaka Margasatwa dan Wilayah Konservasi	Permenhut No. 81/2014 tentang Tata Cara Inventarisasi Potensi Suaka Margasatwa dan Wilayah Konservasi	Permenhut No.81/2014 akan dilaksanakan untuk mengembangkan sistem dan mekanisame inventarisasi keanekaragaman hayati.

Pendekatan kolaboratif pengelolaan kawasan konservasi harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak sebagai pilihan guna menyukseskan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Pemerintah Indonesia saat ini menggunakan METT (*Management Effectiveness Tracking Tools*), sebuah perangkat untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi[59]. Perangkat METT mengandung pertanyaan-pertanyaan dan skor-skor yang menilai pengelolaan menyeluruh kawasan konservasi.

Guna meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengadopsi perangkat METT untuk diterapkan di Indonesia. KLHK

[59] Stolton, S. and N. D13 udley. 2016. METT Handbook: A guide to using the Management Effectiveness Tracking Tool (METT), WWF-UK,Woking

juga berkomitmen untuk mencapai skor METT setidaknya 70%. Dalam METT, empat aspek yang dinilai adalah variable yang menunjukkan pentingnya keterlibatan beragam pihak guna memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi[60].

Tabel 2. Poin METT terkait Pelibatan Berbagai Pihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nomor poin METT	Skor	Catatan
Pemerintah dan sektor swasta.	3	Skor akan lebih tinggi jika pengelola membangun kerjasama dengan pengguna lahan dan air di kawasan sekitar
Masyarakat adat	3	Skor akan lebih tinggi jika masyarakat adat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, misal pengelolaan dampingan
Masyarakat setempat	3	Skor akan lebih tinggi jika masyarakat lokal dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, misalnya pengelolaan dampingan. Ada poin tambahan jika masyarakat secara aktif mendukung kawasan konservasi (dengan penetapan peraturan desa dan upaya-upaya lain oleh masyarakat)
Manfaat ekonomi	3	Skor akan lebih tinggi jika kawasan konservasi menyediakan manfaat ekonomi besar bagi masyarakat disekitar kawasan konservasi

Dalam kerangka kerja peningkatan ekonomi, masyarakat seharusnya diberdayakan dan menjadi mitra setara dalam upaya-upaya konservasi. Masyarakat adalah pemangku kepentingan terdekat yang memiliki pemahaman akan situasi di daerah mereka dan memiliki pengetahuan tentang kearifan tradisional dalam konservasi. Sebagai tambahan, landasan untuk menyelesaikan konflik tenurial yang ada saat ini adalah dengan menetapkan prioritas dalam mengakomodir dan mengakui hak-hak masyarakat dalam kawasan konservasi, dan juga menempatkan masyarakat dalam posisi sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Dengan demikian, pendekatan kolaboratif terhadap pengelolaan kawasan konservasi dapat pula didorong dengan melibatkan institusi penelitian/universitas, organisasi non-pemerintah, perusahaan swasta dan donor guna mengatasi tantangan yang ada. Peningkatan kapasitas pengelola kawasan dan mendorong pencarian dana konservasi yag lebih luas akan menjadi aktivitas yang mungkin dilakukan bersama-sama dengan institusi-institusi ini.

[60] Dirjen KSDAE, KLHK. 2015. Pedoman Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Jakarta

4

TANTANGAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER WILAYAH BIDANG III

4. TANTANGAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER BPTN III

4.1. Tantangan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser BPTN III

Otoritas TNGL telah meninjau dan menganalisa kesenjangan-kesenjangan dalam penyelenggaraan sasaran pengelolaan, yang terdiri atas (1) keterbatasan sumber daya manusia di kantor TNGL dalam mencapai sasaran pengelolaan; (2) pemanfaatan potensi hutan TNGL untuk masyarakat di sekitar kawasan masih belum memadai; (3) pentingnya penyelesaian konflik tenurial lahan di kawasan TNGL dan membutuhkan komitmen serta keterlibatan beragam pemangku kepentingan (4) pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan TNGL masih terbatas.

Berdasarkan hasil FGD untuk kepala resort / kepala perwakilan, yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Medan; hasil FGD pemangku kepentingan dan observasi selama asesmen ke lapangan yang telah dilakukan dari tanggal 27 April 2018 hingga 15 Mei 2018; pertemuan konsultasi dengan BBTNGL di Medan pada 3 Mei, 10 dan 24 Juli 2018 dan analisis dokumen Rencana Manajemen Jangka Panjang TNGL 2010-2019[61]; beberapa masalah telah diidentifikasi sebagai berikut:

4.1.1. Kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan

- Kantor TNGL didukung oleh 17 pegawai di tingkat pengelolaan. Selain pegawai fungsional, pengelola juga dibantu oleh Kantor BPTN Wilayah I Tapaktuan, BPTN Wilayah II Kutacane dan BPTN Wilayah III Stabat dimana pengelolaan resort dilaksanakan.
- Lebih dari 71 % pegawai TNGL adalah lulusan sekolah menengah atas, lebih dari 12% telah menerima pendidikan sarjana dan lebih dari 5% hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Ada lebih dari 24% pegawai dalam kelompok usia 41 – 45 tahun; lebih dari 27% dalam kelompok usia 46-50 tahun dan lebih dari 14% berada dalam kelompok usia 51-55 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar adalah pegawai senior dan telah bekerja di taman nasional untuk jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, mereka memiliki pengetahuan mengenai kawasan dan memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasional secara efektif.
- Pengelola taman nasional berniat untuk mencapai sasaran pengelolaan secara efektif dan bersemangat untuk mendorong partisipasi masyarakat setempat guna mengurangi ketegangan di dalam kawasan TNGL.
- Namun demikian, sebagian besar karyawan di tingkat resort—unit pengelolaan terkecil, menunjukkan kurangnya kapasitas dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengalaman petugas resort serta kurangnya pelatihan yang pernah diterima.
- Pegawai di tiap level dan seksi pengelolaan atau resort, kerap dirubah dan dipindah ke bagian atau fungsi lain; yang menyebabkan kebijakan atau program yang berjalan saat ini mungkin berubah pula atau bahkan terhenti.

[61] RPTNGL 2010 - 2019

- Jumlah karyawan yang terbatas untuk mengelola dan melaksanakan operasi di lapangan sesuai ruang lingkup pekerjaan dan luas kawasan.

4.1.2. Sumber daya keanekaragaman hayati

- TNGL memayungi ekosistem utama dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat berharga. Karenanya, taman nasional ini merupakan habitat yang penting bagi banyak spesies endemik dan terancam punah yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai ekonomi.
- Taman nasional ini menjadi tempat tumbuh bagi beragam spesies pohon bernilai ekonomi seperti Dipterokarpus atau spesies lain yang bernilai sebagai produk hasil hutan non kayu yang berkontribusi sebagai mata pencaharian utama atau alternatif bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan.
- Habitat utama di TNGL diklasifikasi sebagai hutan pegunungan, hutan alpin, hutan primer dataran rendah dipterokarpus, kawasan rawa, hutan pantai dan hutan mangrove. Kawasan ini menawarkan berbagai macam subjek penelitian untuk kepentingan ilmiah atau praktis.
- TNGL diakui sebagai hulu dari sungai-sungai utama di region ini yang berkontribusi signifikan pada pertanian, industri wisata dan energi.
- Tanaman obat untuk pengobatan herbal umum ditemukan di kawasan sekitar taman nasional. Karenanya menawarkan peluang untuk mendorong pengobatan tradisional atau atraksi wisata.
- Taman nasional ini telah menerima pengakuan internasional diantaranya Cagar Biosfer pada tahun 1981, ASEAN Heritage Park (AHP) tahun 1984 dan UNESCO-Natural World Heritage List tahun 2004 sebagai lokasi gugus Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS). Status-status ini meningkatkan pengakuan atas taman nasional dan kemungkinan untuk menerima dukungan dan bantuan internasional dalam mengelola sumber dayanya.
- TRHS, yang termasuk TNGL sebagai lokasi gugus, dimasukkan ke dalam *List of World Heritage in Danger* tahun 2011 oleh World Heritage Committee (WHC) karena ancaman berkelanjutan atas integritas kawasan ini. Dibutuhkan proses panjang pendokumentasian, workshop dan upaya-upaya guna meminta UNESCO World Heritage Committee untuk mengeluarkan gugus ini dari daftar situs dalam bahaya.
- TNGL juga telah menyusun rencana untuk mendedikasikan 6.500 ha lokasi restorasi ekosistem di BPTN III bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk plot percontohan permanen. Ini mengindikasikan upaya kuat dari pengelola taman untuk menyelesaikan ketegangan akibat pelanggaran tata batas di dalam kawasan.
- TNGL telah menyusun garis besar prioritas pengelolaan taman nasional sesuai dengan program mitigasi perubahan iklim, termasuk resolusi konflik atas perambahan, pemberantasan penebangan liar, kegiatan pencegahan kebakaran hutan, restorasi dan rehabilitasi.

4.1.3. Masyarakat di sekitar kawasan

- Ada lebih dari sejuta penduduk yang tinggal di Kabupaten Langkat dan berpotensi mendukung pelestarian TNGL BPTN III.

- Inisiatif kelompok masyarakat lokal yang telah ada sebagai respon atas kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah mereka, misalnya pengembangan peluang-peluang ekowisata dan pertanian.
- Dikarenakan oleh keterbatasan pendidikan dan rujukan, ada kebutuhan untuk penguatan kelembagaan kelompok masyarakat; terdiri atas kapasitas kelembagaan, visi dan keterampilan pengelolaan.
- Kurangnya informasi terkait peraturan yang sudah ada tentang lingkungan dan ketidaktahuan akan tujuan-tujuan kawasan lindung di masyarakat.
- Dikarenakan oleh keterbatasan pendidikan dan rujukan, sebagian besar produk ekonomi baik dari sektor pertanian atau ekowisata membutuhkan inovasi dan pengembangan produk lebih lanjut.
- Sebagian besar usaha dan/atau organisasi lokal berbasis masyarakat tidak memiliki akses pada pasar dan memiliki teknik pemasaran yang terbatas

4.1.4. Pengelolaan ekowisata

- TNGL adalah atraksi wisata berbasis alam paling utama di Kabupaten Langkat. Karenanya, TNGL telah menciptakan ketergantungan ekonomi bagi masyarakat lokal dan sektor swasta yang terlibat dalam pariwisata.
- Ada beragam aktivitas wisata yang disediakan bagi pengunjung internasional maupun domestik di TNGL, mulai dari arung jeram, pengamatan margasatwa, berkemah, tubing, tur edukasi, perjalanan kuliner, tur desa, jelajah gua, berenang di sungai, piknik, mendaki gunung dan trekking di hutan.
- Ekowisata akan mendorong investasi yang pada akhirnya akan menciptakan pekerjaan dan peluang ekonmi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar TNGL.
- Kelompok masyarakat lokal yang berdedikasi pada pengembangan ekowisata telah terbentuk di tujuan wisata-tujuan wisata utama di TNGL BPTN III.
- Telah ada asosiasi pemandu dan operator wisata lokal resmi yang beroperasi di tujuan wisata-tujuan wisata utama di BPTN III.
- Kelompok ekowisata yang sudah ada dari masyarakat lokal telah memulai beberapa program kecil dan terbatas untuk penguatan kelembagaan dan paket-paket wisata untuk dijual.
- Kurangnya akses ke pasar dan keterbatasan teknik pemasaran berkontribusi pada inkosistensi pengembangan produk dan keterbatasan inovasi produk.
- Kurangnya pengetahuan akan peraturan taman nasional dan tujuan konservasi pada pengunjung biasa yang menyebabkan pembuangan sampah sembarangan, pemberian makan satwa atau kerusakan pada fasilitas.

4.1.5. Aksesibilitas

- Sebagian besar daya Tarik wisata terletak dalam jarak yang memadai satu sama lain, dan lebih mudah untuk saling menghubungkannya.
- Daya Tarik utama seperti Batu Katak, Bukit Lawang, Batu Rongring, Tangkahan berada dalam jarak memadai dengan “sumber penghasil pasar” di Medan atau kota-kota lain di Kabupaten Langkat.
- Kondisi jalan menimbulkan ketidaknyamanan akses menuju daya tarik wisata, misalnya jalan yang rusak, jembatan penghubung antar lokasi yang putus, tikungan berbahaya atau jalan kecil alami di dalam perkebunan.

- Ketidaknyamanan akses karena sedikitnya transportasi publik yang menghubungkan pusat kota dengan tujuan wisata.

4.1.6. Fasilitas dan infrastruktur terkait pariwisata

- Fasilitas dan layanan pariwisata dan perhotelan tersedia di tujuan wisata unggulan, misalnya akomodasi, restoran, layanan transport, layanan penukaran uang, operator tur, bumi perkemahan, pusat layanan pengunjung, toko-toko suvenir, fasilitas kesehatan, toilet dan layanan listrik dasar.
- Fasilitas pariwisata dan perhotelan terkonsentrasi di Bukit Lawang, tujuan wisata lainnya memiliki layanan public dan perhotelan yang terbatas.
- Kunjungan biasanya terkonsentrasi saat akhir pekan atau selama musim liburan, karenanya akan ada kemungkinan fasilitas yang rusak oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab.

4.1.7 Dukungan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah entitas dengan kepentingan yang dinyatakan atau yang terbayangkan atau minat pada urusan tertentu. Pemangku kepentingan juga merupakan aktor dengan minat pribadi atas sebuah isu yang diangkat. Kisaran pemangku kepentingan yang relevan dipertimbangkan terkait pelestarian TNGL bervariasi sesuai kompleksitas isu yang ditangani oleh individua atau organisasi. Actor-aktor utama yang secara gigih telah mentransformasi dan mempromosikan perubahan dalam konteks pengelolaan konservasi yang lebih baiktelah terpetakan dengan baik oleh pihak berwenang di TNGL. Sebagian aktor memainkan peran yang berbeda namun secara keseluruhan mendukung pencapaian tujuan utama pengelolaan TNGL.

Ada beberapa kategori pemangku kepentingan utama di TNGL di bidang pengelolaan III termasuk pemerintah kabupaten setempat, kelompok masyarakat setempat, sektor swasta dan NGO. Pemangku kepentingan-pemangku kepentingan ini merupakan asset penting untuk mendukung pengelolaan TNGL terutama dalam mengisi kesenjangan yang saat ini dihadapi TNGL.

TNGL telah sangat proaktif dalam mengembangkan kemitraan dengan beragam kelompok pemangku kepentingan. Saat ini TNGL bahkan telah menandatangani MoU dengan pemerintah Kabupaten Langkat (MoU terlampir) guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi TNGL. Terkait isu pengembangan ekowisata, TNGL memiliki MoU dengan Lembaga Pariwisata Tangkahan dalam upaya mempromosikan potensi ekowisata yang lebih baik di dalam TNGL. Lebih jauh, dalam upaya untuk menghadapi masalah konflik lahan di TNGL, TNGL saat ini melaksanakan penilaian untuk membangun kemitraan dengan kelompok masyarakat yang mengolah lahan dalam TNGL untuk pertanian. Skema yang ditawarkan, disebut sebagai kemitraan konservasi, adalah kerangka kemitraan antara otoritas TNGL dan kelompok masyarakat lokal untuk memperbaiki lahan TNGL yang terdegradasi sebagai akibat konversi lahan secara ilegal. Kemitraan konservasi memungkinkan masyarakat lokal yang telah merambah lahan TNGL untuk turut terlibat dalam kegiatan perlindungan dan restorasi sembari mengolah lahan TNGL untuk penghidupannya dengan cara yang lebih berkelanjutan.

Berikut adalah table pemangku kepentingan yang potensial untuk berkontribusi bagi konservasi TNGL:

Tabel 3. Profil singkat pemangku kepentingan potensial (disusun oleh YOSL-OIC)

No	Pofil singkat NGO potensial	Sub-program
1	Yayasan Orangutan Sumatera Lestari - Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) adalah NGO dengan basis di Medan, bertujuan untuk melestarikan dan melindungi orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) dan habitat hutannya. YOSL-OIC bekerjasama dengan masyarakat lokal yang tinggal berdampingan dengan habitat orangutan, di dalam dan sekitar Ekosistem Leuser, benteng pertahanan terakhir orangutan Sumatera dan merupakan salah satu hutan tropis penting yang tersisa di Asia. YOSL-OIC telah memperluas kegiatannya dan mengembangkan beragam proyek yang didedikasikan bagi perlindungan hutan dan konservasi margasatwa, membantu masyarakat dalam memperoleh sumber mata pencaharian alternatif dengan memperkenalkan metode pertanian organik berkelanjutan	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan (2) Penjangkauan Masyarakat danPenyadartahuan Konservasi (3) Inventarisasi, identifikasi dan monitoring Keanekaragaman Hayati (4)Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem (5) Penegakan Hukum (6) Pendampingan Masyarakat (7) Ekowisata
2	Didirikan awal 2000, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) adalah organisasi non-profit terkait konservasi, pendidikan lingkungan. dan pendampingan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. Sebagai respon atas munculnya beragam isu lingkungan hidup di seluruh Sumatera, YEL berusaha melindungi apa yang tersisa dari Ekosistem Leuser yang unik, sebagai UNESCO World Heritage dan rumah bagi beberapa hewan dan tumbuhan paling melimpah dan beragam yang pernah diketahui oleh ilmu pengetahuan. YEL secara khusus adalah pendiri Sumatran Orangutan Conservation Programme, yang bertujuan meningkatkan daya hidup spesies terancam punah, orangutan Sumatera	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan, (2) Penjangkauan masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi (3) Inventarisasi, identifikasi dan monitoring Keanekaragaman Hayati (5) Penegakan Hukum (6) Pendampingan Masyarakat (7) Ekowisata
3	WCS-Indonesia Program telah bekerja di Indonesia sejak survei awal pada tahun 1960, dan membuka program nasional resmi pada tahun 1995 dibawah MoU dengan Kementerian Kehutanan kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Dalam tahun-tahun terakhir, WCS telah menjadi salah satu aktor utama dalam konservasi harimau dan pertarungan melawan Kejahatan margasatwa. Pendekatan yang dibangun oleh WCS yang berhasil diantaranya metode survey dan monitoring resolusi konflik dan kegiatan anti perburuan.	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan, (2) Penjangkauan masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi (3) Inventarisasi, identifikasi dan monitoring Keanekaragaman Hayati (5) Penegakan Hukum (6) Pendampingan Masyarakat
4	Yayasan Scorpion adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada 12 Mei 2015, yang telah menjadi NGO Indonesia yang terdepan dalam menangani perdagangan tak terkendali margasatwa liar yang saat ini merajalela di negara kita. Scorpion melakukan investigasi terhadap perdagangan satwa liar setiap minggu, kadangkala setiap hari, mencakup seluruh Sumatera, Jawa, dan Bali.	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan, (2) Penjangkauan masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi (5) Penegakan Hukum (6) Pendampingan Masyarakat

No	Pofil singkat NGO potensial	Sub-program
5	Perkumpulan Dokter Hewan untuk Konservasi Satwa Liar Sumatera adalah sebuah organisasi non-profit terdaftar yang didirikan pada tahun 2003 oleh sekelompok dokter hewan di Sumatera yang berminat pada konservasi dan pengobatan satwa liar. Tujuan dari VESSWIC adalah untuk berkontribusi pada konservasi satwa liar Sumatera dengan memberikan beragam layanan dan keahlian dokter hewan. Ini diperoleh melalui penyediaan kegiatan dan program yang dikelola langsung oleh VESSWIC, dan dengan mendukung program dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dan institusi lain di Sumatera.	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan, (2) Penjangkauan masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi (3) Inventarisasi, identifikasi dan monitoring Keanekaragaman Hayati (5) Penegakan Hukum
6	YPOI (Yayasan Peduli Orangutan Indonesia) adalah sebuah yayasan aktif yang berkantor di Medan, Sumatera Utara YPOI memperoleh status yayasan pada tahun 2016, setelah awalnya berdiri sebagai Club Peduli Orangutan of Indonesia (CPOI) selama 11 tahun. YPOI (dan sebelumnya CPOI Sumut) telah menjalankan beragam program penjangkauan dan Pendidikan sejaj 2006. Dalam tahun-tahun terakhir YPOI dan CPOI-Sumut telah melakukan program pendidikan inovatif di sekolah-sekolah lokal di Medan, melaksanankan Orangutan Youth Camps, mengkoordinir kegiatan Pekan Peduli Orangutan, dan telah menyusun serta menjalankan program pendidikan luar sekolah di kantor mereka bagi ratusan anak setempat.	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan (2) Penjangkauan Masyarakat danPenyadartahuan Konservasi (4)Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem (6) Pendampingan Masyarakat
7	YHUA (Yayasan Hutan untuk Anak) adalah sebuah organisasi lokal berbasis di Medan dengan fokus pada konservasi Ekosistem Leuser untuk generasi yang akan datang.	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan (2) Penjangkauan Masyarakat danPenyadartahuan Konservasi (3) Inventarisasi, identifikasi dan monitoring Keanekaragaman Hayati (5) Penegakan Hukum
8	Dinas Pendidikan Langkat adalah badan tingkat kabupaten yang mengorganisir pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan urusan pendidikan masyarakat serta pengelolaan budaya dalam wilayah Langkat	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan (2) Penjangkauan Masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi (6) Pendampingan Masyarakat
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Langkat adalah badan tingkat kabupaten yang mengorganisir urusan-urusan kebudayaan dan pariwisata dalam wilayah Langkat	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan (2) Penjangkauan Masyarakat danPenyadartahuan Konservasi (6) Pendampingan Masyarakat (7) Ekowisata

No	Pofil singkat NGO potensial	Sub-program
10	HPI – Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah asosiasi non profit, non politik yang merupakan kumpulan pemandu wisata perorangan dan terlisensi dan anggota kehormatan yang memiliki ketertarikan khusus dengan profesionalisme pemandu wisata di dalam Republik Indonesia. Tujuan utama HPI adalah untuk mengumpulkan, mempromosikan dan memastikan pemandu wisata diakui sebagai duta negara. Selain itu tujuan HPI adalah untuk terlibat aktif dalam pengembangan wisata dan penelitian, dan sebagai sarana untuk menyuarakan upah dan kesejahteraan pemandu-pemandu yang merupakan anggotanya. HPI menawarkan jasa kepada anggotanya, namun juga berkomunikasi dengan mereka yang membutuhkan jasa profesional pemandu wisata di daerah tertentu dan bagaimana cara menghubungi mereka, serta secara aktif mempromosikan profesionalisme anggotanya di seluruh dunia	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan (6) Pendampingan Masyarakat (7) Ekowisata
11	Fakultas Kehutanan – Universitas Sumatra Utara adalah salah satu fakultas terkemuka yang bertujuan menjadi institusi pendidikan tinggi unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di sektor kehutanan yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan hutan berkelanjutan. Mereka secara ekstensif bekerja sama dengan NGO dalam konservasi dan perlindungan satwa liar, di bidang penelitian dan analisa kebijakan.	(3) Inventarisasi, identifikasi dan monitoring Keanekaragaman Hayati (4)Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem
12	Jurusan Biologi – Universitas Negeri Medan adalah salah satu jurusan terkemuka yang fokus pada penelitian dan inventarisasi keanekaragaman hayati yang mendukung restorasi dan pengelolaan serta pelaksanaan riset. Mereka telah bekerja secara ekstensif dengan NGO dalam penelitian keanekaragaman hayati, restorasi dan edukasi.	(3) Inventarisasi, identifikasi dan monitoring Keanekaragaman Hayati (4)Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem
13	Balai Gakkum Sumatera adalah unit pelaksana teknis wilayah di bidang pengamanan dan penegakan hukum kehutanan dan lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK	(1) Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan (5) Penegakan Hukum
14	Poldasu adalah Kepolisian Daerah tingkat Provinsi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, menyediakan perlindungan, pelayanan dan perawatan kepada masyarakat	(5) Penegakan Hukum
15	Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah Kuala Banda Aceh Didirikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 79966/UU tanggal 17 Oktober 1960 dengan nama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP). Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah merupakan FKH ketiga dari tujuh FKH di Indonesia.	(2) Penjangkauan Masyarakat danPenyadartahuan Konservasi (3) Inventarisasi, identifikasi dan monitoring Keanekaragaman Hayati
16	Medan Bisnis adalah koran harian lokal fokus pada kegiatan bisnis dan industri di kawasan Sumatera Utara dan seluruh Indonesia	(2) Penjangkauan Masyarakat danPenyadartahuan Konservasi

No	Pofil singkat NGO potensial	Sub-program
17	Antara adalah koran nasional dan memiliki cabang di setiap provinsi. Antara meliput beragam tema, termasuk lingkungan dan konservasi.	(2) Penjangkauan Masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi
18	Mongabay.co.id adalah proyek dari Mongabay.com, sebuah website ilmu lingkungan dan berita konservasi yang populer Dimulai tahun 1999 by Rhett A. Butler. Mongabay.co.id diluncurkan dan beroperasi sejak April 2012 Untuk meningkatkan ketertarikan pada lingkungan dan Kesadartahuan masyarakat tentang isu-isu lingkungan hidup di Indonesia. Mongabay.co.id memiliki ketertarikan khusus pada hutan, namun juga menampilkan berita, analisis dan informasi lain terkait lingkungan	(2) Penjangkauan Masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi
19	Koran Harian Analisa adalah salah satu media *mainstream* terkemuka di Medan.	(2) Penjangkauan Masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi
20	KISS FM Radio adalah salah satu radio terkemuka di Medan dengan target pendengar profesional muda di Medan.	(2) Penjangkauan Masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi
21	Lembaga Pariwisata Tangkahan adalah lembaga yang didirikan Foundationoleh masyarakat lokal di dua desa Namo Sialang dan Sei Serdang, yang terletak di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat Misi dari Lembaga Pariwisata Tangkahan adalah untuk merubah daerah tersebut menjadi kawasan ekowisata yang memiliki nilai konservasi dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Masyarakat lokal memperoleh pendapatan alternatif dari kegiatan-kegiatan ekowisata dan dengan menjaga lingkungannya.	(6) Pendampingan Masyarakat (7) Ekowisata
22	Kelompok kemitraan konservasi adalah kemitraan antara perambah taman nasional dan otoritas taman nasional untuk menyelesaikan konflik tenurial melalui restorasi ekosistem, sembari memungkinkan para perambah mengelola lahan konflik dengan tidak menimbulkan kerusakan baru. Merupakan kerjasaman yang disepakati dengan para peladang melalui skema kemitraan konservasi. Dalam skema kemitraan konservasi, pengguna lahan diberi akses kepada penggunaan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dari kawasan kemitraan yang disetujui, yakni zona tradisional di dalam kawasan taman nasional.	(4)Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem
23	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sumatera adalah unit wilayah Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup KLHK yang bertugas mengatur formulasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanangan hutan desa dan kemitraan lingkungan	(4)Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem

4.2. Kendala-kendala Utama dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser[62]

4.2.1. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur

Pembukaan jalan dalam hutan mempengaruhi masa depan dan keberlanjutan hutan, termasuk keanekaragaman hayati di dalamnya, serta masyarakat yang hidup dan bergantung pada sumber daya hutan. Pembukaan jalan dengan ketiadaan perencanaan jangka panjang telah menyebabkan longsor, banjir dan mendorong konversi hutan untuk pemanfaatan lain. Ketika hutan dibabat, maka ia menjadi terfragmentasi, yang menyebabkan beragam spesies menjadi rentan terhadap perburuan, kecelakaan jalan raya, peningkatan serangan predator atau gangguan oleh aktivitas manusia[63].

4.2.2. Pemungutan ilegal produk hasil hutan non kayu

Pemungutan ilegal hasil hutan non kayu adalah kejadian umum di TNGL. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Misalnya di Bukit Lawang, pemungutan rotan dan ikan jurung kerap terjadi.

4.2.3. Ketiadaan Penelitian Terapan

Keanekaragaman hayati TNGL yang kaya dan bernilai tinggi menyediakan peluang untuk upaya-upaya pendidikan dan penelitian jangka panjang. Namun demikian, sebagian besar penelitian dan dokumentasi yang ada saat ini adalah laporan-laporan penelitian dan akademik yang menawarkan rencana dan rekomendasi jangka panjang, sementara berkas atau dokumen penelitian praktis/terapan yang menawarkan penerapan jangka pendek dan jangka menengah, masih terbatas. Selama penilaian, juga ditemukan bahwa pegawai TNGL di lapangan memiliki keterbatasan kapasitas untuk melaksanakan penelitian dan menerapkan metode dan perangkat yang tepat.

4.2.4. Pelanggaran batas

Kasus pelanggaran batas yang umum terjadi di TNGL dipicu oleh perkebunan kelapa sawit di dalam dan sekitar batas sah TNGL. Salah satu contoh klasik adalah kasus di Besitang yang telah berjalan sejak 1999. Pelanggaran batas terus terjadi karena kasus-kasus (1) jual beli lahan di dalam kawasan, (2) penetapan perkebunan kelapa sawit skala besar, dan (3) kawasan yang dihuni oleh pengungsi dari Aceh. Selama 1989-2009, kawasan TNGL yang dimasuki secara ilegal bertambah sebanyak rata-rata 5% atau 625 ha per tahun[64]. Pada tahun 2009, kerusakan kawasan TNGL akibat pelanggaran batas, penebangan liar dan bencana alam mencapai hingga 143.734,87 ha[65].

---

[62] RPTNGL 2010 – 2019 dan hasil penilaian

[63] Impacts of Roads and Linear Clearings on Tropical Forests. Trends in Ecology and Evolution Vol. 24 no. William F. Laurance, Miriam Goosem and Susan G.W. Laurance.

[64] RPTNGL 2010-2019. Hal. 47

[65] Ibid

5

STRATEGI DAN RENCANA AKSI

5. STRATEGI DAN RENCANA AKSI

Strategi dan rencana aksi ditentukan sesuai dengan visi dan misi TNGL, rencana pengelolaan TNGL, dikombinasikan dengan konsep pengelolaan kolaboratif dan hasil-hasil penilaian. Dalam konteks CMP, strategi-strategi yang dituangkan untuk setiap sub-program didasarkan kepada sepuluh paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi. Yakni:

1) Masyarakat sebagai subyek pengelolaan
2) Penghormatan pada Hak Asasi Manusia
3) Kerjasama lintas eselon I dalam KemenLHK
4) Kerjasama lintas kementerian
5) Penghormatan nilai budaya dan adat
6) Kepemimpinan multi level
7) Sistem pengambilan keputusan secara ilmiah
8) Pengelolaan berbasis resort (lapangan)
9) Penghargaan & bimbingan
10) Organisasi pembelajaran

Pada fase inisiasi, sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan agar berpartisipasi menyumbangkan waktu dan sumber daya dalam menjalankan strategi dan kegiatan-kegiatan kunci bersama-sama. Kegiatan kunci dalam kerangka kerja program tematik keanekaragaman hayati dan mata pencaharian adalah mandat dari SGP-ACB. Lebih jauh, partisipasi masyarakat lokal juga penting dan telah lama menjadi strategi pengembangan dalam sinergi konservasi dan pembangunan ekonomi. Karena itu, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan juga menempatkan lebih banyak perhatian pada pemberdayaan masyarakat dan strategi peningkatan *bottom-up*.

5.1. Visi & Misi

Terkait sasaran pembangunan kehutanan yang tertuang dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Visi Pembangunan Nasional dan Kehutanan untuk 2006-2025, visi pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Gunung Leuser adalah Konservasi TNGL akan mendukung pembangunan berkelanjutan 2019

Misi pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser telah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari visinya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai guna memperkuat efektifitas pengelolaan, dalam konteks pencapaian sasaran pengelolaan.
2. Penguatan legalitas batas taman nasional yang disepakati dan diakui oleh pemangku kepentingan yang relevan.
3. Percepatan proses pengaturan pengelolaan kawasan, pengelolaan berbasis resort dan konservasi kenaekaragaman hayati dan ekosistem.
4. Peningkatan pemanfaatan kawasan sesuai potensi keberlanjutan.
5. Meningkatkan kesadartahuan dan partisipasi aktif masyakarat lokal dalam mendukung pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser yang adil dan bertanggung jawab.

- Sasaran Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser:

Guna memperkuat peran Taman Nasional Gunung Leuser dalam menyediakan fungsi maksimal sebagai sistem penyokong kehidupan dan manfaat bagi masyarakat.

5.2. Program dan Kegiatan-kegiatan Kunci

Otoritas TNGL telah menyampaikan analisa kesenjangan dan peninjauan terkait penyelenggaraan sasaran pengelolaan TNGL. Juga selanjutnya telah disampaikan dalam *inception workshop* pada 19 April 2018 di Medan; bahwa melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan SGP-ACB, diharapkan bahwa pemangku kepentingan dan masyarakat akan terlibat dalam pengembangan ekowisata, restorasi ekosistem dan pengelolaan hutan berkelanjutan di TNGL guna meminimalisir kesenjangan dalam penyelenggaraan sasaran pengelolaan.

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan visi dan misi TNGL, sasaran pengelolaan TNGL (seperti yang disebutkan di poin 5.1.) konsep pengelolaan kolaboratif, kebijakan pengelolaan kolaboratif di dalam kawasan konservasi, serta mandat *Small Grants Programme*-ASEAN Center for Biodiversity; telah teridentifikasi program-program sebagai dukungan bagi program mata pencaharian dan konservasi keanekaragaman hayati. Program-program tersebut akan dibagi menjadi sub-program sebagai berikut:

Dukungan bagi program keanekaragaman hayati yang termasuk (a) Sub-program Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan, (b) Sub-program Penjangkauan Masyarakat dan Kesadartahuan Konservasi, (c) Sub-program Inventarisasi, Identifikasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati, (d) Sub-program restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem (e) Sub-program Penegakan Hukum. Mendukung program mata pencaharian yang terdiri atas (a) Sub-Program Pendampingan Masyarakat dan (b) sub-program ekowisata.

Kegiatan-kegiatan kunci ini teridentifikasi melalui konsultasi erat dan proses partisipatif dengan pemangku kepentingan selama penilaian, pertemuan konsultasi dan konsultasi publik. Melalui proses bottom up, ditetapkan bahwa kegiatan-kegiatan kunci bertujuan untuk mencapai pernyataan visi dan misi TNGL, yang berada di bawah ruang lingkup pekerjaan kantor pengelola TNGL.

Penyelenggaraan akan dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan utama dari sektor konservasi dan pariwisata termasuk mitra nasional dan lokal, yang terdiri atas pemerintahan, masyarakat, organisasi-organisasi dan NGO. Juga akan dijalankan strategi guna memperkuat jaringan kelembagaan yang ada saat ini dengan merangkul berbagai pemangku kepentingan lokal dan nasional dari sektor konservasi dan pariwisata. Guna memastikan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan, bila dianggap tepat, seluruh pemangku kepentingan utama akan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan kunci.

Proses ini akan mengikutsertakan pelibatan Kantor Pengelola TNGL berkolaborasi dengan NGO yang ditunjuk, kelompok kerja, dan dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten, kantor-kantor resort TNGL, pemerintahan desa di kawasan-kawasan sasaran program dan pemangku kepentingan lain. Dalam proses ini, *inception* dan sosialisasi adalah penting untuk

memperkenalkan program-program dan kegiatan-kegiatan kunci yang akan dilaksanakan bersama pemangku kepentingan sasaran. Lebih lanjut, pada akhir pelaksanaan setiap sub-program, sangat penting untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi guna menganalisa dan menilai apakah kegiatan-kegiatan kunci telah memenuhi visi, pernyataan misi dan sasaran pengelolaan TNGL; dan apakah indikator-indikator yang dapat diverifikasi telah tercapai.

Penyelenggaraan proyek juga seharusnya menjamin kepemilikan pemangku kepentingan atas sasaran-sasaran program dengan memperkuat keterlibatan mereka dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan konservasi dan mata pencaharian di TNGL. Pelaksanaan bertujuan pada keterlibatan intensif masyarakat serta pertimbangan aspek sosial budaya dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam kegiatan, dukungan jangka panjang dari pemangku kepentingan dan masyarakat untuk perlindungan TNGL akan teraih.

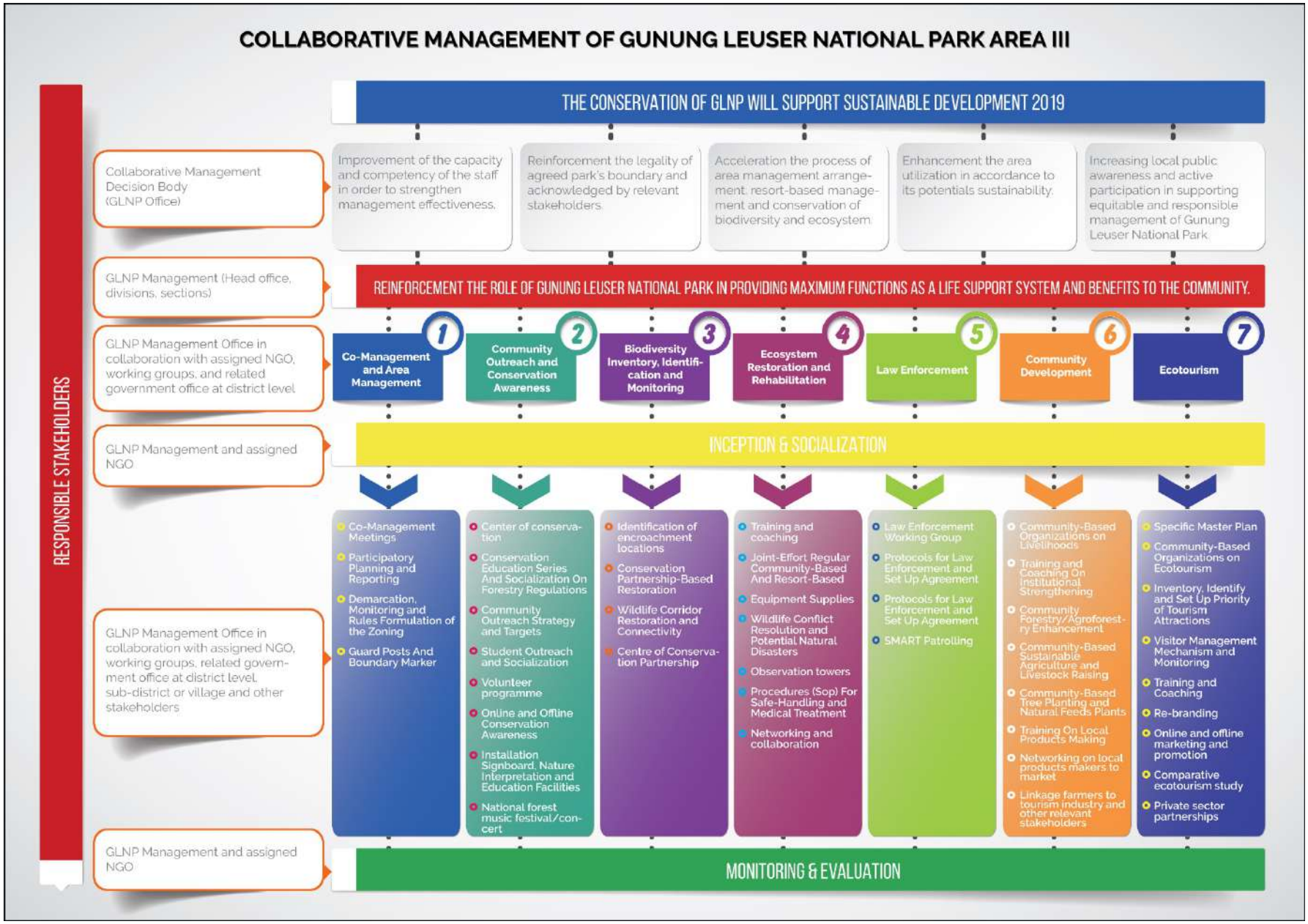

Bagan 2. Alur pikir Rencana Pengelolaan Kolaboratif – TNGL

5.2.1. Dukungan bagi Program Konservasi Keanekaragaman Hayati

Program konservasi keanekaragaman hayati dilakukan sebagai respon terhadap ancaman lingkungan dan sumber daya alam di Taman Nasional Gunung Leuser.

5.2.1.1. Sub-program Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan

Konteks dan Landasan pikir

Pengelolaan dampingan adalah penyelenggaraan oleh pemangku kepentingan yang relevan yang bersama-sama bekerja menyetujui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengelola kawasan taman nasional; dengan mengakomodir beragam kepentingan dan tujuan. Proses mendasar adalah bagaimana keputusan diambil dan dijalankan, berbagi pengetahuan dan tanggung jawab guna mencapai tujuan bersama yang relevan bagi TNGL. Identifikasi dan monitoring pada tingkat resort, misalnya, adalah salah satu isu penting untuk menguatkan mekanisme pengawasan tata batas guna melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalam taman nasional, dan untuk mengklarifikasi pembagian dan fungsi zona-zona.

Sasaran

Sasaran kegiatan adalah untuk meningkatkan proses pengelolaan guna meningkatkan efektivitas, untuk mengurangi hambatan dan biaya administrasi.

Kegiatan-kegiatan Kunci

- Pertemuan-pertemuan pengelolaan dampingan (koordinasi dan sosialisasi ke pemangku kepentingan relevan)
- Perencanaan dan pelaporan kuartal secara partisipatif
- Demarkasi, monitoring dan formulasi peraturan terkait zona guna memperkuat sistem dan mekanisme pengawasan batas
- Membangun pos-pos jaga dan penanda batas di lokasi yang ditentukan di TNGL BPTN III

Implementasi Teknis

Pertemuan rutin pemangku kepentingan, fasilitasi peralatan dan pembangunan infrastruktur, patroli, kunjungan dan survey lapangan.

Lokasi Proyek

Resort Bekancan, Resort Bahorok, Resort Bukit Lawang, Resort Tangkahan, Resort Cinta Raja, Resort Sekoci

Kelompok sasaran/penerima manfaat

TNGL BPTN III, masyarakat disekitar BPTN III

Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab

NGO lokal yang ditunjuk untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kantor TNGL, petugas resort TNGL, kepala desa dan masyarakat setempat

Pemangku kepentingan potensial: YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, YAHUA, WCS, Vesswic

Jadwal pekerjaan

Implementasi lima tahun setelah rencana disetujui (lihat matriks)

Anggaran/Rencana keuangan

Mekanisme SGP-ACB, anggaran tahunan TNGL (lihat matriks)

Monitoring dan evaluasi

Monitoring akan dilaksanakan pada akhir tiap kegiatan sesuai dengan indikator keberhasilan.

Tabel 4. Sub-program Pengelolaan Dampingan dan Pengelolaan Kawasan dan Rencana Kegiatan

Deskripsi	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu
			Total	
1. Sub Program Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan			73.570	
1. Pertemuan Pengelolaan dampingan (koordinasi dan sosialisasi ke stakeholders penting)	7 Resorts	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, YAHUA, WCS, Vesswic	23.571	2019-2020
2. Perencanaan dan Pelaporan Kuartal secara Partisipatif			12.857	2019-2021
3. Demarkasi, Monitoring dan Formulasi Peraturan Zonasi untuk Memperkuat Mekanisme dan sistem pengawasan tata batas1			8.571	2019
4. Membangun pos jaga dan penanda batas di lokasi yang ditetapkan di TNGL BPTN III			28.571	2019-2020

5.2.1.2. Sub Program Penjangkauan Masyarakat dan Kesadartahuan Konservasi

Konteks dan landasan pikir

Selama penilaian untuk penyusunan CMP, teridentifikasi bahwa salah satu akar masalah perlakuan tidak tepat terhadap sumberdaya keanekaragaman hayati di TNGL adalah kurangnya informasi tentang peraturan terkait lingkungan dan ketidaktahuan akan tujuan kawasan perlindungan di kalangan masyarakat. Sehingga, sesekali terjadi kasus-kasus penghilangan dan perusakan papan pemberitahuan batas. Pendekatan yang paling efisien untuk menguatkan peraturan terkait lingkungan atau memperoleh penghormatan akan tata batas taman nasional adalah dengan memastikan pemahaman dan penerimaan publik setempat akan keberadaan TNGL. Memperkuat kesadartahuan akan status TNGL khususnya dengan memperkenalkan ASEAN Heritage Park sebagai salah satu status juga diperlukan guna meningkatkan kesadartahuan akan nilai penting kawasan ini. Dengan demikian, sub program

penjangkauan masyarakat dan kesadartahuan konservasi termasuk pendidikan dan peningkatan kesadartahuan masyarakat akan dilaksanakan di kawasan sekitar TNGL di dalam Kabupaten Langkat.

Sasaran

Sasaran sub program ini adalah untuk meningkatkan kesadartahuan dan pemahaman masyarakat terkait nilai penting TNGL melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Kegiatan-kegiatan Kunci

- Mendirikan pusat konservasi untuk pendampingan masyarakat dan pendidikan lingkungan
- Melaksanakan rangkaian edukasi konservasi dan sosialisasi tentang peraturan-peraturan kehutanan kepada pemangku kepentingan terkait
- Melaksanakan penjangkauan murid dan sosialisasi melalui kemah konservasi dan kunjungan sekolah bagi generasi muda
- Melaksanakan program relawan bagi anak sekolah di sekitar TNGL
- Mengembangkan kesadartahuan konservasi melalui promosi media daring maupun luring
- Memasang papan tanda, interpretasi alam dan fasilitas serta materi-materi edukasi di lokasi-lokasi strategis
- Melaksanakan festival/konser musik hutan nasional (mis. Jazz di hutan)

Pelaksanaan teknis

Pertemuan rutin pemangku kepentingan, pengadaan infrastruktur dan fasilitasi perlengkapan, pengorganisasian acara, pengembangan media daring dan luring.

Lokasi Proyek

Resort Bekancan, Resort Bahorok, Resort Bukit Lawang, Resort Tangkahan, Resort Cinta Raja, Resort Sekoci

Kelompok sasaran/penerima manfaat

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan resort yang disebutkan, TNGL BPTN III; Anak-anak dan pemuda dari sekolah-sekolah di Kabupaten Langkat, Kantor GLNP Office, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat

Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab

NGO lokal yang ditunjuk untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kantor TNGL, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat, kepala desa dan masyarakat setempat, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Media lokal (cetak, daring dan radio)

Pemangku kepentingan potensial: YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, YAHUA, HPI Langkat, Medan Bisnis, Analisa, Waspada, KISS Fm, Mongabay Indonesia

Jadwal pekerjaan

Implementasi lima tahun setelah rencana disetujui

Anggaran/rencana keuangan

Mekanisme SGP-ACB, anggaran tahunan TNGL, Dinas Pariwisata Kabupaten

Monitoring dan evaluasi

Monitoring akan dilaksanakan pada akhir tiap kegiatan sesuai dengan indikator keberhasilan: informasi yang relevan tersedia dan dapat diakses khalayak luas, kemauan untuk memperoleh pengetahuan/informasi baru dan perubahan paradigma terhadap nilai penting taman nasional.

Table 5. Sub-program Penjangkauan dan Penyadartahuan Konservasi ke Masyarakat dan Rencana Kegiatan

Deskripsi	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu
			Total	
2. Sub Program Penjangkauan Masyarakat dan Kesadartahuan Konservasi			198.928	
1. Membangun pusat konservasi untuk Pendampingan masyarakat dan pendidikan Lingkungan	6 Resorts	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, YAHUA, HPI Langkat, Medan Bisnis, Analisa, Waspada, KISS Fm, Mongabay Indonesia	42.857	2019
2. Melaksanakan rangkaian edukasi konservasi dan sosialisai peraturan kehutanan ke *stakeholder* penting			12.857	2019-2021
3. Menyusun strategi dan target penjangkauan masyarakat			9.857	2019-2021
4. Melaksanakan penjangkauan siswa dan Sosialisasi lewat kemah konservasi dan Kunjungan sekolah bagi remaja			21.929	2019-2021
5. Melaksanakan program relawan bagi anak sekolah di sekitar kawasan TNGL			10.714	2019-2021
6. Mengembangkan kesadartahuan konservasi Lewat promosi media daring dan luring			6.071	2019-2021
7. Memasang papan tanda, interpretasi alam dan fasilitas serta material edukasi di lokasi Strategis			5.357	2019-2021
8. Melaksanakan festival/konser musik hutan nasional (mis. Jazz di hutan)			89.286	2019-2022

5.2.1.3. Subprogram Inventarisasi, Identifikasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati

Konteks dan landasan pikir

Berdasarkan penilaian cepat yang dilaksanakan di TNGL BPTN III, catatan margasatwa liar yang ada saat ini tidak dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan. Penelitian yang sedang berjalan sifatnya sporadis dan tidak praktis untuk diwujudkan. Misalnya di Batu Katak (Resort Bahorok) dan Batu Rongring (Resort Bukit Lawang); belum ada inventarisasi atau penelitian yang telah dilakukan agar dapat digunakan sebagai data awal

Bagi pengguna (masyarakat yang menawarkan tur dan perjalanan dengan pemandu); meskipun catatan tersebut penting sebagai pengetahuan dasar yang dapat disampaikan sebagai informasi kepada pengunjung atau dipergunakan untuk penelitian lebih lanjutan. Di Bukit Lawang dan Tangkahan, juga teridentifikasi kebutuhan catatan keanekaragaman hayati guna memperkuat pengetahuan generasi yang lebih muda, utamanya bagi operator tur/pemandu wisata lokal. Sehingga, sub program inventarisasi, identifikasi dan monitoring keanekaragaman hayati akan dilaksanakan di semua resort dimana penilaian telah dilaksanakan. Masyarakat akan dilibatkan guna menguatkan rasa memiliki.

Sasaran

Sasaran sub program ini adalah untuk meningkatkan dan menguatkan ketersediaan data keanekaragaman hayati agar dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan terkait; baik untuk kepentingan wisata, konservasi atau penelitian lebih lanjut.

Kegiatan-kegiatan Kunci

- Melaksanakan pelatihan dan mentoring terkait inventarisasi, identifikasi dan monitoring keanekaragaman hayati dengan memperkenalkan metode-metode dan perangkat-perangkat yang relevan kepada petugas resort dan kelompok masyarakat terpilih
- Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, survey keanekaragaman hayati dan monitoring spesies kunci, kelompok spesies dan habitat; berbasis resort dan berbasis masyarakat secara bersama-sama dan teratur
- Menyediakan peralatan untuk inventarisasi, identifikasi, survey keanekaragaman hayati dan monitoring spesies kunci, kelompok spesies dan habitat
- Melaksanakan identifikasi, implementasi dan monitoring resolusi konflik margasatwa dan potensi bencana alam
- Pengadaan menara pengawas khusus untuk monitoring spesies kunci
- Menyusun prosedur (SOP) untuk penanganan dengan aman dan perawatan medis spesies kunci
- Membentuk jaringan dan kolaborasi dengan universitas dan dokter hewan-dokter hewan untuk penanganan dengan aman dan perawatan medis spesies kunci di lokasi.

Pelaksanaan teknis

Pertemuan rutin pemangku kepentingan, penyusunan metodologi, kunjungan lapangan dan survey untuk pengumpulan data, pelaporan dan presentasi data.

Lokasi Proyek

Resort Bekancan, Resort Bahorok, Resort Bukit Lawang, Resort Tangkahan, Resort Cinta Raja, Resort Sekoci.

Kelompok sasaran/penerima manfaat

Masyarakat yang hidup di sekitar resort yang disebutkan, TNGL BPTN III, pemangku kepentingan pariwisata setempat

Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab

NGO lokal yang ditunjuk untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kantor TNGL, kepala desa dan masyarakat setempat, Universitas

Pemangku kepentingan potensial: YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, Vesswic, WCS, Fakultas Kehutanan – Universitas Sumatera Utara, Jurusan Konservasi Margasatwa – Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiahkuala

Jadwal pekerjaan

Implementasi lima tahun setelah rencana disetujui (lihat matriks)

Anggaran/rencana keuangan

Mekanisme SGP-ACB, anggaran tahunan TNGL (lihat matriks)

Monitoring dan evaluasi

Monitoring akan dilaksanakan pada akhir tiap kegiatan sesuai dengan indikator keberhasilan: informasi terkait menjadi tersedia dan pemangku kepentingan bersedia memperoleh pengetahuan baik untuk meningkatkan pelayanannya atau untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut.

Tabel 6. Sub-program Inventarisasi, Identifikasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati

Deskripsi	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu
			Total	
3. Sub Program Inventarisasi, Identifikasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati			114.303	
1. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan tentang inventarisasi, identifikasi dan monitoring keanekaragaman hayati dengan memperkenalkan metode dan perangkat yang relevan kepada petugas resort kelompok masyarakat terpilih	6 Resorts	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, Vesswic, WCS, Fak. Kehutanan – Universitas Sumatera Utara, Jurusan Konservasi Margasatwa – Fak. Kedokteran Hewan Universitas Syiahkuala	14.286	2019
2. Melaksanakan inventarisasi keanekaragaman hayati, identifikasi, survey dan monitoring spesies kunci, kelompok secara teratur dan bersama-sama berbasis resort dan masyarakat			25.714	2019-2021
3. Menyediakan peralatan untuk inventarisasi keanekaragaman hayati, identifikasi, survey dan monitoring spesies kunci, kelompok spesies dan habitat			3.571	2019
4. Melaksanakan identifikasi, implementasi dan monitoring Resolusi konflik margasatwa dan potensi bencana alam			42.875	2019-2023
5. Mendirikan menara pengamat untuk pengamatan spesies kunci			15.000	2019
6. Menyusun prosedur (SOP) untuk penanganan dengan aman dan pengobatan medis spesies kunci			5.714	2019
7. Membangung jaringan dan kolaborasi dengan universitas dan dokter hewan terkait penanganan dengan aman dan pengobatan medis spesies kunci di lokasi			7.143	2019-2020

5.2.1.4. Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem

Konteks dan landasan pikir

Hingga saat ini, restorasi ekologi adalah metode yang paling tepat bagi lahan terdegradasi di dalam kawasan lindung. Kawasan TNGL yang mengalami perambahan, yang amat terdegradasi, membutuhkan intervensi restorasi ekologi yang lebih sistematik. Intervensi ini akan membantu rehabilitasi habitat kritis guna keberlangsungan hidup satwa liar. Desain inisiasi dan implementasi pendekatan restorasi ekologi berbasis ilmu pengetahuan telah dilaksanakan di TNGL termasuk di Kawasan III sejak 2009. Sebuah plot percontohan permanen yang baru akan dibuat dan areal restorasi yang sudah berjalan akan diperluas guna menyediakan peluang kegiatan penelitian jangka panjang dan diperlihatkan guna meningkatkan edukasi publik. Kegiatan tersebut juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kesadartahuan dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan dukungannya.

Sasaran

Untuk mewujudkan dan memperluas plot percontohan yang telah ada guna pendekatan restorasi ekosistem berbasis ilmiah.

Kegiatan-kegiatan kunci

- Melaksanakan identifikasi lokasi-lokasi perambahan
- Melaksanakan restorasi berdasarkan kemitraan konservasi
- Melaksanakan restorasi dan konektivitas koridor satwa

- Mmbangun pusat kemitraan konservasi di lokasi proyek yang ditetapkan dan disetujui.

Pelaksanaan teknis

Pertemuan rutin, penilaian, mekanisme dan strategi pendekatan restorasi ekosistem berbasis ilmu pengetahuan, kunjungn lapangan

Lokasi Proyek

Resort Bekancan, Resort Cinta Raja, Resort Sekoci

Kelompok sasaran/penerima manfaat

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan, TNGL BPTN III

Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab

NGO lokal yang ditunjuk untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kantor TNGL, kepala desa dan masyarakat setempat

Pemangku kepentingan potensial: YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, WCS, (Kemitraan Konservasi), BPSKL

Jadwal pekerjaan

Implementasi lima tahun setelah rencana disetujui (lihat matriks)

Anggaran/rencana keuangan

Mekanisme SGP-ACB, anggaran tahunan GLNP (lihat matriks)

Monitoring dan evaluasi

Monitoring akan dilaksanakan pada akhir tiap kegiatan sesuai dengan indikator keberhasilan: pelibatan pemangku kepentingan dalam konservasi TNGL, identifikasi kawasan untuk penetapan plot percontohan restorasi ekologi yang baru dan penambahan kawasan restorasi yang sudah ada dengan masukan-masukan ilmiah.

Tabel 7. Sub-program Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem dan Rencana Kegiatan

Deskripsi	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu
			Total	
4. Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem				
1. Melaksanakan identifikasi lokasi perambahan	4 Resort	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, WCS, (Kemitraan Konservasi), BPSKL	3.571	2019
2. Melaksanakan restorasi berbasis kemitraan konservasi			267.857	2019-2023
3. Melaksanakan restorasi dan konektivitas koridor Margasatwa				
4. Mendirikan pusat kemitraan konservasi di lokasi yang sudah ditentukan dan disepakati			10.714	219-2021

5.2.1.5. Sub program Penegakan Hukum

Konteks dan landasan pikir

Untuk meningkatkan lebih lanjut perlindungan taman nasional, mekanisme penegakan hukum yang efektif harus diselenggarakan dengan melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari pembentukan kelompok kerja penegakan hukum hingga pelaksanaan patroli berbasis SMART. Kegiatan-kegiatan ini didesain untuk satuan tugas multi-stakeholder yang bertanggung jawab mencegah tindakan-tindakan represif terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang mengancam TNGL. Masyarakat disekitar kawasan TNGL akan diajak berkonsultasi dan dilibatkan secara aktif guna memperoleh kesediaan dan dukungan mereka

Sasaran

Mengurangi ancaman dan kegiatan-kegiatan ilegal dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hukum.

Kegiatan-kegiatan Kunci

- Membentuk Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dengan menetapkan pembagian antara tanggung jawab penegakan hukum dan mendefinisikan sasaran dan strategi
- Menyusun protokol bagi penegakan hukum dan membuat kesepakatan dengan pejabat publik daerah
- Menyediakan peralatan untuk mendukung Patroli SMART di lokasi role model
- Melaksanakan Patroli SMART di lokasi *role model* (mis. Sekoci, kawasan hutan resort Sekoci)

Pelaksanaan teknis

Pertemuan rutin, penyusunan mekanisme dan strategi, pengadaan peralatan, penilaian dan kunjungan lapangan.

Lokasi Proyek

Resort Bekancan, Resort Bahorok, Resort Bukit Lawang, Resort Tangkahan, Resort Sekoci.

Kelompok sasaran/penerima manfaat

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan, TNGL BPTN III

Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab

NGO lokal yang ditunjuk untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kantor TNGL, kepala desa dan masyarakat setempat

Pemangku kepentingan potensial: YOSL-OIC, YEL - SOCP, WCS -IP, Balai Gakkum, Vesswic, Kepolisian pada tingkat Kabupaten dan Provinsi

Jadwal pekerjaan

Implementasi lima tahun setelah rencana disetujui (lihat matriks)

Anggaran/rencana keuangan

Mekanisme SGP-ACB, anggaran tahunan GLNP (lihat matriks)

Monitoring dan evaluasi

Monitoring akan dilaksanakan pada akhir tiap kegiatan sesuai dengan indikator keberhasilan: kelompok kerja penegakan hukum terbentuk; strategi dan target penegakan hukum, pembagian tanggung jawab penegak hukum dan protokol untuk penegakan hukum tersusun; patroli SMART dilaksanakan.

Table 8. Sub-program Penegakan Hukum dan Rencana Kegiatan

Deskripsi	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu
			Total	
5. Sub Program Penegakan Hukum			**167.857**	
1. Membentuk patroli warga (MMP) dengan menentukan pemisahan tanggung jawab penegakan hukum dan menentukan strategi dan target	6 Resort	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, YAHUA, WCS, Balai Gakkum, Kepolisian Daerah Sumatera Utara	21.429	2019-2020
2. Menyusun protokol penegakan hukum dan membuat kesepakatan dengan kantor pemerintah setempat lainnya			15.000	2019
3. Menyediakan peralatan untuk mendukung Patroli SMART di lokasi-lokasi *role model*			28.571	2019
4. Melaksanakan patroli SMART di lokasi-lokasi *role model*			102.857	2019-2023

5.2.2. Dukungan bagi Program Mata Pencaharian

5.2.2.1. Sub Program Pendampingan Masyarakat

Konteks dan landasan pikir

Sasaran keanekaragaman hayati dan upaya-upaya penegakan hukum tidak dapat menjadi solusi jangka panjang meskipun dilaksanakan secara efektif, tanpa perhatian pada mata pencaharian alternatif yang menjaga nilai-nilai budaya dan alam. Guna memastikan kesadartahuan jangka panjang akan konservasi, sangat penting melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya guna meningkatkan pemahaman dan kepemilikan mereka.

Sasaran

Meningkatkan pembagian manfaat untuk masyarakat setempat guna mendorong partisipasi lokal dalam menjaga nilai-nilai alam dan budaya TNGL

Kegiatan-kegiatan kunci

- Mengembangkan organisasi bebasis masyarakat terkait mata pencaharian
- Melaksanakan pelatihan dan pendampingan terkait penguatan kelembagaan guna mendefinisikan strategi, target dan kegiatan
- Melaksanakan penguatan hutan desa/*agroforestry* dengan melakukan pengembangan produk hasil hutan non-kayu berbasis masyarakat (mis. perikanan, budidaya burung, peternajan lebah madu, herbal, tanaman obat, pembibitan anggrek dan tanaman produktif lain)
- Melaksanakan pertanian dan peternakan berkelanjutan berbasis masyarakat
- Membangun penanaman pohon dan tanaman pakan hewan berbasis masyarakat di lokasi-lokasi yang disepakati
- Melaksanakan pelatihan dalam pembuatan produk lokal, menciptakan keragaman proses dan paska produksi (mis. Produk kerajinan pandan, produk bambu, makanan daerah, pengemasan tanaman obat)
- Membangun jaringan pemasaran bagi pembuat produk lokal
- Membangun jaringan petani dengan industri pariwisata dan pemangku kepentingan penting lain (*agroforestry* masyarakat, produk pertanian dan peternakan ke restoran/akomodasi)

Pelaksanaan teknis

Penilaian, pertemuan rutin, pelatihan dan pendampingan, kunjungan lapangan

Lokasi Proyek

Resort Bekancan, Resort Bahorok, Resort Bukit Lawang, Resort Tangkahan, Resort Sekoci.

Kelompok sasaran/penerima manfaat

Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan, TNGL BPTN III

Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab

NGO lokal yang ditunjuk untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kantor TNGL, kepala desa dan masyarakat setempat, Dinas Peternakan Langkat, Dinas Perikanan Langkat

Pemangku kepentingan potensial: YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, HPI, LPT Tangkahan, kelompok ekowisata Batu Katak

Jadwal pekerjaan

Implementasi lima tahun setelah rencana disetujui (lihat matriks)

Anggaran/rencana keuangan

Mekanisme SGP-ACB, anggaran tahunan GLNP (lihat matriks)

Monitoring dan evaluasi

Monitoring akan dilaksanakan pada akhir tiap kegiatan sesuai dengan indikator keberhasilan: pengembangan organisasi berbasis masyarakat terkait mata pencaharian, peningkatan hutan desa/*agroforestry*, pelaksanaan pertanian dan peternakan yang berkelanjutan serta budidaya burung dan ikan berbasis masyarakat.

Tabel 9. Sub-program Pendampingan Masyarakat dan Rencana Kegiatan

Deskripsi	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu
			Total	
6. Sub Program Pendampingan Masyarakat			171.248	
1. Membentuk organisasi berbasis masyarakat untuk mata pencaharian	6 Resort	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, HPI, LPT Tangkahan, Kelompok Ekowisata Batu Katak	7.143	2019-2020
2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan tentang Penguatan kelembagaan guna mendefinisikan strategi, target dan kegiatan			10.714	2019-2020
3. Melaksanakan penguatan hutan desa/*agroforestry* Dengan melakukan pengembangan produk hasil hutan non kayu berbasis masyarakat (mis. perikanan, budidaya burung, peternakan lebah madu, herba, tanaman obat, pembibitan anggrek dan tanaman produktif lain)			35.714	2019-2020
4. Melaksanakan pertanian dan peternakan berkelanjutan berbasis masyarakat			21.249	2019-2021
5. Melaksanakan penanaman pohon dan tanaman pakan satwa berbasis masyarakat di lokasi yang sudah disepakati			53.571	2019-2021
6. Melakukan pelatihan terkait pembuatan produk lokal, untuk menghasilkan proses dan paska produksi Yang lebih beragam (mis. produk kerajinan tangan pandan, produk bambu, makanan daerah, pengemasan tanaman obat)			21.429	2019-2020
7. Membangun jaringan bagi pembuat produk lokal dan menghubungkannya dengan pasar			14.286	2019-2020
8. Membangun jaringan petani dengan industri pariwisata dan pemangku kepentingan penting lain (*agroforestry* masyarakat, produk pertanian dan peternakan ke restoran/akomodasi)			17.857	2019-2020

5.2.2.2. Sub Program Ekowisata

Konteks dan Landasan Pikir

Nilai luar biasa yang dimiliki Taman Nasional Gunung Leuser telah menyediakan beragam daya tarik wisata mulai dari *trekking* dalam hutan, *tubing*, berenang hingga kegiatan-kegiatan budaya. Namun demikian, pengunjung terkonsentrasi di dua lokasi tujuan wisata (yakni Bukit Lawang dan Tangkahan) dan sangat penting untuk mendistrbusikan dan mencipatakan pola perjalanan wisata yang lebih beragam di kawasan ini. Diversifikasi produk dan daya tarik wisata (berbasis budaya atau alam) harus didesain guna menyediakan lebih banyak peluang bagi pengunjung untuk mengulangi kunjungannya dan menciptakan durasi kunjungan yang lebih lama. Peningkatan pengelolaan pariwisata di lokasi-lokasi potensial akan menghasilkan keseimbangan antara manfaat bagi masyarakat setempat dan konservasi lingkungan TNGL. Seragkaian pelatihan harus dilaksanakan baik dari sisi pengelola maupun dari sisi pemasar.

Sasaran

Melaksanakan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dan mendukung kawasan

Kegiatan-kegiatan Kunci

- Menyusun master plan spesifik untuk masing-masing tujuan wisata prioritas di BPTN III
- Memperkuat organisasi ekowisata berbasis masyarakat yang telah ada saat ini dan sinergi dengan lembaga pemerintah
- Melaksanakan penilaian untuk menginventaris, mengidentifikasi, dan menyusun prioritas tujuan wisata guna diversifikasi produk-produk pariwisata
- Menetapkan mekanisme pengelolaan pengunjung dan monitoring di lokasi-lokasi wisata prioritas
- Melaksanakan pelatihan tentang pengenalan ekowisata di lokasi-lokasi wisata prioritas
- Melaksanakan pelatihan dan pendampingan terkait operasional dan pengelolaan tur (mis. itinerary dan pembuatan penawaran paket tur)
- Melaksanakan pelatihan dan pendampingan terkait dasar-dasar kepemanduan, interpretasi, dasar-dasar bahasa asing dan pelayanan prima kepada pemandu lokal
- Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan media daring (mis. website, sosial media dan penulisan konten)
- Meninjau, mengidentifikasi dan melaksanakan rencana re-branding Bukit Lawang dan Tangkahan
- Melaksanakan promosi dan pemasaran daring dan luring
- Melaksanakan sesi pembelajaran bersama dan studi banding ekowisata ke taman nasional lain yang sesuai dan menyediakan model yang dapat diterapkan bagi lokasi wisata prioritas di Kawasan III
- Menjalankan kemitraan sektor swasta (mis. jaringan usaha dan hubungan usaha antara tour operator lokal dengan travel agent yang memiliki koneksi pasar yang lebih besar, melibatkan penyedia layanan komunikasi dan bank dalam kerjasama mengembangkan fasilitas sederhana dan promosi bersama).

Pelaksanaan teknis

Pertemuan teratur, penilaian, survey, kunjungan lapangan, pelatihan dan pendampingan, acara-acara kemitraan, pengembangan media daring dan luring

Lokasi Proyek

Resort Bekancan, Resort Bahorok, Resort Bukit Lawang, Resort Tangkahan.

Kelompok sasaran/penerima manfaat

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, TNGL BPTN III

Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab

NGO lokal yang ditunjuk untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kantor TNGL, kepala desa dan masyarakat setempat

Pemangku kepentingan potensial: YOSL-OIC, YEL-SOCP, HPI, Dinas Pariwisata Langkat.

Jadwal pekerjaan

Implementasi lima tahun setelah rencana disetujui (lihat matriks)

Anggaran/rencana keuangan

Mekanisme SGP-ACB, anggaran tahunan GLNP (lihat matriks)

Monitoring dan evaluasi

Monitoring akan dilaksanakan pada akhir tiap kegiatan sesuai dengan indikator keberhasilan: tersusunnya master plan untuk tujuan wisata single tourism di TNGL Kawasan III, terlaksananya pelatihan dan pendampingan ekowisata, penguatan organisasi berbasis masyarakat di bidang ekowisata, pengembangan sektor swasta dan pemasaran serta promosi daring-luring telah dikembangkan.

Tabel 10. Sub-program Ekowisata dan Rencana Kegiatan

Deskripsi	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu
			Total	
7. Sub program Ekowisata			194.287	
7.1. Menyusun master plan spesifik untuk masing-masing destinasi wisata prioritas di BPTN III	6 Resort	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, HPI, LPT Tangkahan, Kelompok Ekowisata Batu Katak	21.429	2019-2020
7.2. Memperkuat organisasi ekowisata berbasis masyarakat yang telah ada saat ini dan sinergi dengan lembaga pemerintah			10.714	2019
7.3. Melaksanakan penilaian untuk menginventaris, mengidentifikasi, dan menyusun prioritas tujuan wisata guna diversifikasi produk-produk pariwisata			42.857	2019-2020
7.4. Menetapkan mekanisme pengelolaan pengunjung dan monitoring di lokasi-lokasi wisata prioritas			5.714	2019
7.5. Melaksanakan pelatihan tentang pengenalan ekowisata di lokasi-lokasi wisata prioritas			7.143	2019
7.6. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan terkait operasional dan pengelolaan tur (mis. itinerary dan pembuatan penawaran paket tur)			21.429	2019-2020
7.7. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan terkait dasar-dasar kepemanduan, interpretasi, dasar-dasar bahasa asing dan pelayanan prima kepada pemandu lokal			21.429	2019-2020
7.8. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan media daring (mis. website, sosial media dan penulisan konten)			14.286	2019-2023
7.9. Meninjau, mengidentifikasi dan melaksanakan rencana re-branding Bukit Lawang dan Tangkahan			14.286	2019-2020
7.10. Melaksanakan promosi dan pemasaran daring dan luring			14.286	
7.11. Melaksanakan sesi pembelajaran bersama dan studi banding ekowisata ke taman nasional lain yang sesuai dan menyediakan model yang dapat diterapkan bagi lokasi wisata prioritas di BPTN III			2.857	2020
7.12. Menjalankan kemitraan sektor swasta (mis. jaringan usaha dan hubungan usaha antara tour operator lokal dengan travel agent yang memiliki koneksi pasar yang lebih besar, melibatkan penyedia layanan komunikasi dan bank dalam kerjasama mengembangkan fasilitas sederhana dan promosi bersama).			17.857	2019-2021

Tabel 11. Matriks Program Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Gunung Leuser Kawasan III

Deskripsi		Program dan Kegiatan Kunci	Indikator Verifikasi	Strategi	Skala Prioritas
Sasaran Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser: memperkuat peran Taman Nasional Gunung Leuser dalam menyediakan fungsi maksimal sebagai sistem penyokong kehidupan dan pemberi manfaat bagi masyarakat.					
A. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati					
Hasil yang diharapkan	**Sasaran**	**1. Sub-program Pengelolaan Dampingan dan**			
Efektifitas proses pengelolaan meningkat	Meningkatkan proses pengelolaan agar lebih efektif, mengurangi tantangan dan menekan biaya administrasi	1.1. Pertemuan pengelolaan dampingan (koordinasi dan sosialisasi ke pemangku kepentingan terkait)	· 60 pertemuan koordinasi dilaksanakan · 30 sosialisasi ke pemangku kepentingan terkait	Pertemuan pemangku kepentingan secara teratur, pembangunan fasilitas dan infrastuktur patroli, kunjungan lapangan dan survey.	3
		1.2. Perencanaan dan Pelaporan Kuartal secara partisipatif	60 laporan disusun oleh mitra TNGL		
		1.3. Demarkasi, monitoring, dan formulasi aturan zonasi untuk memperkuat mekanisme dan system pengawasan tata batas	Mekanisme dan sistem pengawasan tata batas terwujud		
		1.4. Mendirikan pos jaga dan penanda batas di lokasi yang ditetapkan di TNGL - BPTN Wilayah III	15 pos jaga dan penanda batas yang ditetapkan terpasang		

Deskripsi		Program dan Kegiatan Kunci	Indikator Verifikasi	Strategi	Skala Prioritas
Hasil yang diharapkan	**Sasaran**	**2. Sub-program Penjangkauan Masyarakat dan Penyadartahuan Konservasi**			
Kesadartahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai penting TNGL meningkat	Meningkatkan kesadartahuan dan pemahanan masyarakat akan nilai penting TNGL dengan mendorong partisipasi public dalam konservasi lingkungan sumber daya alam	2.1. Mendirikan pusat konservasi untuk pengembangan masyarakat dan pendidikan lingkungan	3 pusat konservasi didirikan	Pertemuan teratur para pemangku kepentingan, pembangunan infrastruktur dan perlengkapan fasilitas, pengadaan acara, pengembangan media online dan offline.	2
		2.2. Melakukan rangkaian pendidikan konservasi dan sosialisasi peraturan kehutanan kepada pemangku kepentingan terkait.	36 sosialisasi tentang peraturan kehutanan diberikan kepada pemangku kepentingan terkait		
		2.3. Menyusun strategi dan target penjangkauan masyarakat.	6.000 orang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan penjangkauan		
		2.4. Melakukan penjangkauan ke siswa sekolah, sosialisasi melalui kemah konservasi dan kunjungan ke sekolah	30 penjangkauan dan sosialisasi dilakukan		
		2.5. Mengadakan program sukarelawan untuk siswa sekolah di wilayah berbatasan dengan TNGL.	6 program sukarelawan untuk siswa sekolah diadakan		
		2.6. Mengembangkan penyadartahuan konservasi melalui media online dan offline	71 post di media social dan 3 jenis promosi offline dikembangkan dan dipublikasikan		
		2.7. Memasang papan reklame, penanda dan fasilitas pendidikan di tempat strategis	50 papan reklame, penanda dan fasilitas pendidikan terpasang		
		2.8. Mengadakan konser/festival music bertema hutan (contoh. Jazz in the forest)	5 acara tingkat nasional diadakan		

Deskripsi		Program dan Kegiatan Kunci	Indikator Verifikasi	Strategi	Skala Prioritas
Hasil yang diharapkan	**Sasaran**	**3. Sub-program Inventarisasi, Identifikasi dan Pemantauan Keanekaragaman hayati**			
Data keanekaragaman hayati tersedia dan bias diakses bagi pemangku kepentingan terkait	Untuk meningkatkan dan memperkuat data keanekaragaman yang tersedia sehingga bisa digunakan bagi pemangku kepentingan terkait; baik untuk pariwisata ataupun penelitian.	3.1. Mengadakan pelatihan dan bimbingan inventarisasi, identifikasi, dan pemantauan keanekaragaman hayati melalui metode dan alat yang sesuai, untuk staf resort dan kelompok masyarakat terkait.	20 pelatihan dan bimbingan tentang inventarisasi keanekaragaman hayati dilaksanakan.	Pertemuan teratur para pemangku kepentingan, pengembangan metodologi, kunjungan lapangan dan survei untuk pengumpulan data, pemaparan data dan pelaporan	1
		3.2. Melakukan kerja bersama secara teratur pada tingkat masyarakat dan resort untuk inventarisasi, identifikasi, survei dan pemantauan spesies kunci, kelompok spesies dan habitat.	36 inventarisasi, identifikasi, survei dan pemantauan secara teratur dilakukan		
		3.3. Menyediakan peralatan untuk inventarisasi, identifikasi keanekaragaman hayati, survei dan pemantauan spesies kunci, kelompok spesies dan habitat	15 tipe perlengkapan untuk inventarisasi, identifikasi, survei dan pemantauan disediakan.		
		3.4. Melakukan identifikasi, pelaksanaan dan pemantauan penyelesaian konflik satwa dan potensi bencana alam (orangutan, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera)	• Data populasi 3 spesies telah diperbaharui (harimau Sumatera, orangutan, gajah Sumatera) • Laporan konflik spesies kunci menurun sebanyak 30% • Potensi bencana alam telah diidentifikasi		
		3.5. Mendirikan menara pengawasan untuk pemantauan spesies kunci.	3 menara pengawasan didirikan		
		3.6. Mengembangkan SOP untuk penanganan medis gajah di Tangkahan.	SOP penanganan medis untuk gajah di Tangkahan telah dikembangkan		
		3.7. Membangun jaringan dan kolaborasi dengan universitas dan dokter hewan untuk penanganan medis ditempat untuk spesies kunci.	• 2 MoU untuk penanganan medis ditempat untuk gajah terlaksana • 3 tempat translokasi untuk orangutan dipersiapkan		

Deskripsi		Program dan Kegiatan Kunci	Indikator Verifikasi	Strategi	Skala Prioritas
Hasil yang diharapkan	**Sasaran**	**4. Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem**			
Demplot untuk restorasi ekologi secara ilmiah didirikan dan diperluas	Untuk mendirikan dan memperluas *demplot* untuk restorasi ekologi secara ilmiah.	4.1. Melakukan identifikasi lokasi yang dirambah.	3000 ha of wilayah direstorasi	Pertemuan rutin, asesmen, strategi dan mekanisme penanaman, kunjungan lapangan	1
		4.2. Melakukan restorasi berbasis Kemitraan Konservasi.	15 kelompok Kemitraan Konservasi dibentuk		
		4.3. Mengadakan koridor restorasi penghubung untuk satwa liar.	1 koridor restorasi penghubung untuk satwa liar		
		4.4. Membangun pusat Kemitraan Konservasi di lokasi proyek yang ditetapkan dan disepakati.	2 pusat Kemitraan Konservasi didirikan		

Deskripsi		Program dan Kegiatan Kunci	Indikator Verifikasi	Strategi	Skala Prioritas
Hasil yang diharapkan	**Sasaran**	**5. Sub-program Penegakan Hukum**			
Ancaman dan kegiatan illegal di TNGL berkurang	Mengurangi ancaman dan kegiatan illegal melalui penegakan hukum.	5.1. Membentuk Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan menentukan pembagian tanggung jawab penegakan hukum, strategi dan target.	10 MMP terbentuk	Pertemuan teratur, mengembangkan strategi dan mekanisme, penyediaan peralatan, kunjungan lapangan dan asesmen.	1
		5.2. Mengembangkan SOP penegakan hukum dan kesepakatan dengan pihak berwenang lain.	1 SOP penegakan hukum dan kesepakatan dikembangkan		
		5.3. Menyediakan perlengkapan pendukung SMART Patrolling di lokasi percontohan (role model)	15 tipe perlengkapan disediakan		
		5.4. Mengadakan SMART patrolling di lokasi percontohan (role model)	100.000 ha wilayah terpatroli		

Deskripsi		Program dan Kegiatan Kunci	Indikator Verifikasi	Strategi	Skala Prioritas
		B. Program Penghidupan			
Hasil yang diharapkan	**Sasaran**	**1. Sub-program Pengembangan Masyarakat**			
Kesejahteraan masyarakat setempat terbarukan dan mendorong partisipasi lokal dalam melestarikan nilai budaya dan alam TNGL.	Meningkatkan manfaat bagi masyarakat setempat sehingga mendorong partisipasi lokal dalam melestarikan nilai budaya dan alam TNGL.	1.1. Mengembangkan organisasi masyarakat dalam bidang penghidupan.	20 organisasi masyarakat dalam bidang penghidupan dibentuk/diperkuat.	Asesmen, pertemuan regular, pelatihan dan bimbingan, kunjungan lapangan.	1
		1.2. Mengadakan pelatihan dan bimbingan tentang penguatan lembaga untuk menentukan strategi, target, dan kegiatan.	10 pelatihan dan bimbingan tentang penguatan lembaga dilakukan.		
		1.3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pertanian/wanatani dengan mengembangkan produk hutan non-kayu yang dikelola oleh kelompok masyarakat (perikanan, penangkaran burung, pertanian lebah, tanaman herbal dan obat-obatan, anggrek dan persemaian tanaman penghasil lainnya.	1.000 ha wanatani dikembangkan di lokasi percontohan.		
		1.4. Membentuk masyarakat petani berkelanjutan dan peternakan.	30 pelatihan pengembangan hasil hutan non-kayu kepada masyarakat telah dilakukan.		
		1.5. Mengembangkan penanaman pohon dan pohon pakan untuk satwa, oleh masyarakat, dilokasi yang telah ditetapkan.			
		1.6. Mengadakan pelatihan pembuatan produk lokal, sehingga menciptakan keragaman produk lokal (contoh. Produk kerajinan tangan berbahan pandan dan bambu, makanan khas setempat, obat-obatan lokal)	15 pelatihan pembuatan produk lokal, mulai dari proses dan sampai selesai.		
		1.7. Membangunan jaringan produsen produk lokal ke pasar.	10 pertemuan bisnis antara jaringan penjual-pembeli		
		1.8. Menghubungkan petani ke industry pariwisata dan pemangku kepentingan terkait (masyarakat wanatani, hasil pertanian dan peternakan ke restoran atau penginapan)	5 MoU antara organisasi masyarakat dengan pembeli/industri		

Deskripsi		Program dan Kegiatan Kunci	Indikator Verifikasi	Strategi	Skala Prioritas
Hasil yang diharapkan	**Sasaran**	**2. Sub-program Ekowisata**			
Pengembangan ekowisata berkelanjutan diterapkan	Menerapkan pengembangan ekowisata berkelanjutan.	2.1. Mengembangkan desain tapak untuk setiap tujuan wisata utama di Wilayah III	5 desain tapak tujuan ekowisata dikembangkan	Pertemuan rutin, asesmen, survei, kunjungan lapangan, pelatihan dan bimbingan, kemitraan, pengembangan *online* dan *offline media*.	1
		2.2. Memperkuat organisasi masyarakat di bidang ekowisata yang sudah ada, dan menyelaraskan dengan organisasi pemerintah terkait.	10 pertemuan untuk penguatan organisasi masyarakat.		
		2.3. Mengadakan asesmen untuk inventarisasi, identifikasi dan menentukan atraksi wisata utama demi penganekaragaman produk wisata. 2.4. Membangun mekanisme pengelolaan pengunjung di tempat wisata utama.	30 asesmen dan pertemuan untuk inventarisasi, identifikasi/penentuan atraksi wisata utama dan membangun mekanisme pengelolaan		
		2.5. Mengadakan pelatihan pengenalan ekowisata di lokasi wisata utama. 2.6. Mengadakan pelatihan dan bimbingan pengelolaan dan operasional perjalanan wisata (misal. Pembuatan jadwal dan biaya perjalanan wisata). 2.7. Mengadakan pelatihan dan bimbingan tentang dasar-dasar pemanduan wisata, teknis interpretasi, Bahasa asing dan pelayanan prima untuk pemandu wisata setempat.	30 pelatihan dan bimbingan tentang panduan ekowisata, teknik interpretasi, Bahasa asing, layanan prima dan pengembangan media *online*.		
		2.8. Mengadakan pelatihan dan bimbingan pengembangan media *online* dan *offline* (misal. *Website*, media sosial dan penulisan isi (*content*)			
		2.9. Menelaah, identifikasi dan melaksanakan rencana branding ulang Bukit Lawang dan Tangkahan.	2 Rencana branding ulang dilaksanakan.		

Deskripsi		Program dan Kegiatan Kunci	Indikator Verifikasi	Strategi	Skala Prioritas
Hasil yang diharapkan	**Sasaran**	**2. Sub-program Ekowisata**			
Pengembangan ekowisata berkelanjutan diterapkan	Menerapkan pengembangan ekowisata berkelanjutan.	2.10. Melakukan pemasaran dan promosi *online* dan *offline*.	72 post di sosial media dan 3 tipe promosi *offline* dipublikasikan.	Pertemuan rutin, asesmen, survei, kunjungan lapangan, pelatihan dan bimbingan, kemitraan, pengembangan online dan offline media.	1
		2.11. Mengadakan sesi berbagi pengetahuan dan studi banding ekowisata ke Taman Nasional lain yang memiliki model ekowisata serupa dengan TNGL BPTN Wilayah III.	1 sesi berbagi, studi banding telah dilakukan dan dipublikasikan		
		2.12. Membangun kemitraan dengan pihak swasta (misal. Jaringan bisnis antara pemandu wisata setempat dengan agen perjalanan yang memiliki pasar lebih luas, menjalin komunikasi dengan penyedia jasa dan Bank untuk bekerjasama mengembangkan fasilitas dan juga promosi bersama)	2 MoU kemitraan dengan pihak swasta dan 3 kesepakatan bisnis dengan operator perjalanan dan agen perjalanan telah dibangun		

Tabel 12. Program, Estimasi Anggaran Indikatif dan Lini Waktu

Strategi	Program dan Kegiatan	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu 2019	2020	2021	2022	2023
				Total					
Pertemuan stakeholder rutin, fasilitasi peralatan dan pembangunan infrastruktur, patroli, survey dan kunjungan lapangan	**1. Sub Program Pengelolaan dampingan dan Pengelolaan Kawasan**			73.570					
	1.1 Pertemuan Pengelolaan dampingan (koordinasi dan sosialisasi ke stakeholders penting)	7 Resort	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, YAHUA, WCS, Vesswic	23.571	11.786	11.786			
	1.2 Perencanaan dan Pelaporan Kuartal secara Partisipatif			12.857	4.286	4.286	4.286		
	1.3 Demarkasi, Monitoring dan Formulasi Peraturan Zonasi untuk Memperkuat Mekanisme dan sistem pengawasan tata batas1			8.571	8.571				
	1.4 Membangun pos jaga dan penanda batas di lokasi yang ditetapkan di TNGL Kawasan III			28.571	14.286	14.286			
Pertemuan stakeholder rutin, fasilitasi peralatan dan pembangunan infrastruktur, organisir acara, pengembangan media daring dan luring	**2. Sub Program Penjangkauan Masyarakat dan Kesadartahuan Konservasi**			198.928					
	2.1. Membangun pusat konservasi untuk Pendampingan masyarakat dan pendidikan Lingkungan	6 Resorts	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, YAHUA, HPI Langkat, Medan Bisnis, Analisa, Waspada, KISS Fm, Mongabay Indonesia	42.857	14.286	14.286			
	2.2. Melaksanakan rangkaian edukasi konservasi dan sosialisai peraturan kehutanan ke stakeholder penting			12.857	4.286	4.286		4.286	
	2.3. Menyusun strategi dan target penjangkauan masyarakat			9.857	2.571	2.571		2.571	
	2.4. Melaksanakan penjangkauan siswa dan Sosialisasi lewat kemah konservasi dan Kunjungan sekolah bagi remaja			21.929	7.071	7.429		7.429	
	2.5. Melaksanakan program relawan bagi anak sekolah di sekitar kawasan TNGL			10.714	3.571	3.571		3.571	
	2.6. Mengembangkan kesadartahuan konservasi Lewat promosi media daring dan luring			6.071	4.643	357		357	
	2.7. Memasang papan tanda, interpretasi alam dan fasilitas serta material edukasi di lokasi Strategis			5.357	2.143	2.143		1.071	

	2.8. Melaksanakan festival/konser musik hutan nasional (mis. Jazz di hutan)	89.286	17.857	17.857	17.857	17.857

Strategi	Program dan Kegiatan	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu 2019	2020	2021	2022	2023
				Total					
Pertemuan stakeholder rutin, penyusunan metodologi, kunjungan lapangan survey dan untuk pengumpulan data, pelaporan dan presentasi data	**3. Sub Program Inventarisasi, Identifikasi dan Monitoring Keanekaragaman Hayati**			114.303					
	3.1. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan tentang inventarisasi, identifikasi dan monitoring keanekaragaman hayati dengan memperkenalkan metode dan perangkat yang relevan kepada petugas resort kelompok masyarakat terpilih	6 Resorts	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, Vesswic, WCS, Fak. Kehutanan – Universitas Sumatera Utara, Jurusan Konservasi Margasatwa – Fak. Kedokteran Hewan Universitas Syiahkuala	14.286	14.286				
	3.2. Melaksanakan inventarisasi keanekaragaman hayati, identifikasi, survey dan monitoring spesies kunci, kelompok secara teratur dan bersama-sama berbasis resort dan masyarakat			25.714	8.571	8.571	8.571		
	3.3. Menyediakan peralatan untuk inventarisasi keanekaragaman hayati, identifikasi, survey dan monitoring spesies kunci, kelompok spesies dan habitat			3.571	3.571				
	3.4. Melaksanakan identifikasi, implementasi dan monitoring Resolusi konflik margasatwa dan potensi bencana alam			42.875	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714
	3.5. Mendirikan menara pengamat untuk pengamatan spesies kunci			15.000	15.000				
	3.6. Menyusun prosedur (SOP) untuk penanganan dengan aman dan pengobatan medis spesies kunci			5.714	5.714				
	3.7. Membangung jaringan dan kolaborasi dengan universitas dan dokter hewan terkait penanganan dengan aman dan pengobatan medis spesies kunci di lokasi			7.143	3.571	3.571			

Strategi	Program dan Kegiatan	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu 2019	2020	2021	2022	2023
				Total					
Pertemuan rutin, penilaian, strategi dan mekanisme penanaman, kunjungan lapangan	**4. Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem**			282.142					
	4.1. Melaksanakan identifikasi lokasi perambahan	4 Resort	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, WCS, (Kemitraan Konservasi), BPSKL	3.571	3.571				
	4.2. Melaksanakan restorasi berbasis kemitraan konservasi			267.857	53.571	53.571	53.571	53.571	53.571
	4.3. Melaksanakan restorasi dan konektivitas koridor Margasatwa								
	4.4. Mendirikan pusat kemitraan konservasi di lokasi yang sudah ditentukan dan disepakati			10.714		5.357	5.357		
Pertemuan rutin, penyusunan mekanisme dan strategi, pengadaan peralatan, kunjungan dan penilaian lapangan.	**5. Sub Program Penegakan Hukum**			167.857					
	5.1. Membentuk patroli warga (MMP) dengan menentukan pemisahan tanggung jawab penegakan hukum dan menentukan strategi dan target	6 Resort	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, YAHUA, WCS, Balai Gakkum, Kepolisian Daerah Sumatera Utara	21.429	21.429				
	5.2. Menyusun protokol penegakan hukum dan membuat kesepakatan dengan kantor pemerintah setempat lainnya			15.000	15.000				
	5.3. Menyediakan peralatan untuk mendukung Patroli SMART di lokasi-lokasi *role model*			28.571	28.571				
	5.4. Melaksanakan patroli SMART di lokasi-lokasi *role model*			102.857	25.714	25.714	25.714	25.714	25.714

Strategi	Program dan Kegiatan	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu 2019	2020	2021	2022	2023
				Total					
Penilaian, Pertemuan rutin, Pelatihan dan pendampingan, kunjungan lapangan	**6. Sub Program Pendampingan Masyarakat**			171.248					
	6.1. Membentuk organisasi berbasis masyarakat untuk mata pencaharian	6 Resort	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, HPI, LPT Tangkahan, Kelompok Ekowisata Batu Katak	7.143	3.572	3.572			
	6.2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan tentang penguatan kelembagaan guna mendefinisikan strategi, target dan kegiatan			10.714	5.357	5.357			
	6.3. Melaksanakan penguatan hutan desa/*agroforestry* Dengan melakukan pengembangan produk hasil hutan non kayu berbasis masyarakat (mis. perikanan, budidaya burung, peternakan lebah madu, herba, tanaman obat, pembibitan anggrek dan tanaman produktif lain)			35.714	17.857	17.857			
	6.4. Melaksanakan pertanian dan peternakan berkelanjutan berbasis masyarakat			21.249	7.143	7.143	7.143		
	6.5. Melaksanakan penanaman pohon dan tanaman pakan satwa berbasis masyarakat di lokasi yang sudah disepakati			53.571	17.857	17.857	17.857		
	6.6. Melakukan pelatihan terkait pembuatan produk lokal, untuk menghasilkan proses dan paska produksi Yang lebih beragam (mis. produk kerajinan tangan pandan, produk bambu, makanan daerah, pengemasan tanaman obat)			21.429	10.715	10.715			
	6.7. Membangun jaringan bagi pembuat produk lokal dan menghubungkannya dengan pasar			14.286	7.143	7.143			
	6.8. Membangun jaringan petani dengan industri pariwisata dan pemangku kepentingan penting lain (*agroforestry* masyarakat, produk pertanian dan peternakan ke restoran/akomodasi)			17.857	7.143	10.714			

Strategi	Program dan Kegiatan	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu 2019	2020	2021	2022	2023
				Total					
	7. Sub program Ekowisata			194.287					
Pertemuan rutin, penilaian, survey, kunjungan lapangan, pelatihan dan pendampingan, acara kemitraan, pengembangan media daring dan luring	7.1. Menyusun master plan spesifik untuk masing-masing destinasi wisata prioritas di BPTN III	6 Resort	YOSL-OIC, YEL-SOCP, Scorpion, YPOI, HPI, LPT Tangkahan, Kelompok Ekowisata Batu Katak	21.429	12.857	8.572			
	7.2. Memperkuat organisasi ekowisata berbasis masyarakat yang telah ada saat ini dan sinergi dengan lembaga pemerintah			10.714	10.714				
	7.3. Melaksanakan penilaian untuk menginventaris, mengidentifikasi, dan menyusun prioritas tujuan wisata guna diversifikasi produk-produk pariwisata			42.857	21.429	21.429			
	7.4. Menetapkan mekanisme pengelolaan pengunjung dan monitoring di lokasi-lokasi wisata prioritas			5.714	5.714				
	7.5. Melaksanakan pelatihan tentang pengenalan ekowisata di lokasi-lokasi wisata prioritas			7.143	7.143				
	7.6. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan terkait operasional dan pengelolaan tur (mis. *itinerary* dan pembuatan penawaran paket tur)			21.429	10.715	10.715			
	7.7. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan terkait dasar-dasar kepemanduan, interpretasi, dasar-dasar bahasa asing dan pelayanan prima kepada pemandu lokal			21.429	10.715	10.715			
	7.8. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan media daring (mis. *website*, media sosial dan penulisan konten)			14.286	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857

Strategi	Program dan Kegiatan	Lokasi	Stakeholder	Anggaran Indikatif	Lini Waktu 2019	2020	2021	2022	2023
				Total					
	7. Sub program Ekowisata								
Pertemuan rutin, penilaian, survey, kunjungan lapangan, pelatihan dan pendampingan, acara kemitraan, pengembangan media daring dan luring	7.9. Meninjau, mengidentifikasi dan melaksanakan rencana *re-branding* Bukit Lawang dan Tangkahan			14.286	7.143	7.143			
	7.10. Melaksanakan promosi dan pemasaran daring dan luring			14.286	11.429	714	714	714	714
	7.11. Melaksanakan sesi pembelajaran bersama dan studi banding ekowisata ke taman nasional lain yang sesuai dan menyediakan model yang dapat diterapkan bagi lokasi wisata prioritas di BPTN III			2.857		2.857			
	7.12. Menjalankan kemitraan sektor swasta (mis. jaringan usaha dan hubungan usaha antara *tour operator* lokal dengan *travel agent* yang memiliki koneksi pasar yang lebih besar, melibatkan penyedia layanan komunikasi dan bank dalam kerjasama mengembangkan fasilitas sederhana dan promosi bersama).			17.857	7.143	7.143	3.571		

Tabel 13. Ringkasan Rencana Kegiatan, Anggaran dan Lini waktu

Programme	Indicative Budget (€)		2019				2020				2021				2022				2023			
	SGP-ACB	Other contribution	Phases				Phases				Phases				Phases				Phases			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Biodiversity Programme																						
1.1. Co-Management and Area Management Sub-Programme	25,000	53,570																				
1.2. Community Outreach and Conservation Awareness Sub-programme	45,000	173,928																				
1.3. Biodiversity Inventory, Identification and Monitoring Sub-Programme	60,000	89,303																				
1.4. Ecosystem Restoration and Rehabilitation Sub-programme	70,000	242,142																				
1.5. Law Enforcement Sub-programme	40,000	137,857																				
2. Livelihood Programme																						
2.1. Community Development Sub-Programme	170,000	1,248																				
2.2. Ecotourism Sub-Programme	190,000	4,287																				

5.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring and Evaluation Berdasarkan Keseimbangan Skor

Monitoring dan evaluasi *balanced scorecard* (BSC) adalah sistem pengelolaan dan perencanaan strategis yang digunakan organisasi untuk mengkomunikasikan apa yang ingin mereka capai dan mengukur serta memantau perkembangan menuju target-target strategis (www.balancedscorecard.org). Sistem monitoring dan evaluasi BSC menghubungkan elemen-elemen strategi sepeti misi (tujuan), visi (apa yang kita cita-citakan), nilai-nilai dasar (apa yang kita percaya), area-area fokus strategis (tema, hasil dan/atau tujuan) dan elemen-elemen yang lebih operasional seperti sasaran (kegiatan-kegiatan peningkatan berkelanjutan), ukuran atau indikator kunci performa, atau KPI, yang melacak performa strategis, target (tingkat performa yang diharapkan) dan tindakan.

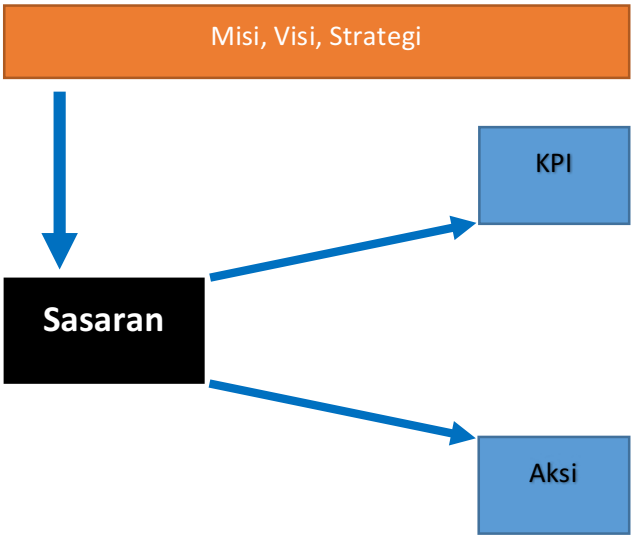

Bagan 3. Balance scorecard untuk mengelola proyek

Key Performance Indicators

Di dalam sasaran kegiatan CMP, Key Performance Indicators (KPI) diidentifikasi dan dilacak seiring perjalanan waktu guna mengukur kemajuan terhadap keluaran yang diharapkan. Dengan demikian KPI akan digunakan untuk memonitor implementasi dan efektifitas strategi-strategi RPK, menentukan kesenjangan antara performa sesungguhnya dan yang ditargetkan serta menentukan efektifitas dan efisiensi operasional dalam pelaksanaan rencana aksi yang dituangkan dalam strategi CMP.

Implementasi BSC untuk monitoring dan evaluasi akan dilakukan menggunakan *template* berikut yang disarankan:

	Sasaran	KPIs	Target	Keluaran
Kegiatan	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..
Kegiatan	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..
Kegiatan	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..
Kegiatan	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..	• .. • .. • ..

5.4 Manajemen Pengetahuan

Pengetahuan dalam suatu organisasi adalah kumpulan keahlian, pengalaman dan informasi yang digunakan individu dan kelompok kerja selama pelaksanaan tugas mereka. Ini diproduksi dan disimpan oleh pikiran individu, atau secara implisit dikodekan dan didokumentasikan dalam proses organisasi, layanan dan sistem.

Sebagai pendekatan, Manajemen Pengetahuan (KM) memandang pengetahuan sebagai aset utama organisasi dan secara sistematis mengembangkan kegiatan untuk mengelolanya secara efisien. Tujuan utama Manajemen Pengetahuan adalah untuk mempromosikan pertumbuhan pengetahuan, komunikasi pengetahuan dan pelestarian pengetahuan (Steels 1993).

KM digunakan untuk memecahkan masalah, untuk mengarahkan tindakan dan membuat keputusan, bersama dengan pelajaran yang didapat. Pengetahuan dapat didistribusikan secara geografis dan disimpan dalam pikiran orang. Dengan demikian Knowledge Management System (KMS) dibuat untuk menyediakan mekanisme untuk menangkap, mempertahankan dan mendistribusikan aset yang sudah diketahui di dalam dan di antara agen organisasi, dan harus dalam bentuk siklus hidup untuk dapat mendistribusikan dan mendistribusikan kembali misi dan tujuan organisasi.

6

PENUTUP

6. PENUTUP

Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dimaksudkan sebagai panduan bagi petugas TNGL dalam merespon tantangan-tantangan pengelolaan, melalui kolaborasi aktif dan partisipatif dengan pemangku kepentingan yang disepakati. Dokumen ini dibangun melalui proses bottom-up dimana masyarakat sebagai pusat perhatian. Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa pengelolaan TNGL telah berjalan tanpa dampak yang layak bagi masyarakat, dan itu tidak sejalan dengan paradigma konservasi di seluruh dunia yang telah bergeser kepada "*people first*" dari yang sebelumnya semata-mata melestarikan ekologi dan keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, dalam artian tersebut, CMP untuk TNGL akan terpusat pada dua program utama, yakni Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Mata Pencaharian, yang merupakan mandat dari SGP-ACB. Harapan keseluruhan dari kedua program adalah disediakannya solusi yang dapat diterapkan guna mengatasi masalah-masalah kompleks yang telah bertahun-tahun tidak terselesaikan. Yakni, konflik tenurial, konflik manusia-satwa, perambahan, dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari TNGL dan pada saat bersamaan menjaga upaya-upaya konservasi TNGL.

Sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan agar berpartisipasi menyumbangkan waktu dan sumber daya dalam menjalankan strategi dan kegiatan-kegiatan kunci bersama-sama. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat lokal juga amat penting dan telah lama menjadi strategi pembangunan dalam mensinergikan pembangunan ekonomi dan konservasi. Sehingga, kegiatan-kegiatan yang direncanakan juga meletakkan perhatian lebih banyak kepada pendampingan masyarakat dan strategi peningkatan kapasitas secara *bottom-up.*

References

Anonim, 2011. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan PermenLHK No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Anonim. 2015. Dirjen KSDAE, KLHK. 2015. *Pedoman Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Jakarta.

Borrini-Feyerabend, G, et al. 2007. *Co-Management of Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning by Doing.*

Borrini-Feyerabend, G. 2015. *Governance Diversity, Quality and Vitality: to- wards Shared Language and more Secure and Lasting Prospects for the Conserva- tion of Nature*. Presentasi di Workshop COMACON Bangkok: Oktober, 2015

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2017. *Kabupaten Langkat dalam Angka 2017.* Langkat, 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2017. *Kecamatan Batang Serangan dalam Angka 2017.* Langkat, 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2017. *Kecamatan Sei Bingai dalam Angka 2017*. Langkat, 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2017. *Kecamatan Besitang dalam Angka 2017*. Langkat, 2017.

Laurance William F., Goosem, Miriam and G.W. Laurance, Susan. *Impacts of Roads and Linear Clearings on Tropical Forests.* Trends in Ecology and Evolution Vol. 24 no. 12. Dec 24th, 2009.

McCarthy, J. 2006. Fourth Circle: *A political Ecology of Sumatera's Rainforest Frontier*. Standforf University Press. Satndford, California. Page 218.

Desa Perkampungan Bukit Lawang, 2017. *Profil Desa Perkampungan Bukit Lawang 2017*.

Desa Desa Timbang Jaya, 2017. *Profil Desa Timbang Jaya 2017*.

Desa Desa Sampe Raya, 2017. *Profil Desa Sampe Raya 2017*.

Desa Batu Jonjong, 2017. *Profil Desa Batu jonjong 2017*.

Desa Sungai Musam, 2017. *Profil Desa Sungai Musam 2017*.

Stolton, S. and N. Dudley. 2016. *METT Handbook: A guide to using the Management Effectiveness Tracking Tool (METT*), WWF-UK.

Supriatna, Jatna. 2014. *Berwisata Alam di Taman Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia*. Jakarta. Page 67.

UNESCO Annual Report 2015. UNESCO Office Jakarta, 2016.

www.gunungleuser.or.id accessed on July 2nd, 2018.

www.balancedscorecard.org accessed on July 13th, 2018.

www.ekowisata.org/map.php accessed on July 2nd, 2018

Vasconcelos, J., Seixas, P., Chris, K., Lemos, P. (2005), *Knowledge Management in Non-Governmental Organizations: A Partnership for the Future*, Proceedings of the 7th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2005), Miami, USA, May 24-28, ISBN: 972-8865-19-8.

Daftar Lampiran

1. MoU TNGL dengan pemerintah kabupaten
2. Daftar spesies kunci
3. Kuisioner – Daftar pertanyaan untuk FGD dengan petugas resort
4. Peta zonasi, peta tematik dan Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial

Lampiran 1. MoU TNGL dengan pemerintah kabupaten

MoU GLNP with Langkat District Government

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
DENGAN
BUPATI LANGKAT

Nomor : PKS. 84 /BBTNGL-KBTU/PKS/2/2018
Nomor : 16 / SPJ / BUP / 2018

TENTANG
PENGUATAN FUNGSI KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
DI WILAYAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. Misran, MM**
   NIP : 19621212 199303 1 001
   Alamat : Jl. Selamat No. 137 Kel. Sitirejo III, Medan Amplas, Medan 20219
   Telp.: 061 – 7872919, Fax.: 061 – 7864510
   Jabatan : Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser
   Berdasarkan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.887/MENLHK/SETJEN/PEG.2/11/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **H. Ngogesa Sitepu, SH**
   Alamat : Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat
   Telp.: (061) – 8910200
   Jabatan : Bupati Langkat
   Berdasarkan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.12-135 tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser merupakan Unit Pelaksana Teknis pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Kabupaten Langkat memiliki komitmen kuat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga Penguatan fungsi konservasi Taman Nasional Gunung Leuser diharapkan dapat mempertahankan fungsi kawasan dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan di Kabupaten Langkat;
3. Perjanjian kerjasama ini mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, IKK Direktorat Teknis, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penguatan Fungsi Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser di Wilayah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagaimana berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka:

(1) Penguatan fungsi dan tata kelola kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati Taman Nasional Gunung Leuser; dan
(2) Penguatan pembangunan masyarakat dan wilayah Kabupaten Langkat secara berkelanjutan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

(1) Perlindungan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser;
(2) Pengawetan flora dan fauna Taman Nasional Gunung Leuser;
(3) Pemulihan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser yang terdegradasi;
(4) Pengembangan wisata alam;
(5) Pemanfaatan jasa lingkungan;
(6) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan; dan
(7) Pengembangan kemitraan konservasi.

Lampiran 2. Daftar spesies

No	Key Species
1	Sumateran orangutan (*Pongo abelii)*
2	Sumateran elephant (*Elephas maximus sumateranus)*
3	Sumateran rhinoceros (*Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis)*
4	Malayan sun bear (*Helarctos malayanus)*
5	Sumateran tiger (*Panthera tigris sumaterae)*
Other species	
1	Greater slow loris (*Nycticebus coucang)*
2	Long-tailed macaque (*Macaca fascicularis)*
3	Pig-tailed macaque (*Macaca nemestrina)*
4	Thomas leaf monkey (*Presbytis thomasi)*
5	Lar gibbon (*Hylobates lar)*
6	Siamang (*Symphalangus syndactylus)*

Sumber : Guidebook to The Gunung Leuser National Park, 2009, Yayasan Orangutan Sumatra Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC)

Lampiran 3. Kuisioner – Daftar pertanyaan untuk FGD bersama petugas resort

LEMBAR KERJA PESERTA

Sosialisasi, Kordinasi dan Lokakarya Collaborative Management Plan
Taman Nasional Gunung Leuser
Medan, 19-20 April 2018

I. Informasi Resort

1. Wilayah kerja :……..
2. Luas wilayah : ……
3. Aksesibilitas : ……..
4. Zona : ……..
5. Organisasi
   a) Jumlah karyawan : …….
   b) Komposisi : …….
6. Sarpras
   a) Prasarana : …….
   b) Pendukung operasional : …….
   c) Alat survei : ……
7. Tipologi Wilayah kerja
   a) Tipologi : ……..
   b) Daerah penyangga : ……..
   c) Potensi/fitur-fitur kunci : ……..
   d) 5 ancaman berdasarkan urutan paling tinggi : ……

II. Matriks SWOT

STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)

OPPORTUNITIES (PELUANG)	THREATS (ANCAMAN)

III. Identifikasi kegiatan kunci

Berdasarkan pemetaan potensi dan ancaman di wilayah kerja bapak, kegiatan kunci apa saja yang dapat dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar?

Kegiatan Perlindungan	Kegiatan Pengawetan	Kegiatan Pemanfaatan

Kegiatan Perlindungan	Kegiatan Pengawetan	Kegiatan Pemanfaatan

PETA TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

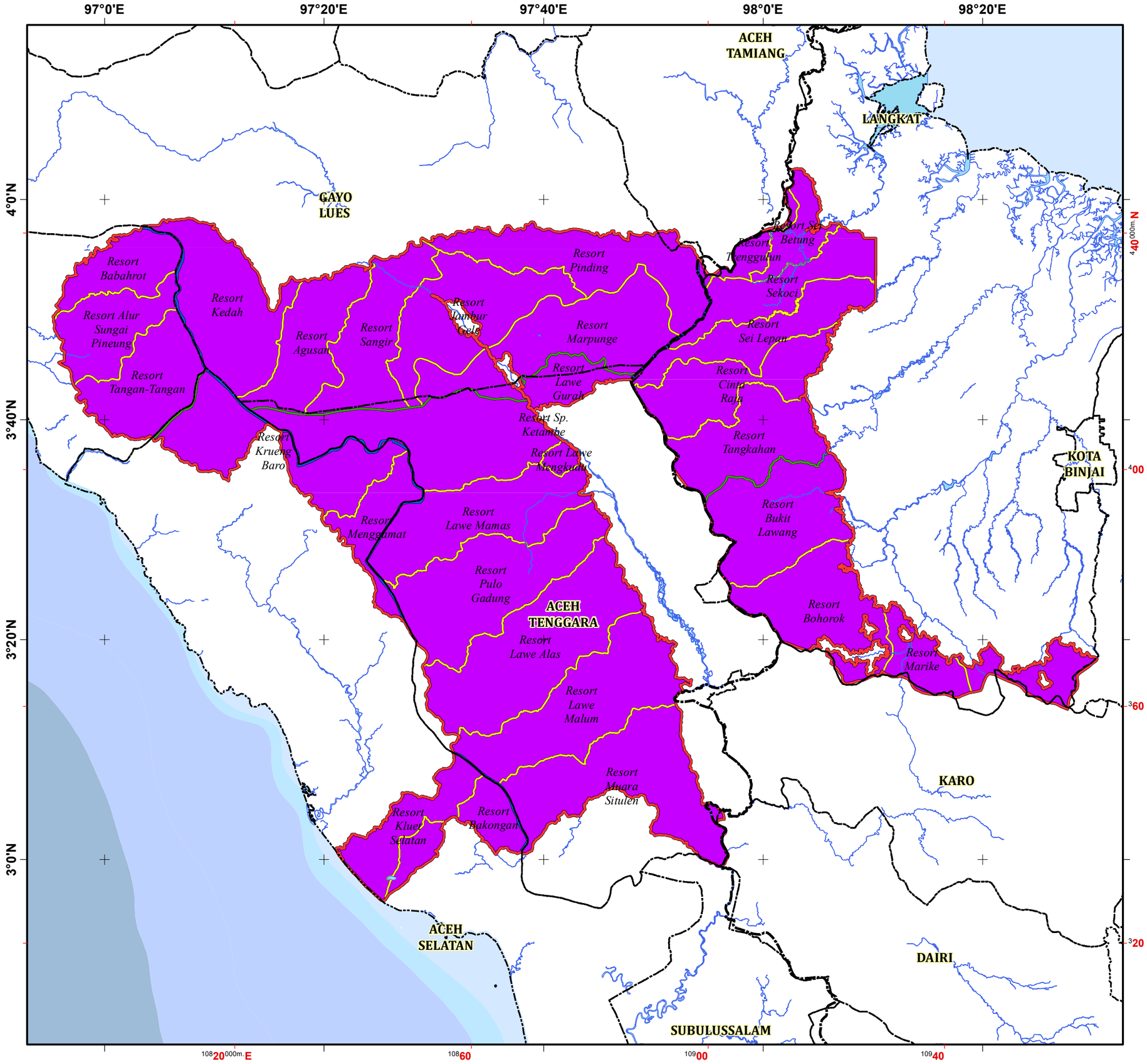

0 4 8 16 24 32
Kilometer

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan jalan
- Sungai
- Laut/Danau
- Batas Taman Nasional
- Batas Wilayah Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Seksi Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Resort Pengelolaan Taman Nasional
- Area TNGL

Sumber Peta :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

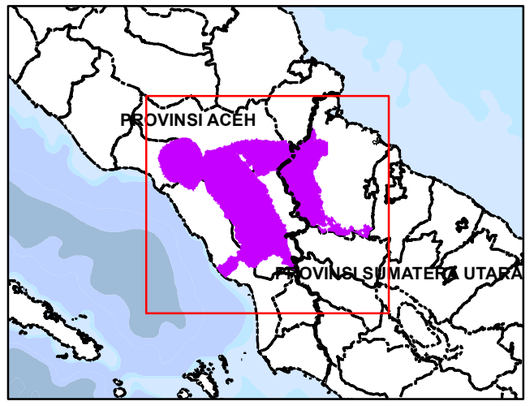

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

PETA ZONASI
TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

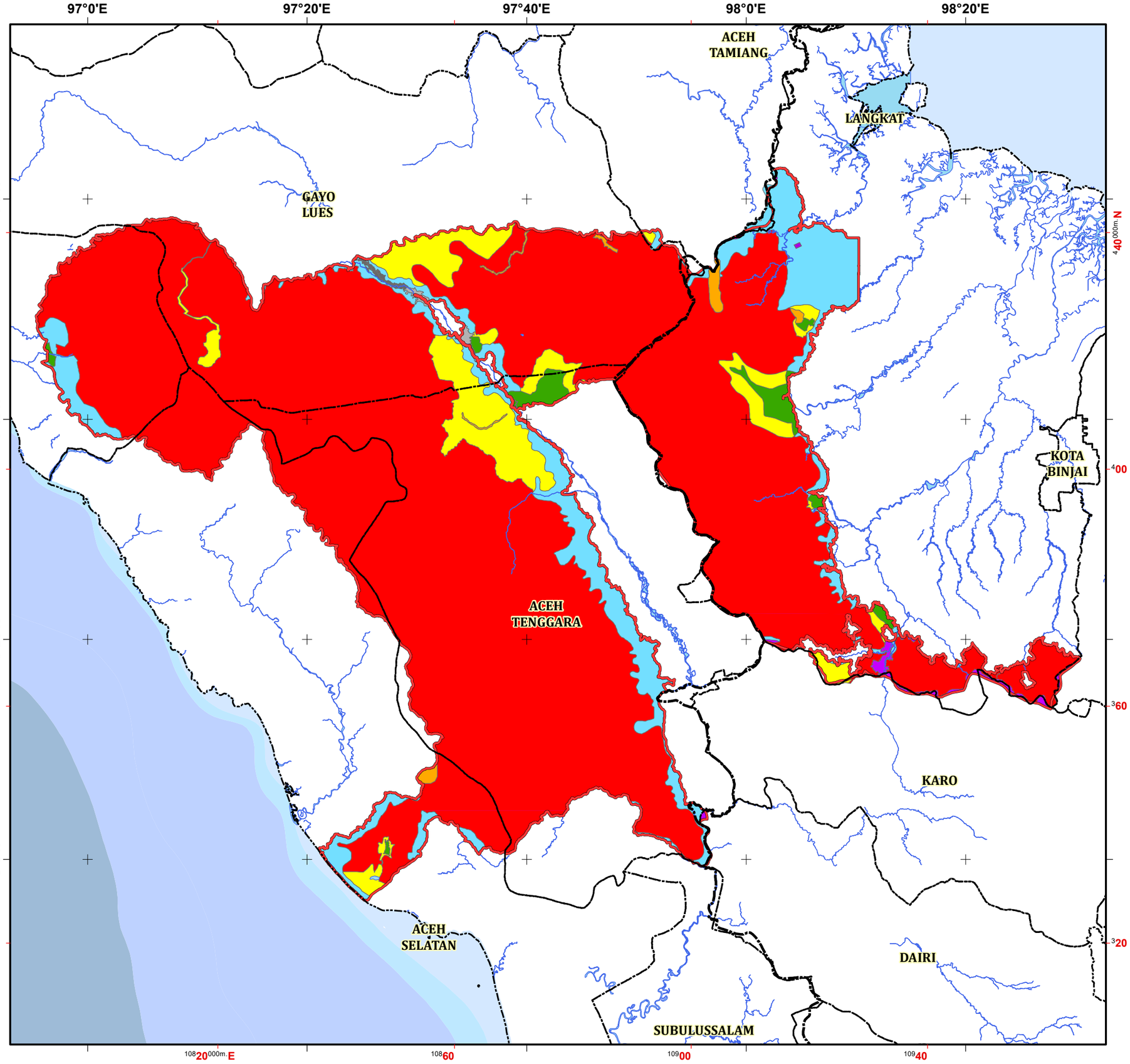

0 4 8 16 24 32
Kilometer

Legends

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Taman Nasional
- Sungai
- Laut/Danau

Zona:

- Zona Abu-abu
- Zona Inti
- Zona Khusus
- Zona Pemanfaatan
- Zona Rehabilitasi
- Zona Religi
- Zona Rimba
- Zona Tradisional

Sumber Peta :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

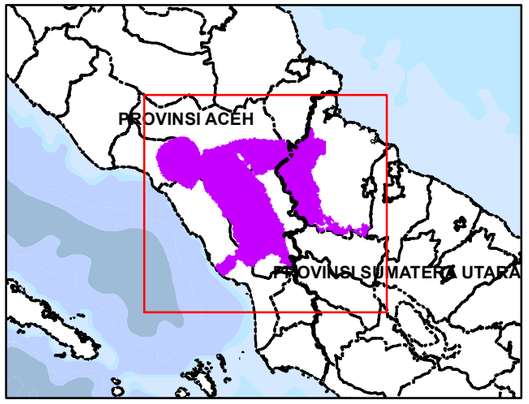

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

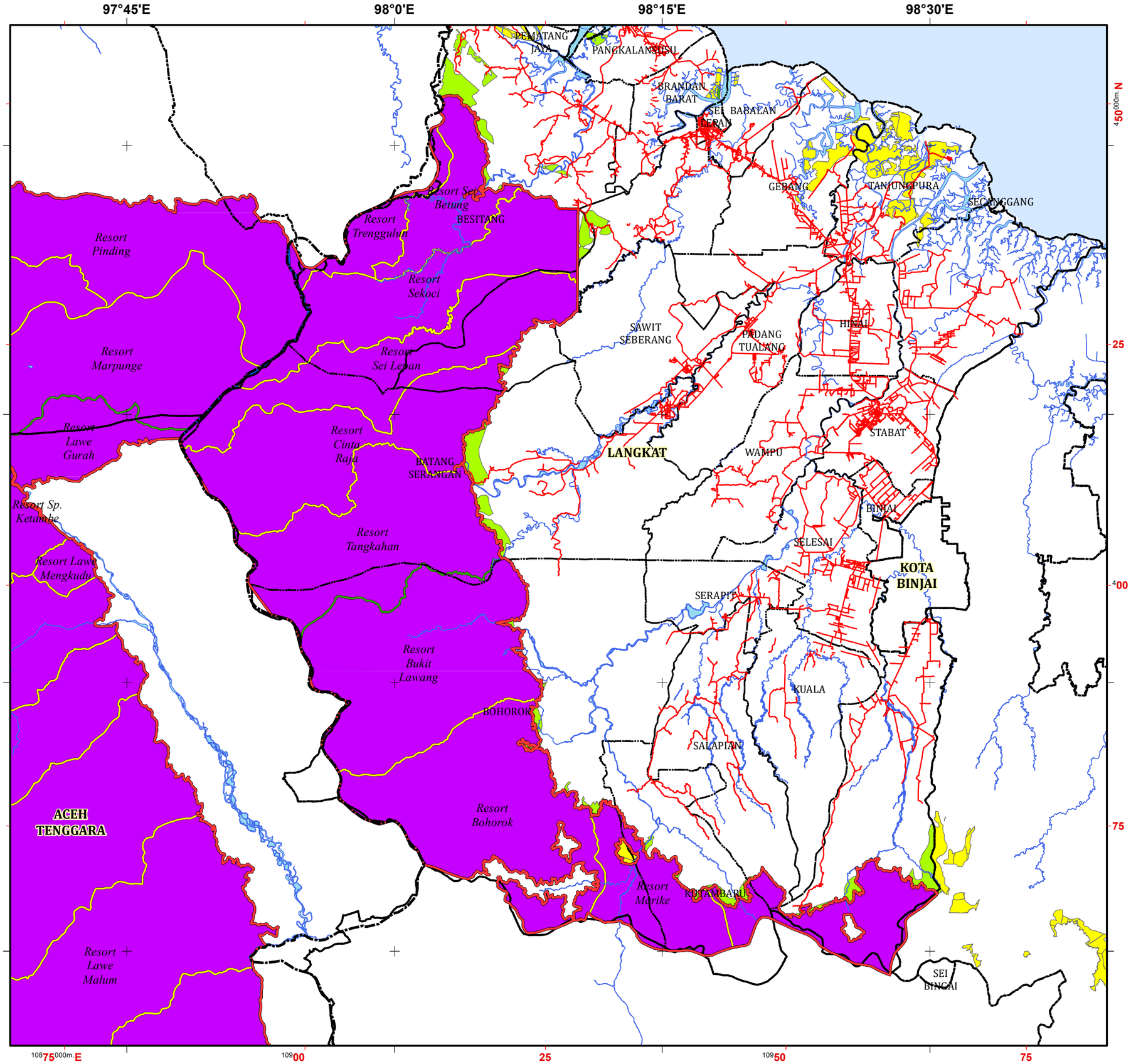

0 3 6 12 18 24
Kilometer

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan jalan
- Sungai
- Laut/Danau
- Batas Taman Nasional
- Batas Wilayah Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Seksi Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Resort Pengelolaan Taman Nasional
- Area TNGL

Fungsi Hutan Perhutanan Sosial

- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Terbatas

Sumber Peta :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

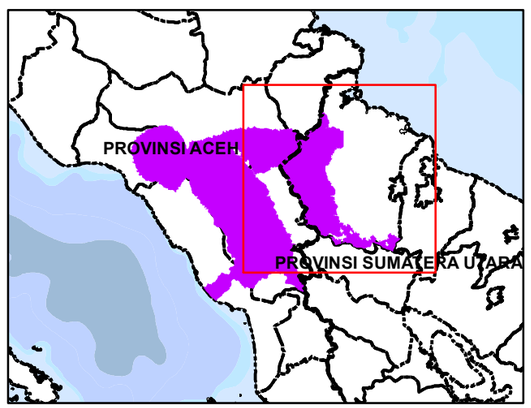

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

PETA Sub-Program
MANAJEMEN PENDAMPINGAN WILAYAH

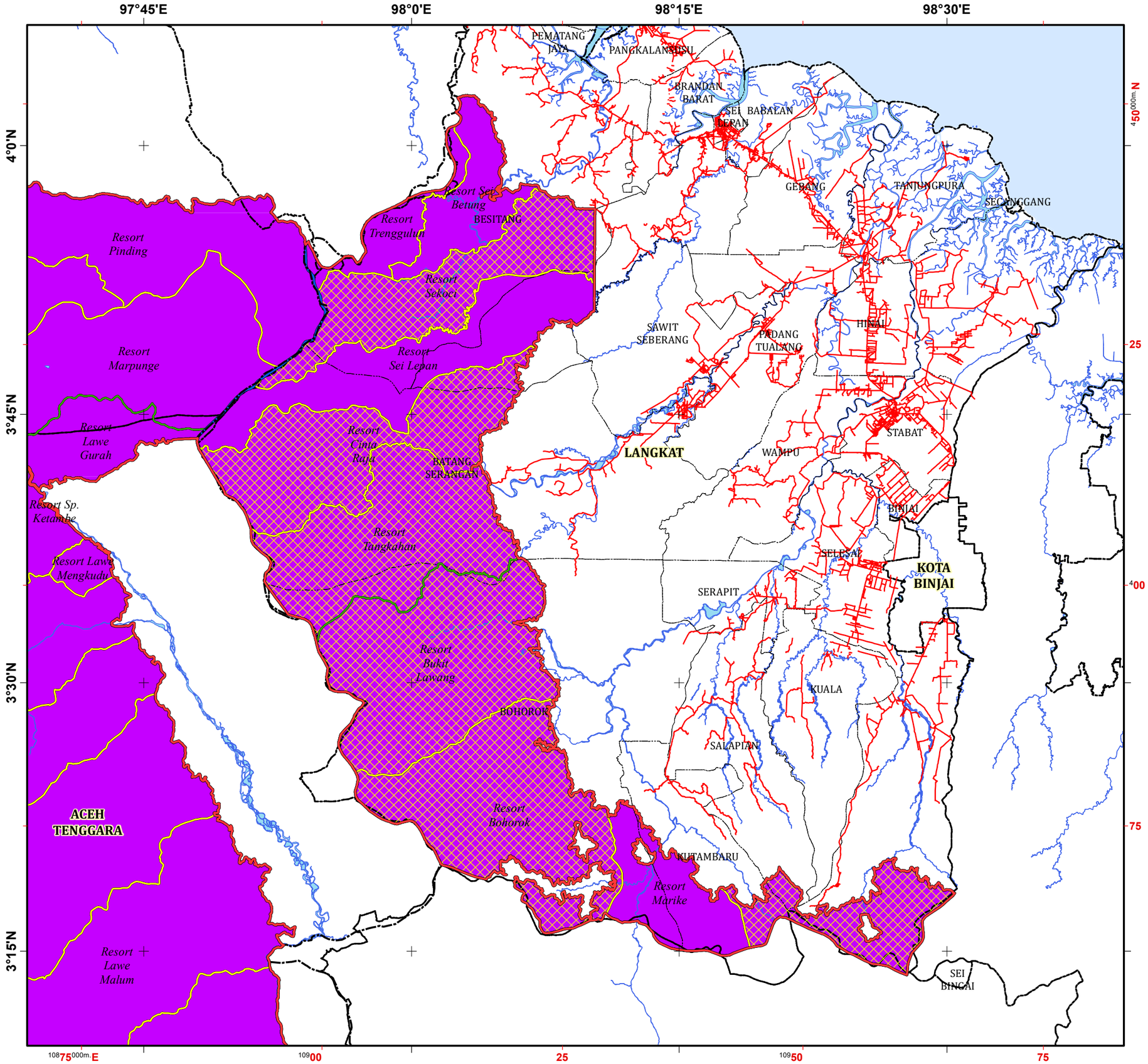

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan jalan
- Sungai
- Laut/Danau
- Batas Taman Nasional
- Batas Wilayah Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Seksi Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Resort Pengelolaan Taman Nasional
- Area TNGL
- Resorts location of Sub-programme

0 3 6 12 18 24
Kilometer

Sumber Peta :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

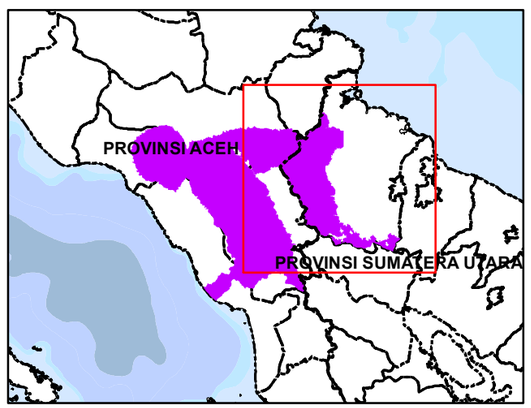

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

PETA Sub-Program PENJANGKAUAN MASYARAKAT DAN PENYADARTAHUAN KONSERVASI

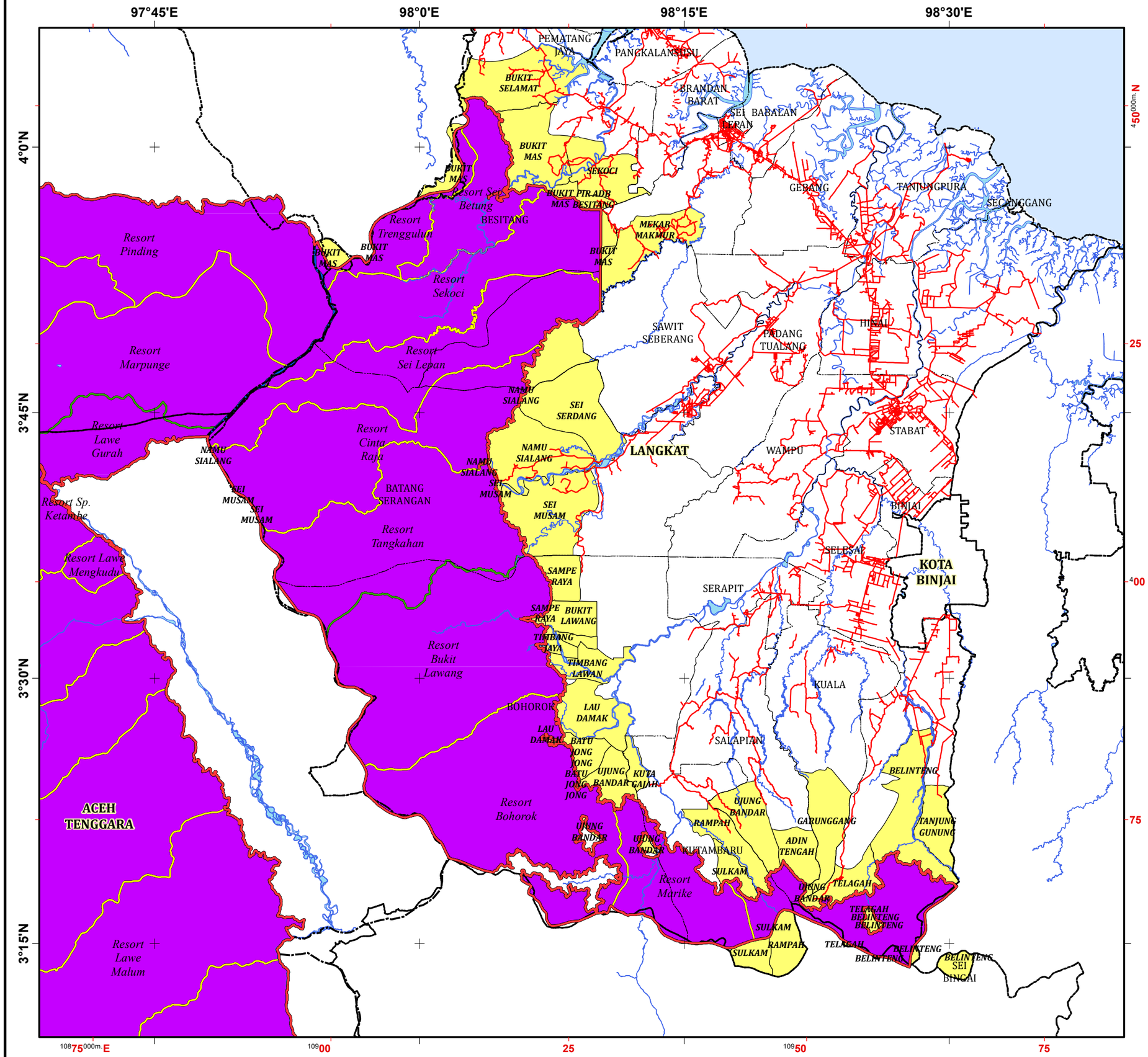

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan jalan
- Sungai
- Laut/Danau
- Batas Taman Nasional
- Batas Wilayah Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Seksi Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Resort Pengelolaan Taman Nasional
- Area TNGL
- Desa di Sekitar TNGL

0 3 6 12 18 24
Kilometer

Sumber Peta :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

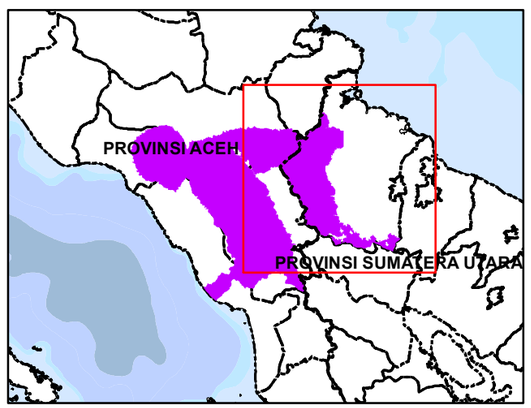

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

PETA Sub-Program INVENTARISIR, IDENTIFIKASI DAN MONITORING KEANEKARAGAMAN HAYATI

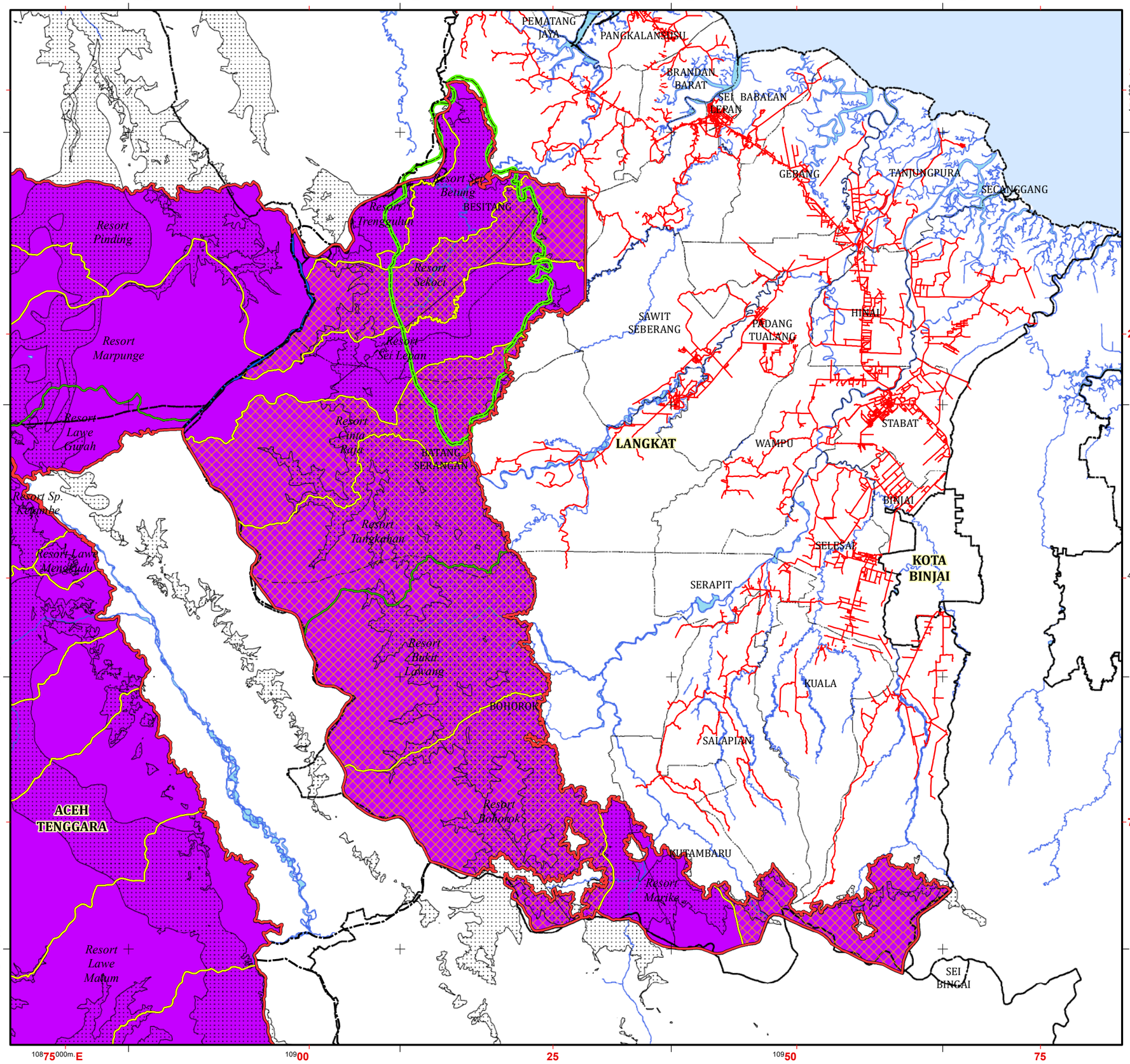

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan jalan
- Sungai
- Laut/Danau
- Batas Taman Nasional
- Batas Wilayah Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Seksi Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Resort Pengelolaan Taman Nasional
- Area TNGL
- Lokasi Resort Sub-program
- Distribusi Orangutan
- Wilayah Distribusi Gajah

N

0 3 6 12 18 24
Kilometer

Sumber Peta :

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional
3. Distribusi Orangutan (Forina 2014)
4. Distribusi Gajah

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

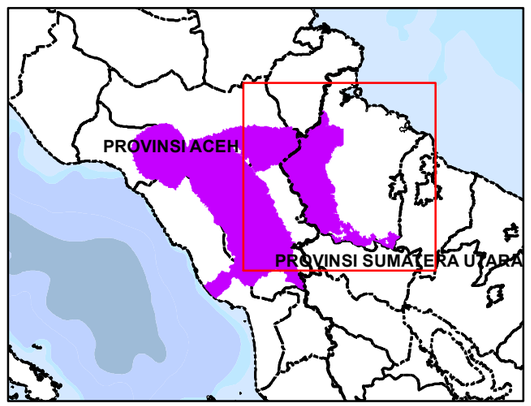

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

PETA Sub-Program RESTORASI DAN REHABILITASI EKOSISTEM

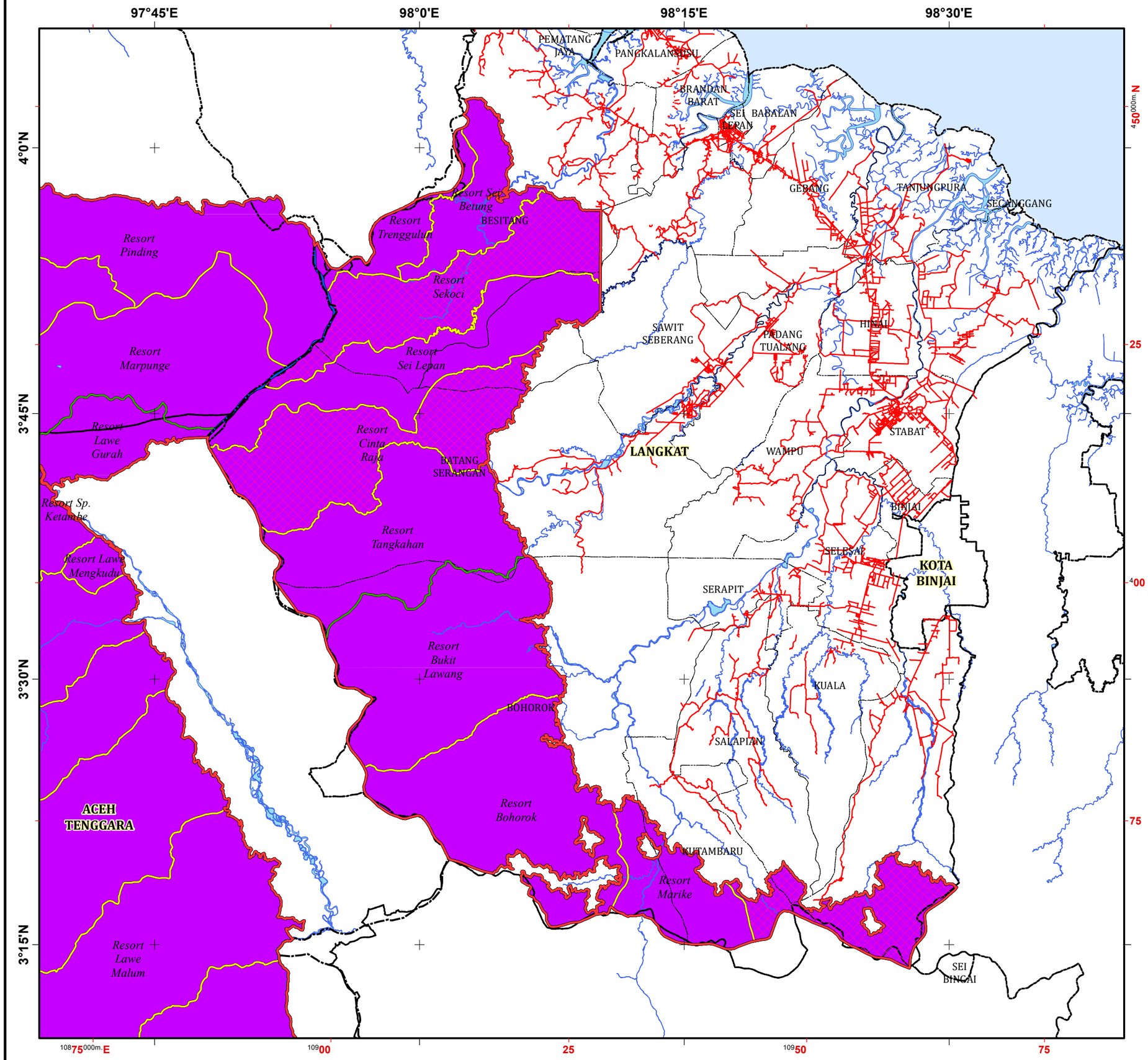

0 3 6 12 18 24
Kilometer

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan jalan
- Sungai
- Laut/Danau
- Batas Taman Nasional
- Batas Wilayah Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Seksi Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Resort Pengelolaan Taman Nasional
- Area TNGL
- Lokasi Resort Sub-program

Sumber Peta :

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional
3. Distribusi Orangutan (Forina 2014)
4. Distribusi Gajah

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

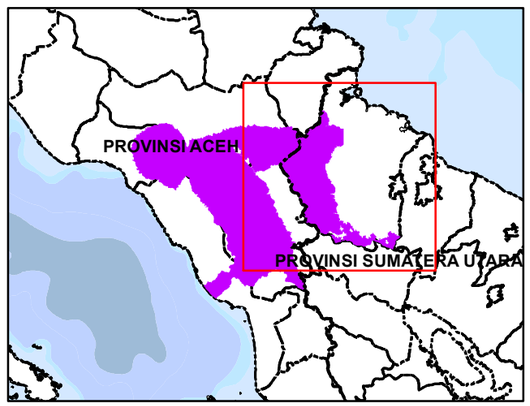

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

PETA Sub-Program PENEGAKAN HUKUM

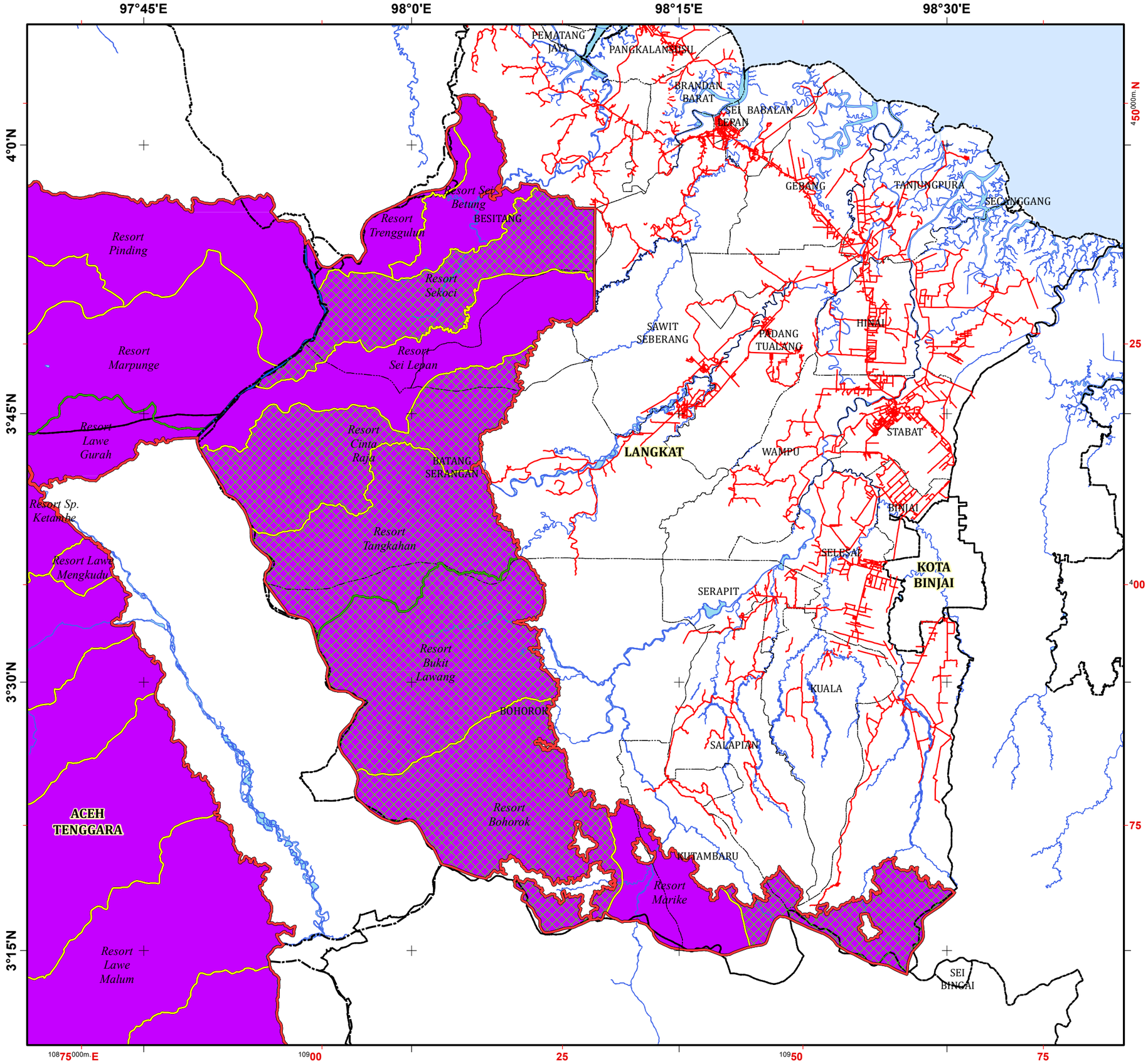

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan jalan
- Sungai
- Laut/Danau
- Batas Taman Nasional
- Batas Wilayah Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Seksi Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Resort Pengelolaan Taman Nasional
- Area TNGL
- Lokasi Resort Sub-program

0 3 6 12 18 24
Kilometer

Sumber Peta :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional
3. Distribusi Orangutan (Forina 2014)
4. Distribusi Gajah

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

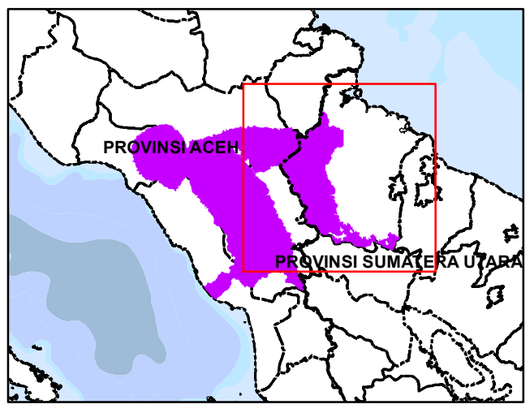

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

PETA Sub-Program PENGEMBANGAN MASYARAKAT

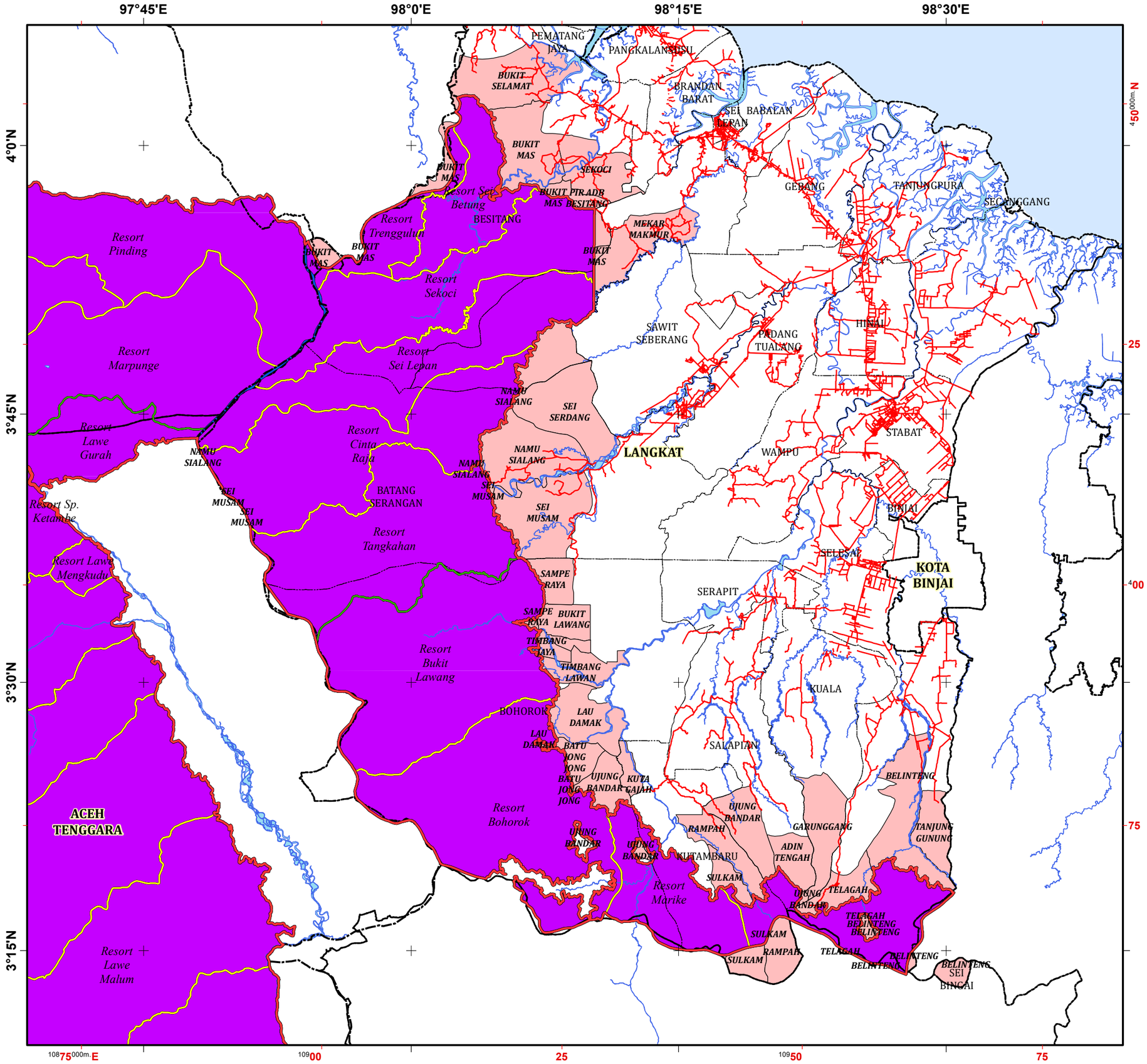

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan jalan
- Sungai
- Laut/Danau
- Batas Taman Nasional
- Batas Wilayah Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Seksi Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Resort Pengelolaan Taman Nasional
- Area TNGL
- Desa di Sekitar TNGL

0 3 6 12 18 24
Kilometer

Sumber Peta :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional
3. Distribusi Orangutan (Forina 2014)
4. Distribusi Gajah

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

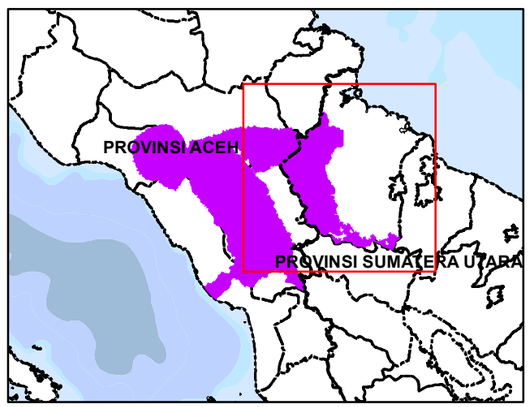

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

PETA Sub-Program EKOWISATA

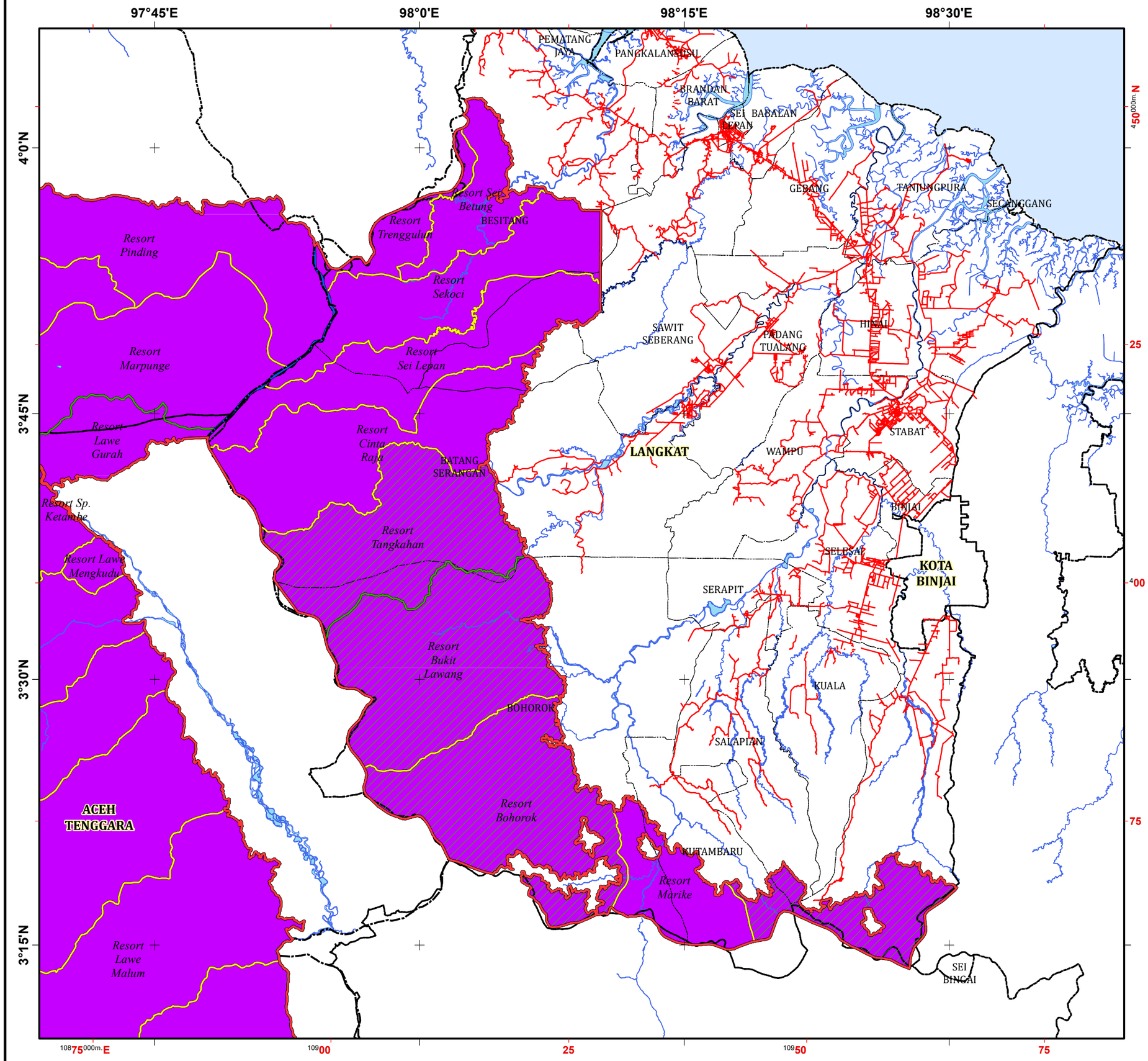

Legenda

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan jalan
- Sungai
- Laut/Danau
- Batas Taman Nasional
- Batas Wilayah Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Seksi Pengelolaan Taman Nasional
- Batas Resort Pengelolaan Taman Nasional
- Area TNGL
- Lokasi Resort Sub-program

0 3 6 12 18 24
Kilometer

Sumber Peta :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Peta Pengelolaan Taman Nasional
3. Distribusi Orangutan (Forina 2014)
4. Distribusi Gajah

Proyeksi Peta :
Universal Tranverse Mercator (UTM) Zone 47N

Datum :
WGS 1984

Koordinat Peta :
Geografik dan UTM

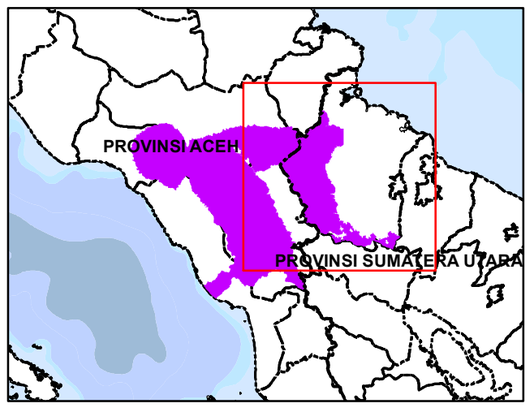

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER